



Ita Wotu Nusa

P-RKPD



*Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur*

TAHUN 2025



Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si
BUPATI

M. Miftah T. R. Wattimena, S.Ip., MA
WAKIL BUPATI

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

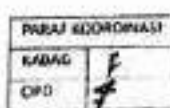
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan program prioritas pembangunan daerah serta kerangka ekonomi keuangan daerah Tahun 2025 dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025;
- c. bahwa perlu adanya arah, landasan dan kepastian hukum dalam menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1555, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



- dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2045;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur



PARAF KOORDINASI	
KABAG	<i>[Signature]</i>
OPD	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Perubahan RKPD adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan TAPD bagi penyusunan KUPA dan PPAS-P serta Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan RKPD adalah untuk menyesuaikan perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, penambahnan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terpadu dan sinergi antara perencanaan pembangunan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi Maluku dan Nasional.

BAB II

RKPD TAHUN 2025



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 4

1. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika (disesuaikan dengan pasal 349 ayat 1 Permendagri 86 thn 2017.
2. Ketentuan mengenai perubahan RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 Nomor 565) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



Diundangkan di Bula
pada tanggal 25 Juli 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ACHMAD. Q. AMAHORU



PARAF KOORDINASI	
KABAG	<i>[Signature]</i>
OPD	<i>[Signature]</i>

PARAF HIRARKI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

Pasal 4

1. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika (d disesuaikan dengan pasal 349 ayat 1 Permendagri 86 thn 2017.
2. Ketentuan mengenai perubahan RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 Nomor 565) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,


FACHRI HUSNI ALKATIRI

Diundangkan di Bula
pada tanggal 25 Juli 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ACHMAD. Q. AMAHORU



PARAF KOORDINASI	
KABAG	/
OPD	/

PARAF HIRARKI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAG	/



PARAF KOORDINASI	
KABAG	<i>[Signature]</i>
OPD	<i>[Signature]</i>

Daftar Isi

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-2
1.3 Hubungan RKPD Antar Dokumen Lainnya	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan	I-10
1.5 Sistematisasi Penyusunan	I-11
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	II-1
2.1 Capaian Kinerja	II-1
2.1.1 Realisasi Indikator Makro	II-1
2.1.2 Realisasi Kinerja Utama	II-2
2.1.3 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	II-3
2.2 Serapan Anggaran	II-3
2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025	II-5
2.3.1 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-13
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-27
2.3.3 Urusan Kelautan dan Perikanan	II-44
2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-49
2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-54
2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-59
2.3.7 Unsur Kewilayahan	II-61
2.3.8 Unsur Pemerintahan Umum	II-71
2.4 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan	II-195
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2025	III-2
3.2 Kerangka Ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2025	III-4

3.3 Kerangka Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025	III-6
3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-11
3.5 Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan	III-13
3.6 Kerangka Pendanaan Keuangan	III-14
3.7 Kerangka Pendapatan Daerah	III-17

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAHIV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-2
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku	IV-4
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025	IV-11
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025	IV-17
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-17
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025	IV-19
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2025 ..	IV-19
A. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-19
B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-20
C. Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025	IV-23
4.3 Kebijakan Pembangunan	IV-39
4.3.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang	IV-39
A. Wilayah Pengembangan	IV-41
B. Sistem Perkotaan	IV-43
C. Rencana Sistem Perkotaan dan Perdesaan	IV-47
D. Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan	IV-48
E. Rencana Sistem Kawasan Perdesaan	IV-49
F. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan	IV-50
4.3.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang	IV-51
A. Rencana Kawasan Lindung	IV-52
B. Rencana Hutan Lindung	IV-52
C. Rencana Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan	



Bawahannya	IV-53
D. Rencana Kawasan Perlindungan Setempat	IV-53
E. Rencana Kawasan Cagar Alam dan Suaka Alam	IV-55
F. Kawasan Rawan Bencana Alam	IV-56
G. Rencana Kawasan Lindung Geologi	IV-58
H. Rencana Kawasan Lindung Lainnya	IV-58
I. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya	IV-58
J. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	IV-60
K. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	IV-63
L. Kawasan Peruntukan Pertanian	IV-63
M. Kawasan Peruntukan Perkebunan	IV-65
N. Kawasan Peruntukan Perikanan	IV-68
O. Kawasan Peruntukan Pertambangan	IV-70
P. Kawasan Peruntukan Industri	IV-73
Q. Kawasan Pariwisata	IV-74
R. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman	IV-77
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	V1-1
DAFTAR LAMPIRAN	

Daftar Tabel

No Tabel	Judul	Hal
2.1	Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur	1-II
2.2	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seram Bagian Timur Triwulan II Tahun 2025	2-II
2.3	Realisasi APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Triwulan II Tahun Anggaran 2025	3-II
2.4	Kategori dan Nilai Kualitas Capaian Pelaksanaan Program ICP dan IRC	6-II
2.5	Hasil Evaluasi Capaian Program RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	7-II
2.6	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Pendidikan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 (Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga)	13-II
2.7	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Kesehatan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 (Dinas Kesehatan, RSUD Bula dan RSUD Pulau Gorom)	15-II
2.8	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	18-II
2.9	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	21-II
2.10	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Satuan Polisi PP, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran)	23-II
2.11	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Sosial Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Sosial)	26-II
2.12	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Tenaga Kerja Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	28-II
2.13	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Pangan Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Ketahanan Pangan)	29-II
2.14	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Lingkungan Hidup Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Lingkungan Hidup)	30-II
2.15	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	32-II
2.16	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak)	33-II



No Tabel	Judul	Hal
2.17	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	34-II
2.18	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Perhubungan Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Perhubungan)	36-II
2.19	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Komunikasi dan Informatika Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	37-II
2.20	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)	38-II
2.21	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Penanaman Modal Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	39-II
2.22	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga)	41-II
2.23	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Kebudayaan Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga)	42-II
2.24	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Perpustakaan Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	43-II
2.25	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Kearsipan Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	44-II
2.26	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Perikanan)	44-II
2.27	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Pariwisata Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Pariwisata)	45-II
2.28	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Pertanian Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Pertanian)	46-II
2.29	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Perdagangan Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)	48-II
2.30	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Perindustrian Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)	48-II
2.31	Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Transmigrasi Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	49-II
2.32	Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Pendukung Triwulan II Tahun 2025 (Sekretariat Daerah)	49-II
2.33	Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Pendukung Triwulan II Tahun 2025 (Sekretariat DPRD)	53-II
2.34	Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Penunjang Triwulan II Tahun 2025 (Bappeda Litbang)	54-II
2.35	Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Penunjang Triwulan II Tahun 2025 (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	55-II
2.36	Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Pengelolaan Pendapatan Triwulan II Tahun 2025 (Badan Pendapatan Daerah)	56-II



No Tabel	Judul	Hal
2.37	Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Penunjang Kepegawaian Triwulan II Tahun 2025 (Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM)	57-II
2.38	Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Triwulan II Tahun 2025 (Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM)	58-II
2.39	Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Triwulan II Tahun 2025 (Bappeda Litbang)	58-II
2.40	Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Pengawasan Triwulan II Tahun 2025 (Inspektorat Daerah)	59-II
2.41	Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Kewilayahan Triwulan II Tahun 2025 (15 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur)	61-II
2.42	Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Pemerintahan Umum Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan II Tahun 2025 (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	72-II
2.43	Rekapitulasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Triwulan II Tahun 2025	73-II
2.44	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	78-II
3.1	Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Seram Bagian	8-III
3.2	Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2025	15-III
3.3	Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024-2025	19-III
3-4	Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024-2025	23-III
3.5	Proyeksi Belanja Mandatory, Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025	22-III
3.6	Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024-2025	23-III
4.1	Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Maluku Tahun 2025-2029	5-IV
4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Maluku Tahun 2025-2029	8-IV
4.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029	13-IV
4.4	Keterkaitan antara Isu Strategis dan prioritas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024	22-IV
4.5	Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Maluku dan Prioritas Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025	23-IV
4.6	Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025	25-IV
4.7	Rencana Hirarki Pusat Pelayanan di Kabupaten Seram Bagian Timur	45-IV
4.8	Potensi Kehutanan di Kabupaten Seram Bagian Timur	59-IV
4.9	Luasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Seram Bagian Timur	61-IV
4.10	Usulan Alih Fungsi Hutan Di Kabupaten Seram Bagian Timur	61-IV

No Tabel	Judul	Hal
4-11	Luas Lahan Kawasan Pertanian	64-IV
4.12	Luas Lahan Perkebunan	66-IV
4.13	Wilayah Komoditas	67-IV
4-14	Daerah Potensial Untuk Pengembangan Usaha Budidaya di Perairan Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Peruntukannya	69-IV
4.15	Potensi Pertambangan dan Energi Selain Minyak Bumi di Kabupaten Seram Bagian Timur	71-IV
4.16	Jenis Industri berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur	74-IV
4.17	Potensi Pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Timur	76-IV
4.18	Penyebaran Lokasi Transmigrasi	78-IV
5.1	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Berdasarkan Urusan Tahun 2025	2-V
5.2	Konsistensi Dokumen Perencanaan Perubahan Tahun 2025	5-V



Daftar Gambar

No Gambar	Judul	Hal
3.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Lainnya	9-I
4.1	Visi Pembangunan Nasional 2025-2029	2-IV
4.2	Misi Pembangunan Nasional 2025-2029	3-IV
4.3	Program Prioritas Presiden Republik Indonesia	4-IV
4.4	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	4-IV
4.5	Program Prioritas Nasional Tahun 2025	17-IV
4.6	Konsep Struktur Ruang Kota Kabupaten Seram Bagian Timur	40-IV
4.7	Peta Rencana Wilayah Pengembangan Kabupaten Seram Bagian Timur	42-IV
4.8	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur	47-IV
4.9	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur	54-IV
4.10	Peta Kawasan Lindung Kabupaten Seram Bagian Timur	55-IV
4.11	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Kabupaten Seram Bagian Timur	60-IV
4.12	Peta Rencana Kawasan Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur	65-IV
4.13	Peta Rencana Kawasan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur	70-IV
4.14	Peta Konsesi Minyak Kabupaten Seram Bagian Timur	73-IV
4.15	Peta Rencana Kawasan Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Timur	76-IV
4.16	Peta Rencana Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur	77-IV
3.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Lainnya	9-I
4.1	Visi Pembangunan Nasional 2025-2029	2-IV
4.2	Misi Pembangunan Nasional 2025-2029	3-IV
4.3	Program Prioritas Presiden Republik Indonesia	4-IV
4.4	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	4-IV
4.5	Program Prioritas Nasional Tahun 2025	17-IV
4.6	Konsep Struktur Ruang Kota Kabupaten Seram Bagian Timur	40-IV
4.7	Peta Rencana Wilayah Pengembangan Kabupaten Seram Bagian Timur	42-IV
4.8	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur	47-IV
4.9	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur	54-IV
4.10	Peta Kawasan Lindung Kabupaten Seram Bagian Timur	55-IV
4.11	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Kabupaten Seram Bagian Timur	60-IV
4.12	Peta Rencana Kawasan Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur	65-IV
4.13	Peta Rencana Kawasan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur	70-IV
4.14	Peta Konsesi Minyak Kabupaten Seram Bagian Timur	73-IV
4.15	Peta Rencana Kawasan Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Timur	76-IV
4.16	Peta Rencana Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur	77-IV

Bab. I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (1), yaitu salah satu dokumen perencanaan daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan daerah untuk jangka waktu tahunan. RKPD adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD-P merupakan penjabaran secara operasional tahunan dari dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 dan rancangan RPJMD 2025-2029 yang juga memuat sasaran dan prioritas Pembangunan tahunan sesuai berdasarkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/64/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan percepatan perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 dan dukungan terhadap Asta Cita atau Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Dasar penyusunan RKPD-P meliputi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD awal, ketidak sesuaian perkembangan keadaan (Asumsi prioritas, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, program dan kegiatan) serta factor-faktor seperti kemampuan keuangan daerah dan pemanfaatan SILPA (Sisa lebih perhitungan anggaran).

1.2 Dasar Hukum

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 di susun berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
12. Peraturan Presiden 104 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) 6 | Bab I P-RKPD Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

- Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033. (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Maluku 2019 – 2024;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 – 2032;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 09 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025.

1.3 Hubungan RKPD Antar Dokumen lainnya

Pemerintah Daerah menyusun beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait dalam rangka menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari apa yang telah dituangkan pada dokumen perencanaan lainnya. RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. RKPD dan RPJPD 2025-2045

RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD yakni periode 2025-2045. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Maluku dan RPJPN.

2. RKPD dengan Teknokratik RPJMD 2025-2029

RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD tahun 2025-2029. Namun penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan, sehingga RKPD sementara ini mengacu pada dokumen teknokratik RPJMD yang telah

disusun. RKPD berisi penjabaran program pembangunan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode RPJMD.

3. RKPD dan Renja PD

RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra PD.

4. RKPD dan APBD

RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

5. RKPD dan RTRW

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

6. RKPD dan RPKD

Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029, di mana program-program dalam RPKD telah masuk ke dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal penurunan angka kemiskinan.

7. RKPD dan SPM

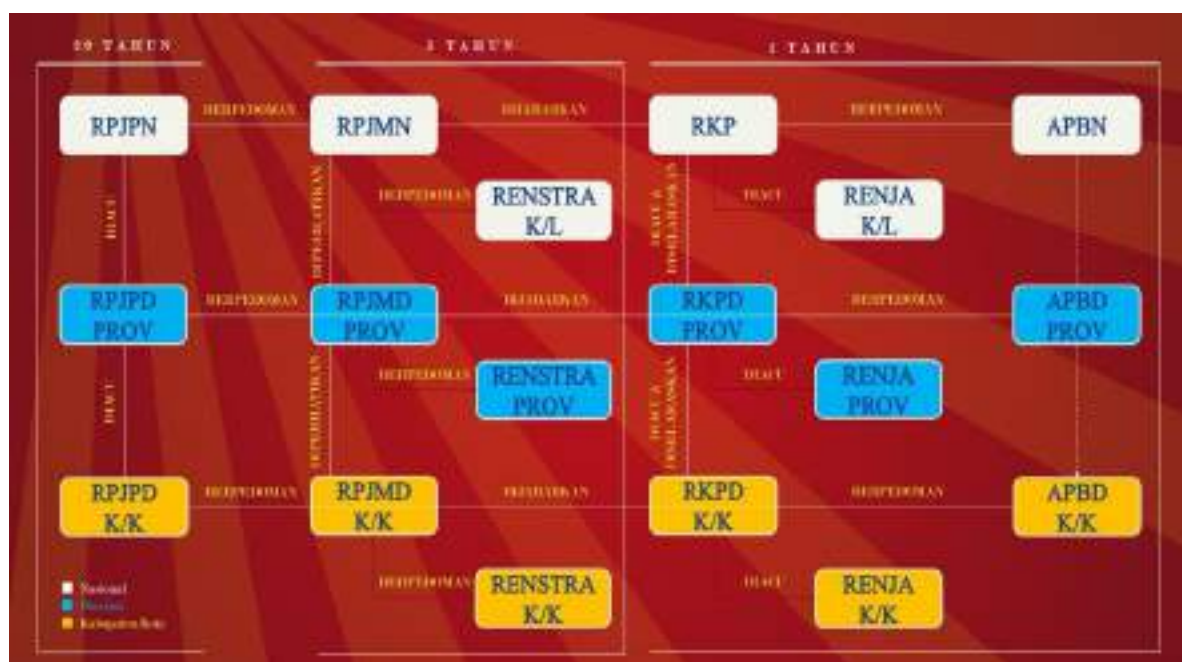
Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

8. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi

Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD

memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Dalam penyusunan dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah Provinsi Maluku dan Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu sebagai berikut.



Sumber: UU No 25 Tahun 2004

Gambar : 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Lainnya

Selain berpedoman pada Dokumen Pusat dan Provinsi yang merupakan dokumen wajib yang perlu diselaraskan, dokumen-dokumen sektoral juga menjadi salah satu sumber informasi yang penting untuk digunakan sebagai bahan telaahan dalam menentukan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang selanjutnya menjadi salah satu dasar

penentuan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta penyelarasan program prioritas dan pagu indikatif.

1.4 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 serta penyesuaian kerangka pendanaan akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan, penganggaran, yang sudah berjalan berdasarkan evaluasi Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan II.

b) Tujuan

Tujuan perubahan terhadap RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025;
3. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025;
4. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2025;
5. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).

1.5 Sistematika Penyusunan

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Memuat gambaran umum penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 yang Mencakup:

- 1.1 Latar Belakang.Dasar Hukum.
- 1.2 Maksud dan Tujuan.
- 1.3 Hubungan antara Dokumen.
- 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini Menguraikan tentang Evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan Permasalahan pembangunan daerah yang mendasar perlunya disusun Perubahan RKPD Tahun 2025 yang mencakup :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun Berjalan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rancangan ekonomi dan keuangan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro semester pertama Tahun 2025 dan proyeksi tahun 2025, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang di perlukan pada tahun 2025.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Bab ini menguraikan tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yaitu penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahun 2025.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025

Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan atau tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Bab. II

Evaluasi Hasil RKPD

Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

2.1. Capaian Kinerja

Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan evaluasi atas realisasi kinerja yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah. Kinerja yang dievaluasi berupa kinerja utama, kinerja urusan pemerintahan dan kinerja program perangkat daerah. Pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menjadi acuan dalam perumusan strategi pembangunan berikutnya untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing.

2.1.1 Realisasi Indikator Makro

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka Capaian Indikator Makro Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1. berikut.

**Tabel 2.1 Target Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Seram Bagian Timur**

No	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	SATUAN	Tahun 2025	
			Target	Realisasi (Triwulan II)*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,78	3,58
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,97	70,28
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,17	3,24
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	20,40	21,03
5	Rasio Gini	Indeks	0,2002	0,2001
6	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp (Juta)	25,86	25,03

Sumber : RPJMD Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029

*) Data Tahun 2024

Pada tabel tersebut realisasi indikator makro yang digunakan untuk Triwulan II tahun 2025 adalah data akhir tahun 2024, karena sebagian besar indikator baru bisa diketahui realisasinya pada akhir tahun 2025. Walaupun menggunakan realisasi tahun 2024, kondisi indikator diharapkan dapat menggambarkan capaian pada tahun 2025 yang selanjutnya menjadi tolok ukur penentuan kebijakan untuk pencapaian target indikator makro tahun 2025.

2.1.2 Realisasi Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Untuk memonitoring pencapaian indikator kinerja utama pada triwulan II Tahun 2025, dilakukan evaluasi kinerja dengan hasil sebagaimana pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Seram Bagian Timur Triwulan II Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025 Target
1	PDRB per kapita meningkat (Juta Rupiah)	25,03	25,86
2	Kontribusi PDRB industri pengolahan meningkat	1,70	1,71
3	Tingkat kemiskinan menurun	21,03	20,40
4	Prevalensi stunting menurun		33,25
5	Rasio gini menurun	0,201	0,2002
6	Kontribusi PDRB Kab. SBT terhadap Provinsi Maluku meningkat		
	a. PDRB ADHB		5,95
	b. PDRB ADHK		6,13
7	Indeks daya saing daerah meningkat		3,00
8	Indeks reformasi birokrasi meningkat		CC
9	Indeks pelayanan publik meningkat		2,09
			Cukup
10	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik meningkat		2,57
			Cukup
11	IPM meningkat	70,28	71,97
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat meningkat		52,68
13	Indeks pembangunan kebudayaan meningkat		63,51

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025 Target
14	Penurunan intensitas emisi GRK meningkat		
15	Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat		83,67

Sumber : RPJMD Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029

2.1.3 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan pada pelaksanaan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah tersebut. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah adalah program dan kegiatan yang mendukung urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Adapun realisasi kinerja, realisasi fisik dan penyerapan anggaran per urusan dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disajikan pada tabel 2.3 dengan keterangan sebagai berikut :

2.2 Serapan Anggaran

Serapan Anggaran sampai dengan 31 Maret 2025 masih tergolong Sangat Rendah. Baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Realisasi pendapatan daerah baru mencapai 13,03 persen, dan realisasi belanja sebesar 8,04 persen. Rincian realisasi keuangan sampai dengan 31 Maret 2025 sebagai berikut.

**Tabel 2.3 Realisasi APBD Kabupaten Seram Bagian Timur
Triwulan II Tahun Anggaran 2025**

	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4	PENDAPATAN DAERAH	935,279,078,400.00	292.048.709.365,39	31,22
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17,860,808,547.00	9.276.783.445,39	51,93
4.1.01	Pajak Daerah	7,483,753,667.00	2.274.260.726,18	30,38
4.1.02	Retribusi Daerah	1,500,000,000.00	90.364.000,00	6,02
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,786,600,370.00	6.517.696.726,00	136,16
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4,090,454,510.00	394.461.993,21	9,64
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	17,860,808,547.00	9.276.783.445,39	51,93
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	898,658,739,453.00	282.771.925.920,00	31,46
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	

Uraian		Anggaran	Realisasi	%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	25,258,447,000.00	7.815.448.900,00	30,94
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	552,293,041,000.00	239.192.588.092,00	43,30
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	150.601.981.000.00	35.765.888.928,00	23,74
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN		728,153,469,000.00	282.771.925.920,00	38,83
4.2.01.05	Dana Desa	157,093,474,000.00	0,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA		157,093,474,000.00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.411.796.453,00	0,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	13.411.796.453,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		13.411.796.453,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		898.658.739.453,00	282.771.925.920,00	31,46
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18,759,530,400.00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18,759,530,400.00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		18,759,530,400.00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		935,279,078,400.00	292.048.709.365,39	31,22
5	BELANJA DAERAH	999.885.347.684,00	251.311.731.669,73	25,13
5.1	BELANJA OPERASI	686.835.023.728,50	243.720.874.627,17	35,48
5.1.01	Belanja Pegawai	408.805.207.019,50	168.164.641.524,00	41,13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.785.038.009,00	61.512.873.263,17	25,33
5.1.04	Belanja Subsidi	1.627.150.000,00	672.200.000,00	41,31
5.1.05	Belanja Hibah	21.257.182.000,00	12.548.289.840,00	59,03
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.360.446.700,00	822.870.000,00	6,65
JUMLAH BELANJA OPERASI		686.835.023.728,50	243.726.624.627,17	35,48
5.2	BELANJA MODAL	93.177.106.758,50	7.590.857.042,56	8,14
5.2.01	Belanja Modal Tanah	150.000.000,00	0,00	0,00

Uraian		Anggaran	Realisasi	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.425.139.865,50	1.342.661.100,00	6,57
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.662.949.248,00	302.508.085,00	1,53
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.510.206.048,00	5.945.687.857,56	11,32
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	428.811.597,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		93.177.106.758.50	7.590.857.042,56	8,14
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	890.000.000.00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	890.000.000.00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		890.000.000.00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	218.983,217,197.00	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa	218,983,217,197.00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		218,983,217,197.00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA		999.885.347.684,00	251.311.731.669,73	25,13
SURPLUS/DEFISIT		(64.606.269.284,00)	40.731.227.695,66	63,04
6	PEMBIAYAAN DAERAH	64.606.269.284,00	0,00	0,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	64.606.269.284,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	64.606.269.284,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		64.606.269.284,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		64.606.269.284,00	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	40.731.227.695,66	0,00

Sumber Data : BPKAD Kab. Seram Bagian Timur, 2025

2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 sampai dengan triwulan satu Bulan Maret dilakukan melalui analisis indeks capaian program. Indeks capaian program dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi anggaran pada triwulan satu tahun 2025 pada tiap perangkat daerah dengan target capaian yang harus dicapai pada triwulan kesatu tahun 2025 dalam satuan persentase.

Selanjutnya nilai Indeks Capaian Program (ICP) dan Indeks Realisasi Capaian (IRC) dibandingkan dengan kategori kualitas nilai capaian pelaksanaan program yang terbagi menjadi 5 kategori sebagai berikut.

**Tabel 2.4 Kategori dan Nilai Kualitas Capaian
Pelaksanaan Program ICP dan IRC**

No	Kategori	Simbol	Nilai Kualitas Capaian
1	Sangat Tinggi (ST)	$\geq$	47%
2	Tinggi (T)	$\geq$	39% - 46%
3	Sedang (S)	$\geq$	34% - 38%
4	Rendah (R)	$\geq$	26% - 33%
5	Sangat Rendah (SR)	$\leq$	25%

**Tabel 2.5 Hasil Evaluasi Capaian Program RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur
sampai dengan Triwulan II Tahun 2025**

No	URUSAN/PD	TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	ICP	KATEGORI	OPD
I	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	485.367.325.738	191.953.152.671	39,55	T	
1	Pendidikan	252.843.908.346	108.449.694.364	42,89	T	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
2	Kesehatan	89.256.064.386	44.483.268.997	49,84	ST	Dinas Kesehatan
		34.142.086.972	8.894.180.543	26,05	R	RSUD Bula
		7.454.000.000	2.135.756.632	28,65	R	RSUD Pulau Gorom
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46.734.211.443	19.398.613.574	41,51	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.045.397.352	1.176.803.466	29,09	R	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5.651.801.044	2.666.690.252	47,18	ST	Satpol PP
		36.967.285.168	854.798.788	2,31	SR	BPBD
		2.530.002.217	1.422.293.054	56,22	ST	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Dinas Sosial	5.742.568.810	2.471.053.001	43,03	SR	Dinas Sosial



No	URUSAN/PD	TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	ICP	KATEGORI	OPD
II	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan dasar	43.732.337.654	18.562.022.105	42,44	T	
1	Tenaga Kerja	4.208.775.082	1.662.458.287	39,50	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Ketahanan Pangan	2.881.303.754	1.354.021.907	46,99	T	Dinas Ketahanan Pangan
3	Lingkungan Hidup	4.417.727.482	2.540.555.347	57,51	ST	Lingkungan Hidup
4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.530.656.528	1.009.130.282	39,88	T	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.079.637.012	1.336.625.802	32,76	R	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes ,Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.056.056.785	2.732.265.772	38,72	S	PPKB
7	Perhubungan	4.387.702.889	2.205.456.514	50,26	ST	dinas Perhubungan
8	Komunikasi dan Informatika	1.393.000.000	531.757.800	38,17	S	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	4.821.279.227	2.657.751.827	55,13	ST	Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan
10	Penanaman Modal	2.678.535.395	1.680.453.428	62,74	ST	Dinas Penanaman Modal dan PTSP



No	URUSAN/PD	TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	ICP	KATEGORI	OPD
11	Pemuda dan Olahraga	3.145.218.000	20.000.000	0,64	SR	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
12	Kebudayaan	332.446.500	220.000.000	66,18	ST	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
13	Perpustakaan	1.729.999.000	596.695.139	34,49	S	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14	Kearsipan	70.000.000	14.850.000	21,21	SR	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	Urusan Pilihan	26.180.246.317	9.465.703.946	36,16	S	
1	Kelautan dan Perikanan	8.553.512.663	2.235.344.602	26,13	R	Dinas Perikanan
2	Pariwisata	2.746.311.787	1.284.966.412	46,79	T	Dinas Pariwisata
3	Pertanian	11.759.139.357	4.860.645.668	41,34	T	Dinas Pertanian
4	Perdagangan	169.600.000	135.071.604	79,64	ST	Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan
5	Perindustrian	1.976.412.000	590.049.300	29,85	R	Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan
6	Transmigrasi	975.270.510	359.626.360	36,87	S	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
IV	Unsur Pendukung	126.569.437.229	39.766.924.838	31,42	R	



No	URUSAN/PD	TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	ICP	KATEGORI	OPD
1	Sekretariat Daerah	65.477.586.028	13.541.739.498	20,68	SR	Sekretariat Daerah
2	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	599.998.270	423.888.500	70,65	ST	Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
3	Bagian Hukum	450.000.000	247.900.000	55,09	ST	Bagian Hukum
4	Bagian Perekonomian dan SDM	549.998.500	345.585.000	62,83	ST	Bagian Perekonomian dan SDM
5	Bagian Administrasi Pembangunan	349.998.700	107.006.460	30,57	R	Bagian Administrasi Pembangunan
6	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	750.000.000	490.798.480	65,44	ST	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
7	Bagian Organisasi	358.363.800	143.467.936	40,03	T	Bagian Organisasi dan Tatalaksana
8	Bagian Umum dan Perlengkapan	9.919.861.800	1.547.043.630	15,60	SR	Bagian Umum dan Perlengkapan
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	655.000.000	293.878.000	44,87	T	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
10	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12.301.095.200	8.785.200.000	71,42	ST	Bagian Kesejahteraan Rakyat
11	Sekretariat DPRD	35.157.534.931	13.840.417.334	39,37	T	Sekretariat DPRD
V	Unsur Pengawasan	8.800.629.931	4.022.074.908	45,70	T	
1	Pengawasan	8.800.629.931	4.022.074.908	45,70	T	Inspektorat Daerah



No	URUSAN/PD	TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	ICP	KATEGORI	OPD
VI	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.397.655.522	27.948.929.787	11,53	SR	
1	Perencanaan	6.074.194.932	3.266.332.656	53,77	ST	Bappeda Litbang
2	Keuangan	227.295.828.014	20.812.014.660	9,16	SR	BPKAD
3	Pendapatan	4.125.280.035	1.615.333.039	39,16	T	Bapenda
4	Kepegawaian	4.479.461.291	2.255.249.432	50,35	ST	BKPSDM
5	Pelatihan	400.905.000	-	0,00	SR	BKPSDM
6	Penelitian dan Pengembangan	21.986.250	-	0,00	SR	Bappeda Litbang
VII	Unsur Kewilayahan	17.426.039.234	9.512.434.394	54,59	ST	
1	Administrasi Pemerintahan	1.142.279.566	852.381.486	74,62	ST	Kecamatan Seram Timur
2	Administrasi Pemerintahan	1.620.157.605	841.274.819	51,93	ST	Kecamatan Siwalalat
3	Administrasi Pemerintahan	1.153.112.066	388.036.191	33,65	S	Kecamatan Gorom Timur
4	Administrasi Pemerintahan	1.670.175.722	1.210.216.690	72,46	ST	Kecamatan Teluk Waru
5	Administrasi Pemerintahan	1.406.495.466	695.687.232	49,46	ST	Kecamatan P. Gorom
6	Administrasi Pemerintahan	1.008.311.857	917.101.865	90,95	ST	Kecamatan P. Panjang



No	URUSAN/PD	TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	ICP	KATEGORI	OPD
7	Administrasi Pemerintahan	2.406.952.517	1.158.917.000	48,15	ST	Kecamatan Bula
8	Administrasi Pemerintahan	1.664.823.636	722.535.172	43,40	T	Kecamatan Bula Barat
9	Administrasi Pemerintahan	882.674.177	384.022.137	43,51	T	Kecamatan Tutuk Tolu
10	Administrasi Pemerintahan	465.054.760	109.219.120	23,49	SR	Kecamatan Kian Darat
11	Administrasi Pemerintahan	930.679.619	316.792.137	34,04	S	Kecamatan Siritaun Wida Timur
12	Administrasi Pemerintahan	1.244.196.517	755.657.066	60,73	ST	Kecamatan Kilmury
13	Administrasi Pemerintahan	199.764.100	86.986.000	43,54	T	Kecamatan Werinama
14	Administrasi Pemerintahan	760.416.375	472.999.993	62,20	ST	Kecamatan Kesui Watubela
15	Administrasi Pemerintahan	870.945.251	600.607.486	68,96	ST	Kecamatan Teor
VI	Unsur Pemerintahan Umum	6.645.000.000	4.538.768.124	68,30	ST	
11	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	6.645.000.000	4.538.768.124	68,30	ST	Kesbangpol
TOTAL		957.118.671.625	305.770.010.773	31,95	R	
IRC				41,21	T	

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah.

2.3.1. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan dalam Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 2 program. Hasil evaluasi capaian kinerja program Urusan Pendidikan sampai dengan triwulan pertama tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.6 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Pendidikan
Triwulan II Tahun Anggaran 2025
(Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	28	193.504.038.776	8	87.593.955.389	45,27	T
Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	100.000.000	0	-	0,00	SR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13	191.710.238.776	5	87.398.668.153	45,59	T
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	5.000.000	0	-	0,00	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	462.000.000	2	133.989.000	29,00	R
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	297.000.000	0	-	0,00	SR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	179.800.000	0	52.828.236	29,38	R
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	750.000.000	1	8.470.000	1,13	SR
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	226	59.339.869.570	24	20.855.738.975	35,15	S



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	167	37.278.995.610	14	19.808.002.975	53,13	ST
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	39	14.568.486.460	9	1.039.973.500	7,14	SR
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	19	7.456.857.500	1	7.762.500	0,10	SR
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 sklh	35.530.000	0 sklh	-	0,00	SR
TOTAL	254	252.843.908.346	32	108.449.694.364	42,89	T
IRC					40,21	T

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

Dari hasil evaluasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa sampai dengan Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2025, Indeks Rerata Capaian (IRC) pada Urusan Pendidikan yang diampuh oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga masuk kategori Tinggi (T) dengan nilai sebesar 40,21%. Secara parsial 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki ICP berkategori Tinggi (T), sedangkan Program Pengelolaan Pendidikan memiliki ICP berkatagori Sedang (S).

Dengan Indeks Rerata Capaian (IRC) yang dicapai sampai dengan Triwulan II oleh Urusan Pendidikan tersebut diatas, maka Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan program dan kegiatan dengan serapan anggaran yang baik.

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan, RSUD Bula serta RSUD Pulau Gorom sebagai perangkat daerah penyelenggara urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Kesehatan dalam tahun 2025 melaksanakan 3 program. Hasil evaluasi capaian kinerja program Urusan Kesehatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.7 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Kesehatan
Triwulan II Tahun Anggaran 2025
(Dinas Kesehatan, RSUD Bula dan RSUD Pulau Gorom)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
DINAS KESEHATAN						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	636	69.906.064.386	631	37.926.634.597	54,25	ST
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	225.000.000	0 Dok	-	0,00	SR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	628	68.681.064.386	625 Org	37.382.107.097	54,43	ST
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	200.000.000	1 Lap	100.000.000	50,00	ST
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	100,00	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	500.000.000	2	252.086.000	50,42	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Lap	200.000.000	2 Lap	92.441.500	46,22	T
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	233	18.870.000.000	6	6.076.634.400	32,20	R
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	635.000.000	0 Unit	-	0,00	SR
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	227	18.010.000.000	6	6.076.634.400	33,74	R
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1 Dok	225.000.000	0 Dok	-	0,00	SR
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00	ST



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dok	180.000.000	1 Dok	180.000.000	100,00	ST
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Org	300.000.000	3 Org	300.000.000	100,00	ST
TOTAL	873	89.256.064.386	641	44.483.268.997	49,84	ST
IRC					62,15	ST
RSUD BULA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DARAH KABUPATEN/KOTA	21	1.260.282.272	9	317.001.793	25,15	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	403.880.612	1	105.824.275	26,20	R
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	120.000.000	0	-	0,00	SR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	736.401.660	8	211.177.518	28,68	R
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	18	32.837.742.700	5	8.577.178.750	26,12	R
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3	6.583.100.000	0	-	0,00	SR
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14	26.214.642.700	5	8.577.178.750	32,72	R
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	40.000.000	0	-	0,00	SR
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	44.062.000	0	-	0,00	SR

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	44.062.000	0	-	0,00	SR
TOTAL	40	34.142.086.972	14	8.894.180.543	26,05	R
IRC					17,09	SR
RSUD GORAN RIUN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	54	1.705.600.000	14	306.330.000	17,96	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	46	1.262.640.000	12	213.400.000	16,90	SR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	100.000.000	0	-	0,00	SR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	101.000.000	1	2.000.000	1,98	SR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	241.960.000	1	90.930.000	37,58	S
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	36	5.748.400.000	5	1.829.426.632	31,82	R
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32 Lap	4.718.400.000	5 Lap	1.379.631.544	29,24	R
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4	1.030.000.000	0	449.795.088,05	43,67	T
TOTAL	90	7.454.000.000	19	2.135.756.632	28,65	R
IRC					24,89	SR
TOTAL OPD		130.852.151.358		55.513.206.172	42,42	T
IRC					34,71	S

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

Dilihat dari hasil evaluasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa, Indeks Rerata Capaian (IRC) yang dicapai oleh Dinas Kesehatan sampai dengan triwulan II sebesar 62,15%, dengan kata lain bahwa serapan anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Sangat Tinggi, ini dapat dilihat



pada setiap realisasi program mencapai lebih dari 30%. Sedangkan untuk RSUD Bula dan RSUD Goran Riun Indeks Rerata Capaian (IRC) yang dicapai masih pada katagori Sangat Rendah, dimana untuk RSUD Bula Indeks Rerata Capaian (IRC) sebesar 17,09% dan RSUD Goran Riun sebesar 24,89%. Permasalahan yang dihadapi oleh kedua Perangkat Daerah ini adalah proses pergantian pimpinan sehingga keterlambatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada perangkat daerah tersebut. Dari keseluruhan urusan kesehatan Indeks Rerata Capaian (IRC) yang dicapai adalah sebesar 34,71% atau pada kategori Sedang (S), ini disebabkan oleh program dan kegiatan yang masih banyak belum dilaksanakan oleh kedua Perangkat Daerah tersebut.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam tahun 2025 melaksanakan 8 program. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan kedua, Indeks Rerata Capaian (IRC) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masuk kategori Tinggi (T) dengan nilai sebesar 42,26. Hasil evaluasi capaian kinerja program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan kedua tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Urusan Pemerintahan/Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	123	11.161.136.823	35	2.729.468.755	24,46	SR
Perencanaan,	2	30.000.000	2	30.000.000	100,00	ST



Urusan Pemerintahan/Program /Kegiatan /Sub Kegiatan 1	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP 6	Kategori
	K 2	Rp 3	K 4	Rp 5		
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61	4.111.455.723	30	2.423.762.955	58,95	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	53	440.000.000	0	-	0,00	SR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	3.421.440.400	1	138.126.800	4,04	SR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	398.250.000	1	106.373.321	26,71	R
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	2.759.990.700	1	31.205.679	1,13	SR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	43	1.579.277.817	30	757.068.817	47,94	ST
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten Kota	43	1.579.277.817	30	757.068.817	47,94	ST
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11	11.541.342.390	2	2.420.292.050	20,97	SR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11	11.541.342.390	2	2.420.292.050	20,97	SR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	13	157.128.000	10	81.462.000	51,84	ST
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	13	157.128.000	10	81.462.000	51,84	ST
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5	1.147.331.400	3	585.505.400	51,03	ST
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	1.147.331.400	3	585.505.400	51,03	ST
PROGRAM PENATAAN	1	2.133.750.000	0	-	0,00	SR

Urusan Pemerintahan/Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1	2.133.750.000	0	-	0,00	SR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	13	553.663.160	12	413.277.160	74,64	ST
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13	553.663.160	12	413.277.160	74,64	ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	27	18.460.581.853	22	12.411.539.392	67,23	ST
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	27	18.460.581.853	22	12.411.539.392	67,23	ST
TOTAL	236	46.734.211.443	114	19.398.613.574	41,51	T
IRC					42,26	T

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

Dari hasil evaluasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa sampai dengan Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2025, Indeks Rerata Capaian (IRC) pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diampuh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masuk kategori Tinggi (T) sebesar 42,26%. Secara parsial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 3 program yang tingkat serapan anggaran yang Sangat Rendah (SR), yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki ICP Sebesar 24,46%, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar 20,97% dan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya sebesar 0,00%, ini disebabkan ketiga program dan kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan sampai dengan Triwulan II.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam tahun 2025 melaksanakan 4 program. Hasil evaluasi pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan kedua tahun 2025, Indeks Rerata Capaian (IRC) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masuk kategori Sangat Rendah (ST) dengan nilai sebesar 13,31. Dengan kata lain bahwa serapan anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masih sangat rendah dikarenakan program dan kegiatan masih banyak yang belum dilaksanakan sampai dengan triwulan II. Hasil evaluasi capaian kinerja program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan kedua tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)

Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	64	2.237.547.352	52	1.167.834.816	52,19	ST
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2	24.994.540	0	24.994.540	100,00	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26	1.840.426.852	26	1.058.622.869	57,52	ST
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	5	48.982.000	0	5.071.100	10,35	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	253.711.960	0	68.053.900	26,82	R
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1	1.500.000	1	1.500.000	100,00	ST

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Pemerintah Daerah						
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	24	47.932.000	24	9.592.407	20,01	SR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	20.000.000	1	-	0,00	SR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	100.850.000	1	-	0,00	SR
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	100.850.000	1	-	0,00	SR
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3	841.000.000	3	-	0,00	SR
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2	616.000.000	2	-	0,00	SR
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1	225.000.000	1	-	0,00	SR
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	866.000.000	1	8.968.650	1,04	SR
Penyediaan Prasarana,Sarana dan utilitas umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1	866.000.000	1	8.968.650	1,04	SR
TOTAL	69	4.045.397.352	57	1.176.803.466	29,09	R
IRC					13,31	SR

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ketiga perangkat daerah ini dalam tahun 2025 melaksanakan 4 program.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan kedua bulan juni tahun 2025, total Indeks Rerata Capaian (IRC) yang dihasilkan oleh Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ini dengan kategori Sangat Tinggi (ST) yakni sebesar 54,72%, ini

menggambarkan bahwa ketiga perangkat daerah ini telah melaksanakan program dan kegiatan di triwulan II dengan serapan anggaran yang sangat baik, dengan rincian Dinas Satuan Polisi PP, dengan kategori Sangat Tinggi (ST) dengan nilai sebesar 75,27%, Badan Penganggulangan Bencana Daerah, dengan kategori Rendah (R) dengan nilai sebesar 29,30, disebabkan 1 program yakni Program Penanggulangan Bencana masih belum dilaksanakan, dan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan dengan kategori Sangat Tinggi (ST) dengan nilai sebesar 59,57.

Hasil evaluasi capaian kinerja program Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sampai dengan triwulan kedua tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Satuan Polisi PP, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran)

Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	137	5.561.801.544	62	2.641.690.252	47,50	ST
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	11.998.200	2	11.998.200	100,00	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25	4.957.452.544	2	2.504.690.252	50,52	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	48	205.150.800	4	80.172.800	39,08	T
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	15.000.000	-	-	0,00	SR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36	49.200.000	8	16.968.000	34,49	S
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	323.000.000	6	27.861.000	8,63	SR



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5	89.999.500	2	25.000.000	27,78	R
penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota	4	65.000.000	2	25.000.000	38,46	S
Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	1	24.999.500	-	-	0,00	SR
TOTAL	142	5.651.801.044	64	2.666.690.252	47,18	ST
IRC					75,27	ST
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	64	2.482.419.395	45	717.548.788	28,91	R
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	6.000.000	1 Dok	6.000.000	100,00	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27 org	2.197.959.397	27 org	581.148.788	26,44	R
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Pkt	199.022.350	1 Pkt	83.050.000	41,73	T
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	100,00	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Lap	30.997.660	12 Lap	12.700.000	40,97	T
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	23.439.988	3 Unit	9.650.000	41,17	T
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	12	34.484.865.773	-	137.250.000	0,40	SR
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dok	1.796.781.773	-	-	0,00	SR
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Keg	104.300.000	-	102.650.000	98,42	ST



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	10 Dok	32.583.784.000	-	34.600.000	0,11	SR
TOTAL	76	36.967.285.168	45	854.798.788	2,31	SR
IRC					29,30	R
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	64	2.012.662.217	33	1.084.793.054	53,90	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	1.297.002.217	6	689.295.804	53,15	ST
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	68.500.000	1	67.127.250	98,00	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	36	339.660.000	18	163.170.000	48,04	ST
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	204.080.000	1	100.000.000	49,00	ST
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13	103.420.000	7	65.200.000	63,04	ST
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	25	517.340.000	18	337.500.000	65,24	ST
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	13	317.340.000	6	137.500.000	43,33	T
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	12	200.000.000	12	200.000.000	100,00	ST
TOTAL	89	2.530.002.217	-	1.422.293.054	56,22	ST
IRC					59,57	ST
TOTAL OPD	307	45.149.088.429	109	4.943.782.094	45,68	T
IRC					54,72	ST

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

6. Urusan Sosial

Urusan Sosial yang diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Sosial dalam tahun 2025 melaksanakan 5 program. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan kedua Bulan Juni Tahun 2025, Indeks Rerata Capaian (IRC) Dinas Sosial masuk kategori Sangat Rendah (SR) dengan nilai sebesar 21,67%. Ini disebabkan ada beberapa program kegiatan yang memiliki serapan anggaran yang masih kecil sehingga rerata capaian yang dihasilkan Sangat Rendah. Hasil evaluasi capaian kinerja program Urusan Sosial sampai dengan triwulan kedua bulan juni tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.11 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Sosial
Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Sosial)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	76	2.597.768.810	41	1.381.553.001	53,18	ST
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	10.000.000	0	-	0,00	SR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	2.016.413.805	6	1.033.030.001	51,23	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	14	260.000.000	8	137.587.700	52,92	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	84.304.200	12	37.312.300	44,26	T
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	227.050.805	15	173.623.000	76,47	ST
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2	2.841.000.000	0	1.072.000.000	37,73	S
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1	1.372.000.000	0	635.000.000	46,28	T
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1	1.469.000.000	0	437.000.000	29,75	R
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1	55.000.000	0	-	0,00	SR
Rehabilitasi Sosial Dasar	1	55.000.000	0	-	0,00	SR

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	148.400.000	0	-	0,00	SR
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	148.400.000	0	-	0,00	SR
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1	100.400.000	0	17.500.000	17,43	SR
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	100.400.000	0	17.500.000	17,43	SR
TOTAL	81	5.742.568.810	41	2.471.053.001	43,03	T
IRC					21,67	SR

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara urusan wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dalam tahun 2025 melaksanakan 4 program. Dari hasil evaluasi (Tabel 2.12) menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan kedua Bulan Juni Tahun 2025, Indeks Rerata Capaian (IRC) Urusan Tenaga Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masuk kategori Sangat Tinggi (SR) dengan nilai sebesar 23,43. Permasalahan yang dihadapi oleh urusan tenaga kerja ini adalah dimana semua program kegiatan yang dilaksanakan belum maksimal, sehingga serapan anggaran masih sangat rendah. Hasil evaluasi capaian kinerja program Urusan Tenaga Kerja sampai dengan triwulan kedua tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.12 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Tenaga Kerja
Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	85	2.637.756.303	46	1.474.796.087	55,91	ST
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	23.000.000	1 Dok	23.000.000	100,00	ST
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	12 Bln	2.050.824.215	6 Bln	1.275.784.287	62,21	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	15 Lap	204.843.200	9 Lap	119.014.000	58,10	ST
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	12.750.000	0 Unit	-	0,00	SR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Lap	97.778.900	20 Lap	36.021.800	36,84	S
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Unit	248.559.988	10 Unit	20.976.000	8,44	SR
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	200 Org	383.438.200	100 Org	27.600.000	7,20	SR
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	200 Org	383.438.200	100 Org	27.600.000	7,20	SR
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	112	73.706.380	0	-	0,00	SR
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	112	73.706.380	0	-	0,00	SR
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	6005	1.113.874.199	100	160.062.200	14,37	SR
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	6005	1.113.874.199	100	160.062.200	14,37	SR
TOTAL	6402	4.208.775.082	246	1.662.458.287	39,50	T
IRC					23,43	SR

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

3. Urusan Pangan

**Tabel 2.13 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Pangan
Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Ketahanan Pangan)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	64	2.281.307.239	33	1.092.241.907	47,88	ST
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	9.293.500	1 Lap	4.248.000	45,71	T
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bln	1.981.307.239	6 Bln	941.466.907	47,52	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	15	191.706.500	8	97.527.000	50,87	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Lap	89.000.000	12 Lap	44.000.000	49,44	ST
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	10.000.000	6 Unit	5.000.000	50,00	ST
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2 Keg	254.996.515	2 Keg	236.780.000	92,86	ST
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	1 Keg	100.018.115	1 Keg	94.560.000	94,54	ST
Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	1 Keg	154.978.400	1 Keg	142.220.000	91,77	ST
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1 Keg	300.000.000	0 Keg	-	0,00	SR
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Keg	300.000.000	0 Keg	-	0,00	SR
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2	45.000.000	1 Keg	25.000.000	55,56	ST
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2	45.000.000	1 Keg	25.000.000	55,56	ST
TOTAL	69	2.881.303.754	36	1.354.021.907	46,99	T
IRC					49,07	ST

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Urusan Pangan yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara urusan wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pangan pada tahun 2025 melaksanakan 4 program. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan kedua bulan juni tahun 2025, Indeks Rerata Capaian (IRC) Urusan Pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dengan nilai sebesar 49,07. Hasil ini dapat dilihat bahwa hampir setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan diatas 40%. Dengan kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Ketahanan pangan menunjukkan bahwa resapan anggaran sampai dengan triwulan kedua sangat maksimal.

4. Urusan Lingkungan Hidup

**Tabel 2.14 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Lingkungan Hidup
Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Lingkungan Hidup)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	66	2.517.338.582	36	1.513.695.347	60,13	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22 Org	1.865.700.882	22 Org	1.188.552.348	63,71	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	19	430.477.700	8	218.539.319	50,77	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Lap	181.160.000	6 Lap	106.603.680	58,85	ST
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	40.000.000	0	-	0,00	SR
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2 Unit	350.120.000	0 Unit	115.610.000	33,02	R
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2 Unit	350.120.000	0 Unit	115.610.000	33,02	R



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1 Keg	150.000.000	0 Keg	-	0,00	SR
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	1 Keg	150.000.000	0 Keg	-	0,00	SR
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1 Keg	100.000.000	1Keg	71.250.000	71,25	ST
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1 Keg	100.000.000	1 Keg	71.250.000	71,25	ST
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Keg	100.000.000	0 Keg	-	0,00	SR
Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	1 Keg	100.000.000	0 Keg	-	0,00	SR
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7 Unit	1.200.268.900	3 Unit	840.000.000	69,98	ST
Pengelolaan Sampah	7 Unit	1.200.268.900	3 Unit	840.000.000	69,98	ST
TOTAL	78	4.417.727.482	40	2.540.555.347	57,51	ST
IRC					39,06	T

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Tabel 2.15 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan II Tahun 2025
(Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)**

Urusan Pemerintahan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	59	2.499.956.528	11	991.930.282	39,68	T
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	2.080.685.088	6	953.296.282	45,82	T
Administrasi Umum Perangkat Daerah	21	227.905.250	0	14.243.260	6,25	SR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	55.363.050	0	-	0,00	SR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21	115.027.140	5	24.390.740	21,20	SR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	20.976.000	0	-	0,00	SR
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1000	30.700.000	600	17.200.000	56,03	ST
Pelayanan Pencatatan Sipil	1000	30.700.000	600	17.200.000	56,03	ST
TOTAL	1059	2.530.656.528	611	1.009.130.282	39,88	T
IRC					47,85	ST

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Tabel 2.16 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak)

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	76	2.689.637.012	60	736.625.802	27,39	R
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	23.950.000	1 Dok	23.950.000	100,00	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50 Org	2.279.637.212	50 Org	612.775.802	26,88	R
Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	224.049.800	6	95.900.000	42,80	T
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Pkt	100.000.000	0 Pkt	-	0,00	SR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Lap	62.000.000	3 Lap	4.000.000	6,45	SR
PROGRAM PENATAAN DESA	18 Desa	400.000.000	0 Desa	-	0,00	SR
Penyelenggaraan Penataan Desa	18 Desa	400.000.000	0 Desa	-	0,00	SR
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2 Dok	190.000.000	0 Dok	-	0,00	SR
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dok	190.000.000	0 Dok	-	0,00	SR
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1 Dok	800.000.000	1 Dok	600.000.000	75,00	ST
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	1 Dok	800.000.000	1 Dok	600.000.000	75,00	ST



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
TOTAL	97	4.079.637.012	61	1.336.625.802	32,76	R
IRC					25,60	SR

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Tabel 2.17 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan II Tahun 2025
(Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	121	2.136.506.785	38	1.239.580.772	58,02	ST
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	15.000.000	0 Lap	-	0,00	SR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Org	1.824.156.785	24 Org	983.253.772	53,90	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	146.164.000	5	126.560.000	86,59	ST
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	21.000.000	2 Unit	21.000.000	100,00	ST
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	8 Lap	37.986.000	5 Lap	19.867.000	52,30	ST
Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	2 Unit	92.200.000	2 Unit	88.900.000	96,42	ST
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	25	385.200.000	20	222.600.000	57,79	ST



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten /Kota (DAK)	25	385.200.000	20	222.600.000	57,79	ST
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	14921	3.012.800.000	6865	1.185.335.000	39,34	T
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	1	20.000.000	0	5.025.000	25,13	SR
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal (DAK)	4401	1.355.710.000	2000	523.000.000	38,58	S
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	15 Lap	107.900.000	15 Lap	107.900.000	100,00	ST
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB) (DAK)	1982	1.157.000.000	500 Org	347.100.000	30,00	R
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota (DAK)	772	254.590.000	350	128.310.000	50,40	ST
Pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (DAK)	7750	117.600.000	4000	74.000.000	62,93	ST
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	11892	1.521.550.000	2	84.750.000	5,57	SR
Pelaksanaan pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	2 Lap	84.750.000	2 Lap	84.750.000	100,00	ST
Pelaksanaan pembangunan Keluarga	10	130.000.000	0	-	0,00	SR

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (DAK)						
Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (DAK)	11880 Org	1.306.800.000	0 Org	-	0,00	SR
TOTAL	26959	7.056.056.785	6925	2.732.265.772	38,72	S
IRC					40,18	T

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

8. Urusan Perhubungan

**Tabel 2.18 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Perhubungan
Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Perhubungan)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	80	2.840.552.889	52	1.493.256.514	52,57	ST
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	13.939.400	0 Dok	-	0,00	SR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33 Org	2.430.532.902	34 Org	1.298.496.514	53,42	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	27	243.360.299	9	119.351.794	49,04	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Lap	37.800.000	6 Lap	10.408.206	27,53	R
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit	114.920.288	3 Unit	65.000.000	56,56	ST

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	15	1.547.150.000	9	712.200.000	46,03	T
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dok	40.000.000	3 Dok	40.000.000	100,00	ST
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bln	1.507.150.000	6 Bln	672.200.000	44,60	T
TOTAL	95	4.387.702.889	61	2.205.456.514	50,26	ST
IRC					98,60	ST

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

**Tabel 2.19 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Komunikasi dan Informatika Triwulan II Tahun 2025
(Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63	550.000.000	23	196.416.800	35,71	S
Administrasi Umum Perangkat Daerah	36	375.000.000	20	176.622.800	47,10	ST
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	110.000.000	0 Unit	-	0,00	SR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Bln	40.000.000	3 Bln	19.794.000	49,49	ST
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	25.000.000	0 Unit	-	0,00	SR
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2	80.000.000	1	44.450.000	55,56	ST
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub	2	80.000.000	1	44.450.000	55,56	ST

Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	4	763.000.000	2	290.891.000	38,12	S
Pengelolaan E-Govemment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	130.000.000	1	45.350.000	34,88	S
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	633.000.000	1	245.541.000	38,79	S
TOTAL	69	1.393.000.000	26	531.757.800	38,17	S
IRC					43,13	T

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2.20 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Triwulan II Tahun 2025
(Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)

Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	64	3.681.279.227	51	2.239.551.827	60,84	ST
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	20.500.000	1 Dok	2.000.000	9,76	SR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48 Org	3.158.191.227	43 Org/3 Bln	1.897.541.827	60,08	ST
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Org	10.000.000	1 org	5.000.000	50,00	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	384.088.000	3	266.400.000	69,36	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Lap	93.500.000	2 Lap	53.610.000	57,34	ST
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1 Pkt	15.000.000	1 Pkt	15.000.000	100,00	ST

Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Pemerintahan Daerah						
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	10	35.000.000	0	3.200.000	9,14	ST
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	10 Unit Usaha	35.000.000	0 Unit Usaha	3.200.000	9,14	ST
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	50	1.105.000.000	20	415.000.000	37,56	S
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	50 Unit Usaha	1.105.000.000	20 Unit Usaha	415.000.000	37,56	S
TOTAL	124	4.821.279.227,00	71	2.657.751.827,00	55,13	ST
IRC					35,85	ST

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

11. Urusan Penanaman Modal

**Tabel 2.21 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Penanaman Modal
Triwulan II Tahun 2025
(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48	2.577.735.395	47	1.597.903.428	61,99	ST
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	2.078.700	2 Dok	1.759.000	84,62	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31 Org	2.078.535.935	31 Org	1.289.613.428	62,04	ST



Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	379.615.080	4	248.815.000	65,54	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Lap	51.505.680	2 Lap	18.994.000	36,88	S
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	55.000.000	2 Unit	27.722.000	50,40	ST
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Unit	11.000.000	6 Unit	11.000.000	100,00	ST
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	21.600.000	1	21.500.000	99,54	ST
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	21.600.000	1 Dok	21.500.000	99,54	ST
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	30	57.600.000	30	39.600.000	68,75	ST
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	30 Pelaku Usaha	57.600.000	30 Pelaku Usaha	39.600.000	68,75	ST
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	5	21.600.000	5	21.450.000	99,31	ST
Pengendalian Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5 Pelaku Usaha	21.600.000	5 Pelaku Usaha	21.450.000	99,31	ST
TOTAL	84	2.678.535.395	83	1.680.453.428	62,74	ST
IRC					82,40	ST

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang diampu oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara urusan wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Kepemudaan dan Olahraga dalam tahun 2025 melaksanakan 3 program. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan kedua, Indeks Rerata Capaian (IRC) Urusan Kepemudaan dan Olahraga oleh Dinas



Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga masuk kategori Sangat Rendah (SR) dengan nilai sebesar 1,48. Dari hasil yang dicapai oleh urusan kepemudaan dan olahraga menggambarkan bahwa serapan anggaran belum maksimal, dikarenakan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ini belum dilaksanakan. Hasil evaluasi capaian kinerja program urusan Kepemudaan dan Olahraga oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sampai dengan triwulan kedua tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga)

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1 Keg	450.000.000	0	20.000.000,00	4,44	SR
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	1 Keg	450.000.000	0 Keg	20.000.000,00	4,44	SR
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1 Unit	2.520.218.000	0 Unit	0	0,00	SR
Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	1 Unit	2.520.218.000	0 Unit	0	0,00	SR
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1 Keg	175.000.000	0 Keg	0	0,00	SR
Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1 Keg	175.000.000	0 Keg	0	0,00	SR
TOTAL	3	3.145.218.000	0	20.000.000,00	0,64	SR
IRC					1,48	SR

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

13. Urusan Kebudayaan

**Tabel 2.23 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Kebudayaan
Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan I		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3	332.446.500	2	220.000.000	66,18	ST
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	332.446.500	2	220.000.000	66,18	ST
TOTAL	3	332.446.500	2	220.000.000	66,18	ST
IRC					66,18	ST

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Urusan Kebudayaan yang diampu oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara urusan wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Kebudayaan dalam tahun 2025 melaksanakan 1 program. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan kedua, Indeks Rerata Capaian (IRC) urusan Kebudayaan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dengan nilai sebesar 66,18. Dengan Hasil evaluasi capaian kinerja oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga menunjukkan bahwa serapan anggaran yang dilaksanakan sangat maksimal.

14. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara urusan wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Perpustakaan dalam tahun 2025 melaksanakan 3 program. Hasil evaluasi pada Tabel 2.24 menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan kedua bulan juni tahun 2025, Indeks Rerata Capaian

(IRC) Urusan Perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masuk kategori Tinggi (T) dengan nilai sebesar 44,88. Hasil evaluasi capaian kinerja yang dicapai oleh Urusan Perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menunjukkan bahwa serapan anggaran yang dilaksanakan sangat maksimal sampai dengan Triwulan II Bulan Juni Tahun 2025.

Tabel 2.24 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Perpustakaan Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	26	420.000.000	10	188.946.439	44,99	T
Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	226.000.000	6	132.716.901	58,72	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	154.000.000	3	44.900.538	29,16	R
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	40.000.000	1	11.329.000	28,32	R
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	7	1.132.999.000	2	295.200.000	26,05	R
Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	374.999.000	1	174.500.000	46,53	T
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5	758.000.000	1	120.700.000	15,92	SR
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2	177.000.000	1	112.548.700	63,59	ST
Pelestarian Naska Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2	177.000.000	1	112.548.700	63,59	ST
TOTAL	35	1.729.999.000	13	596.695.139	34,49	S
IRC					44,88	T

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

15. Urusan Kearsipan

**Tabel 2.25 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Kearsipan
Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)**

Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1	20.000.000	0	-	0,00	SR
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1	20.000.000	0	0	0,00	SR
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	3	50.000.000	1	14.850.000	29,70	R
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	3	50.000.000	1	14.850.000	29,70	R
TOTAL	4	70.000.000	1	14.850.000	21,21	SR
IRC					14,85	SR

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

2.3.3. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

**Tabel 2.26 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Kelautan dan Perikanan
Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Perikanan)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	53	4.022.909.123	6	2.065.128.602	51,33	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bln	3.534.297.323	Bln	1.880.928.602	53,22	ST
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dok	50.000.000	1 Dok	-	0,00	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	14	327.691.800	3	155.561.325	47,47	ST
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1 Unit	44.000.000	Unit	-	0,00	SR



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Pemerintah Daerah						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Lap	41.920.000	2 Lap	10.675.908	25,47	SR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Pkt	25.000.000	0 Pkt	17.962.767	71,85	ST
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	80	4.256.883.700	0	-	0,00	SR
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah	80 Klmp	4.256.883.700	- Klmp	-	0,00	SR
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	15	60.697.740	0	-	0,00	SR
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	15 Klmp	60.697.740	0 Klmp	-	0,00	SR
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2	213.022.100	0	170.216.000	79,91	ST
Penyediaan dan Peyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Keg	213.022.100	- Keg	170.216.000	79,91	ST
TOTAL	150	8.553.512.663	6	2.235.344.602	26,13	R
IRC					32,81	R

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

2. Urusan Pariwisata

**Tabel 2.27 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Pariwisata
Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Pariwisata)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan I		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	86	2.475.909.087	53	1.038.063.712	41,93	T
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	11.000.000	3 Dok	11.000.000	100,00	ST
Administrasi Keuangan	24	2.113.311.087	14	846.584.312	40,06	T

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan I		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Perangkat Daerah	Bln		Bln			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Pkt	7.000.000	1	7.000.000	100,00	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	17	172.300.000	9	61.940.000	35,95	S
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 Unit	77.700.000	16 Unit	77.700.000	100,00	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24	74.598.000	9 Bln	26.558.200	35,60	S
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	20.000.000	1 Unit	7.281.200	36,41	S
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1	70.402.000	1	46.902.000	66,62	ST
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	70.402.000	1	46.902.000	66,62	ST
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	50 Org	200.000.700	50 Org	200.000.700	100,00	ST
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	50 Org	200.000.700	50 Org	200.000.700	100,00	ST
TOTAL	137	2.746.311.787	104	1.284.966.412	46,79	T
IRC					69,52	ST

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

3. Urusan Pertanian

**Tabel 2.28 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Pertanian
Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Pertanian)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	37	4.360.777.357	22	2.436.328.168	55,87	ST

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	300.000.000	5 Lap	300.000.000	100,00	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bln	3.744.533.357	6 Bln	1.853.418.168	49,50	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Keg	205.244.000	4 Keg	205.244.000	100,00	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bln	41.000.000	3 Bln	7.666.000	18,70	SR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	70.000.000	4 Unit	70.000.000	100,00	ST
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	17 Pkt	4.614.756.000	11 Pkt	1.977.017.500	42,84	T
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	13 Pkt	4.051.756.000	10 Pkt	1.929.017.500	47,61	ST
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	4 Pkt	563.000.000	1 Pkt	48.000.000	8,53	SR
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	45 Pkt	2.597.606.000	15 Pkt	447.300.000	17,22	SR
Pengembangan Prasarana Pertanian	23 Pkt	1.953.500.000	15 Pkt	447.300.000	22,90	SR
Pembangunan Prasarana Pertanian	22 Pkt	644.106.000	0 Pkt	0	0,00	SR
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3 Pkt	186.000.000	0 Pkt	0	0,00	SR
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3 Pkt	186.000.000	0 Pkt	0	0,00	SR
TOTAL	102	11.759.139.357		4.860.645.668	41,34	T
IRC					28,98	R

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

4. Urusan Perdagangan

**Tabel 2.29 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Perdagangan
Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan I		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2 Dok	14.600.000	1 Dok	6.650.000,00	45,55	T
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	2 Dok	14.600.000	1 Dok	6.650.000	45,55	T
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	6 Lap	155.000.000	3 Lap	128.421.604	82,85	ST
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	6 Lap	155.000.000	3 Lap	128.421.604	82,85	ST
TOTAL	8	169.600.000,00	4	135.071.604,00	79,64	ST
IRC					64,20	ST

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

5. Urusan Perindustrian

**Tabel 2.30 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Perindustrian
Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN PERINDUSTRIAN						
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7 Dok	1.976.412.000	6 Dok	590.049.300	29,85	R
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	7 Dok	1.976.412.000	6 Dok	590.049.300	29,85	R
TOTAL	7	1.976.412.000	6	590.049.300	29,85	R
IRC					29,85	R

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

6. Urusan Transmigrasi

**Tabel 2.31 Hasil Evaluasi Capaian Program Urusan Transmigrasi
Triwulan II Tahun 2025 (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2 kawasan transmigrasi	50.000.000	1 Keg	30.180.000	60,36	ST
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	2 kawasan transmigrasi	50.000.000	1 Keg	30.180.000	60,36	ST
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	700 KK	396.844.510	1 Keg	288.116.360	72,60	ST
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	700 KK	396.844.510	1 Keg	288.116.360	72,60	ST
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2974	528.426.000	1 Keg	41.330.000	7,82	SR
Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	2974	528.426.000	- Keg	41.330.000	7,82	SR
TOTAL	3676	975.270.510	3	359.626.360	36,87	S
IRC					46,93	T

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

**Tabel 2.32 Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Pendukung
Triwulan II Tahun 2025 (Sekretariat Daerah)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.480	65.477.586.028	3.138	13.541.739.498	20,68	SR
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bln	1.695.000.000	6 Bln	752.728.000	44,41	T



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bln	49.034.685.440	6 Bln	6.099.449.150	12,44	SR
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30 Org	500.000.000	0	0	0,00	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	300	5.985.000.000	78	3.853.690.980	64,39	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15012	900.000.000	3.000	241.532.690	26,84	R
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54	2.319.939.450	12	651.747.450	28,09	R
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Bln	767.961.138	18 Bln	395.160.228	51,46	ST
Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	36 Bln	4.275.000.000	18 Bln	1.547.431.000	36,20	S
TOTAL	15.480	65.477.586.028	3.138	13.541.739.498	20,68	SR
IRC					20,68	SR

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48 Unit	9.919.861.800	11 Unit	1.547.043.630	15,60	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	24 Pkt	3.989.600.000	8 Pkt	1.377.780.300	34,53	S
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13 Pkt	2.073.812.500	0 Pkt	0	0,00	SR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Unit	3.856.449.300	3 Unit	169.263.330	4,39	SR
TOTAL	48	9.919.861.800	11	1.547.043.630	15,60	SR
IRC					15,60	SR

BAGIAN KESRA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2	20.455.200	0	500.000	2,44	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Pkt	20.455.200	0 Pkt	500.000	2,44	SR
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	21	12.280.640.000	3	8.784.700.000	71,53	ST
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	21 Dok	12.280.640.000	3 Dok	8.784.700.000	71,53	ST
TOTAL	23	12.301.095.200	3	8.785.200.000	71,42	ST



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
IRC					36,99	S
BAGIAN ORGANISASI						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31 Dok	358.363.800	15 Dok	143.467.936	40,03	T
Penataan Organisasi	31 Dok	358.363.800	15 Dok	143.467.936	40,03	T
TOTAL	31	358.363.800	15	143.467.936	40,03	T
IRC					40,03	T
BAGIAN HUKUM						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Keg	175.000.000	100 Org	175.000.000	100,00	ST
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Org	175.000.000	100 Org	175.000.000	100,00	ST
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3 Keg	275.000.000	1 Keg	72.900.000	26,51	R
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Keg	275.000.000	1 Dok	72.900.000	26,51	R
TOTAL	103	450.000.000	101	247.900.000	55,09	ST
IRC					63,25	ST
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10	750.000.000	0	490.798.480	65,44	ST
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	58.797.800	0 Dok	56.119.000	95,44	ST
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Pkt	85.068.800	0 Keg	-	0,00	SR
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Lap	606.133.400	0 Lap	434.679.480	71,71	ST
TOTAL	10	750.000.000	0	490.798.480	65,44	ST
IRC					65,44	ST
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2 Keg	349.998.700	1 Keg	107.006.460	30,57	R
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	2 Keg	349.998.700	1 Keg	107.006.460	30,57	R
TOTAL	2 Keg	349.998.700	1 Keg	107.006.460	30,57	R

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
IRC					30,57	R
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2 Keg	140.000.000	0 Keg	-	0,00	SR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Keg	140.000.000	0 Keg	-	0,00	SR
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2	515.000.000	1 Keg	293.878.000	57,06	SR
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Keg	515.000.000	1 Keg	293.878.000	57,06	SR
TOTAL	4	655.000.000	1	293.878.000	44,87	T
IRC					28,53	R
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN						
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	27 Dok	599.998.270	0 Dok	423.888.500	70,65	ST
Administrasi Tata Pemerintahan	27 Dok	599.998.270	0 Dok	423.888.500	70,65	ST
TOTAL	27	599.998.270	20	423.888.500	70,65	ST
IRC					70,65	ST
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA						
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4 Keg	549.998.500	2	345.585.000	62,83	ST
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	2 Keg	250.948.500	1 Keg	195.585.000	77,94	ST
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	2 Keg	299.050.000	1 Keg	150.000.000	50,16	ST
TOTAL	4	549.998.500	2	345.585.000	62,83	ST
IRC					62,83	ST
TOTAL OPD	15732	91.411.902.298	3292	25.926.507.504	28,36	R
IRC					43,46	T

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) program. Hasil evaluasi capaian program menunjukkan bahwa sampai dengan

triwulan kedua, Indeks Rerata Capaian (IRC) berada pada kategori Sangat Tinggi (ST) dengan nilai IRC sebesar 64,27. Hasil evaluasi capaian program pada Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan kedua disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.33 Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Pendukung
Triwulan II Tahun 2025 (Sekretariat DPRD)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
UNSUR PENDUKUNG						
URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	146	25.159.206.653	72	8.607.095.934	34,21	S
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000	100,00	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35 Org	2.361.157.927	35 Org	1.312.116.718	55,57	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Pkt	2.152.743.504	1 Pkt	689.217.800	32,02	R
Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Pkt	2.741.101.452	0 Pkt	-	0,00	SR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bln	1.454.893.334	6 Bln	459.123.421	31,56	R
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	775.064.032	0 Unit	-	0,00	SR
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	79 Org	14.973.466.404	30 Org	6.126.637.995	40,92	T
Layanan Administrasi DPRD	5 Keg	680.780.000	0 Keg	-	0,00	SR
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	489	9.998.328.278	6	5.233.321.400	52,34	ST
Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	1 Keg	241.143.278	0 Keg	5.200.000	2,16	SR
Pembahasan Kebijakan Anggaran	478 Org	33.250.000	0 Org	-	0,00	SR
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	1 Keg	349.500.000	1 Keg	204.925.000	58,63	ST
Peningkatan Kapasitas DPRD	3 Keg	1.282.848.000	1 Keg	162.000.000	12,63	SR
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2 Keg	3.029.775.000	1 Keg	1.454.225.000	48,00	ST
Fasilitasi Tugas DPRD	5	5.061.812.000	3	3.406.971.400	67,31	ST

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
	Keg		Keg			
TOTAL	635	35.157.534.931	78	13.840.417.334	39,37	T
IRC					43,28	T

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

**Tabel 2.34 Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Penunjang
Triwulan II Tahun 2025 (Bappeda Litbang)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
PERENCANAAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	161	4.227.660.574	91	2.654.163.876	62,78	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Org	2.776.347.212	38 Org	1.640.236.331	59,08	ST
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dok	8.400.000	- Dok	-	0,00	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	31	1.006.528.442	29	783.752.942	77,87	ST
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Unit	165.315.320	20 Unit	82.470.000	49,89	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Lap	181.300.000	2 Lap	76.660.753	42,28	T
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	89.769.600	2 Unit	71.043.850	79,14	ST
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	174	1.667.775.758	95	612.168.780	36,71	S
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	78 Dok	1.233.953.340	60 Dok	283.229.980	22,95	SR
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	60 Buku	27.967.600	0 Buku	-	0,00	SR
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	35	360.418.568	35	328.938.800	91,27	ST
Implementasi Sistem Informasi	1 Lap	45.436.250	0	-	0,00	SR

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan daerah			Lap			
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4	178.758.600	0	-	0,00	SR
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Lap	67.950.000	0 Lap	-	0,00	SR
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Lap	55.200.000	0 Lap	-	0,00	SR
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Lap	55.608.600	0 Lap	-	0,00	SR
TOTAL	339	6.074.194.932	186	3.266.332.656	53,77	ST
IRC					33,16	R

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

2. Keuangan

**Tabel 2.35 Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Penunjang
Triwulan II Tahun 2025 (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
KEUANGAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	73	5.002.088.297	59	2.459.788.010	49,18	ST
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	30.000.000	Dok	0	0,00	SR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46 Org	3.474.492.677	46 Org	1.791.982.403	51,58	ST
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Keg	150.000.000	1 Keg	112.382.900	74,92	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bln	774.614.500	6 Bln	371.428.500	47,95	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bln	460.080.000	6 Bln	170.863.833	37,14	S
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Keg	112.901.120	0 Keg	13.130.374	11,63	SR
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	221.871.489.297	0	18.254.317.620	8,23	SR

Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Keg	881.361.000	0 Keg	130.358.920	14,79	SR
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Keg	472.445.000	0 Keg	119.229.100	25,24	SR
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Keg	440.750.000	0 Keg	158.780.000	36,02	S
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Keg	219.873.217.197	0 Keg	17.754.311.500	8,07	SR
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Keg	203.716.100	0 Keg	91.638.100	44,98	T
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1	422.250.420	0	97.909.030	23,19	SR
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Keg	422.250.420	0 Keg	97.909.030	23,19	SR
TOTAL	79	227.295.828.014	59	20.812.014.660	9,16	SR
IRC					22,44	SR

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

3. Pendapatan

Tabel 2.36 Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Pengelolaan Pendapatan Triwulan II Tahun 2025 (Badan Pendapatan Daerah)

Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
2		3		4	5	6
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
PENDAPATAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	111	3,558,230,035	26	1,482,733,039	41.67	T
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	25,987,200	0 Dok	0	0.00	SR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Org	1,763,464,595	26 Org	967,383,973	54.86	ST
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14	101,735,840	0	181,265,066	178.17	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	16	686,168,300	0	97,908,080	14.27	SR

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
2		3		4	5	6
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	26 Unit	174,112,500	0 Unit	-	0.00	SR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 Lap	764,880,000	0 Lap	236,175,920	30.88	R
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	41,881,600	0 Unit	-	0.00	SR
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	434482	567,050,000	0	132,600,000	23.38	SR
Pengelolaan Pendapatan Daerah	434482	567,050,000	0	132,600,000	23.38	SR
TOTAL	434593	4,125,280,035	26	1,615,333,039	39.16	T
IRC					32.53	R

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

4. Kepegawaian

Tabel 2.37 Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Penunjang Kepegawaian Triwulan II Tahun 2025 (Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM)

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
KEPEGAWAIAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	108	3.438.560.691	67	1.935.955.796	56,30	ST
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	1.810.000	0 Dok	-	0,00	SR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45 Org/Bln	3.121.252.431	45 Org/Bln	1.859.259.432	59,57	ST
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21	132.138.400	0	-	0,00	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	14	74.170.000	10	48.984.120	66,04	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Lap	83.083.700	12 Lap	24.627.224	29,64	R
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	26.106.160	0 Unit	3.085.020	11,82	SR



Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	951	1.040.900.600	150	319.293.636	30,67	R
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	53	174.925.000	50	125.955.016	72,01	ST
Mutasi dan Promosi ASN	811 Dok	769.728.500	100 Dok	193.338.620	25,12	SR
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	87	96.247.100	0	-	0,00	SR
TOTAL	1059	4.479.461.291	217	2.255.249.432	50,35	ST
IRC					43,49	T

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

5. Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.38 Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Triwulan II Tahun 2025 (Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM)

Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
PELATIHAN						
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15 Org	400.905.000	0 Org	-	0,00	SR
Pengembangan Kompetensi Teknis	15 Org	400.905.000	0 Org	-	0,00	SR
TOTAL	30	400.905.000	0	-	0,00	SR
IRC					0,00	SR

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

6. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.39 Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Triwulan II Tahun 2025 (Bappeda Litbang)

Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
PROGRAM RISET DAN INOVASI	3	21.986.250	0	-	0,00	SR

Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
DAERAH	Lap		Lap			
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	3 Lap	21.986.250	0 Lap	-	0,00	SR
TOTAL	3	21.986.250	0	0	0,00	SR
IRC					0,00	SR

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, dimana pada Tahun 2025 melaksanakan 1 program. Sampai dengan triwulan kedua tahun 2025, Indeks Rerata Capaian (IRC) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan dengan capaian kategori Sangat Rendah (SR), ini ditunjukkan dengan nilai IRC sebesar 0,00%. Serapan anggaran yang sangat rendah ini dikarenakan bahwa program riset dan inovasi yang berada pada Bappeda Litbang sampai dengan Triwulan II Bulan Juni Tahun 2025 belum dilaksanakan.

2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Tabel 2.40 Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Pengawasan Triwulan II Tahun 2025 (Inspektorat Daerah)

Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
INSPEKTORAT DAERAH						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	143	4.588.644.831	82	2.389.980.021	52,08	ST
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	24 Bln	3.342.961.231	10	1.593.438.895	47,67	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	66 Bln	638.873.800	27 Bln	423.141.126	66,23	ST
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	40 Org	299.000.000	40 Org	299.000.000	100,00	ST



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Pkt	245.889.800	0 Pkt	51.400.000	20,90	SR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Lap	61.920.000	5 Lap	23.000.000	37,14	S
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1506	3.860.139.100	171	1.452.934.887	37,64	S
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1288	3.535.029.100	159	1.197.559.887	33,88	R
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	218	325.110.000	12	255.375.000	78,55	ST
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1	351.846.000	1	179.160.000	50,92	ST
Pendampingan dan Asistensi	1 Keg	351.846.000	1 Keg	179.160.000	50,92	ST
TOTAL	1649	8.800.629.931	253	4.022.074.908	45,70	T
IRC					44,86	T

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan di Kabupaten Seram Bagian Timur dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang pada tahun 2025 melaksanakan 3 program. Dari hasil evaluasi pada urusan pengawasan yang tersaji pada tabel diatas menunjukkan bahwa, Inspektorat Daerah telah melaksanakan program kegiatan sampai dengan triwulan kedua Tahun 2025 dengan serapan anggaran yang baik, ini dapat dilihat dari IRC yang dicapai dengan kategori Tinggi (T) yakni sebesar 44,86%.

2.3.7. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

**Tabel 2.41 Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Kewilayahan
Triwulan II Tahun 2025
(15 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
UNSUR KEWILAYAHAN						
KECAMATAN SERAM TIMUR						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31	1,098,358,126	31	808,460,046	73.61	ST
Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	11,657,664	1 Dok	11,657,664	100.00	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 Org	967,280,462	15 Org	677,382,382	70.03	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	14	111,650,000	14	111,650,000	100.00	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Lap	7,770,000	1 Lap	7,770,000	100.00	ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	350	28,409,000	350	28,409,000	100.00	SR
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	350	28,409,000	350	28,409,000	100.00	ST
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12	15,512,440	12	15,512,440	100.00	SR
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Lmba ga	15,512,440	12 Lmba ga	15,512,440	100.00	ST
TOTAL	393	1,142,279,566	393	852,381,486	74.62	ST
IRC					91.20	ST



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
KECAMATAN PULAU GOROM						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	42	1,359,798,466	31	683,387,232	50.26	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21 Org	1,219,195,466	21 Org	609,597,732	50.00	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	20	133,627,000	9	66,813,500	50.00	ST
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	6,976,000	1 Unit	6,976,000	100.00	ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	200	27,474,000	200	12,300,000	44.77	T
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	200 Org	27,474,000	200 Org	12,300,000	44.77	T
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	19,223,000	0	-	0.00	SR
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dok	19,223,000	0 Dok	-	0.00	SR
TOTAL	243	1,406,495,466	231	695,687,232	49.46	ST
IRC					31.68	R
KECAMATAN BULA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	42	2,386,952,997	38	1,158,917,000	48.55	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36 Org	2,306,954,497	36 Org	1,150,617,000	49.88	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	75,798,500	2	8,300,000	10.95	SR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Lap	4,200,000	0 Lap	-	0.00	SR
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2	9,999,980	0	-	0.00	SR



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2	9,999,980	0	-	0.00	SR
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	9,999,540	0	-	0.00	SR
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dok	9,999,540	0 Dok	-	0.00	SR
TOTAL	45	2,406,952,517	38	1,158,917,000	48.15	ST
IRC					16.18	SR
KECAMATAN KESUI WATUBELA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	22	691,416,375	19	403,999,993	58.43	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 Org	560,416,375	7 Org	324,399,993	57.89	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	14	125,000,000	11	73,600,000	58.88	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Pkt	6,000,000	1 Pkt	6,000,000	100.00	ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	200 Org	21,000,000	200 Org	21,000,000	100.00	ST
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	200 Org	21,000,000	200 Org	21,000,000	100.00	ST
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15 Lmba ga	48,000,000	15 Lmba ga	48,000,000	100.00	ST
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Lmba ga	48,000,000	15 Lmba ga	48,000,000	100.00	ST
TOTAL	237	760,416,375	234	472,999,993	62.20	ST
IRC					86.14	ST



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
KECAMATAN KILMURY						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	41	1,203,410,817	0	714,871,366	59.40	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 Org	1,055,860,817	0 Org	638,321,366	60.46	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	26	147,550,000	-	76,550,000	51.88	ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	300	27,018,880	0	27,018,880	100.00	ST
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	300	27,018,880	-	27,018,880	100.00	ST
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14 Org	13,766,820	-	13,766,820	100.00	ST
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14 Org	13,766,820	-	13,766,820	100.00	ST
TOTAL	355	1,244,196,517	0	755,657,066	60.73	ST
IRC					86.47	ST
KECAMATAN TUTUK TOLU						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	20	834,617,177	18	335,965,137	40.25	T
Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	16 Org	707,916,177	16 Org	261,865,137	36.99	S
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	84,701,000	1	56,000,000	66.11	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	42,000,000	1	18,100,000	43.10	T
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	18,000,000	1	18,000,000	100.00	ST
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	18,000,000	1	18,000,000	100.00	ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Org	10,834,000	100 Org	10,834,000	100.00	ST



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Org	10,834,000	100 Org	10,834,000	100.00	ST
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1 Dok	19,223,000	1 Dok	19,223,000	100.00	ST
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dok	19,223,000	1 Dok	19,223,000	100.00	ST
TOTAL	122	882,674,177	120	384,022,137	43.51	T
IRC					76.75	ST
KECAMATAN KIAN DARAT						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	36	446,994,260	11	109,219,120	24.43	SR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Org	315,061,085	6 Org	54,234,820	17.21	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 Lap	117,409,400	4 Lap	50,491,050	43.00	T
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Lap	12,144,625	1 Lap	4,493,250	37.00	S
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Lap	2,379,150	0 Lap	-	0.00	SR
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5	18,060,500	1	-	0.00	SR
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Lap	18,060,500	1 Lap	-	0.00	SR
TOTAL	41	465,054,760	12	109,219,120	23.49	SR
IRC					12.22	SR
KECAMATAN TELUK WARU						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	43	1,652,867,032	37	1,201,108,000	72.67	ST



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24 Org	1,570,176,032	24 Org	1,150,617,000	73.28	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	18	77,291,000	13	50,491,000	65.33	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Lap	5,400,000	- Lap	-	0.00	SR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11	8,200,000	0	-	0.00	SR
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11 Lemb aga	8,200,000	- Lemb aga	-	0.00	SR
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	9,108,690	100	9,108,690	100.00	ST
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Org	9,108,690	100 Org	9,108,690	100.00	ST
TOTAL	154	1,670,175,722	137	1,210,216,690	72.46	ST
IRC					57.56	ST
KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	23	896,282,619	13	282,395,137	31.51	R
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 Org	780,679,619	10 Org	261,865,137	33.54	R
Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Lap	108,003,000	2 Lap	18,000,000	16.67	SR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	7,600,000	1 Unit	2,530,000	33.29	R
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	15,174,000	100	15,174,000	100.00	ST
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Org	15,174,000	100 Org	15,174,000	100.00	ST



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	19,223,000	1	19,223,000	100.00	ST
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dok	19,223,000	1 Dok	19,223,000	100.00	ST
TOTAL	124	930,679,619	114	316,792,137	34.04	S
IRC					77.17	ST
KECAMATAN GOROM TIMUR						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	46	820,335,428	0	388,036,191	47.30	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 Org	688,129,338	0 Org	322,236,191	46.83	T
Administrasi Umum Perangkat Daerah	21	126,656,090	0	64,650,000	51.04	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Lap	5,550,000	0 Lap	1,150,000	20.72	SR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46	314,551,548	0	-	0.00	SR
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23 Lmbg	14,814,377	0 Lmbg	-	0.00	SR
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	23 Lmbg	299,737,171	0 Lmbg	-	0.00	SR
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	18,225,090	0	-	0.00	SR
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Org	18,225,090	0 Org	-	0.00	SR
TOTAL	192	1,153,112,066	0	388,036,191	33.65	T
IRC					15.77	SR
KECAMATAN BULA BARAT						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	64	1,520,689,866	29	698,417,822	45.93	T



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Org	1,324,824,936	20 Org	664,035,172	50.12	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	27	87,759,690	7	32,882,650	37.47	S
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	100,000,000	0 Unit	-	0.00	SR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Lap	8,105,240	2 Lap	1,500,000	18.51	SR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13 Lmbg	99,999,000	0 Lmbg	-	0.00	SR
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	13 Lmbg	99,999,000	0 Lmbg	-	0.00	SR
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	200 Org	20,017,420	0 Org	-	0.00	SR
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	200 Org	20,017,420	0 Org	-	0.00	SR
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	24,117,350	1	24,117,350	100.00	ST
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dok	24,117,350	1 Dok	24,117,350	100.00	ST
TOTAL	278	1,664,823,636	30	722,535,172	43.40	T
IRC					36.48	S
KECAMATAN TEOR						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	23	708,465,841	23	498,927,586	70.42	ST
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	11,100,000	1 Dok	11,100,000	100.00	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 Org	541,995,841	7 Org	332,896,586	61.42	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	14	153,001,000	14	152,606,000	99.74	ST



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Lap	2,369,000	1 Lap	2,325,000	98.14	ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	149,999,510	1	89,200,000	59.47	ST
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Lap	149,999,510	1 Lap	89,200,000	59.47	ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	150	8,111,900	150	8,111,900	100.00	ST
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	150 Org	8,111,900	150 Org	8,111,900	100.00	ST
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	4,368,000	1	4,368,000	100.00	ST
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	1 Dok	4,368,000	1 Dok	4,368,000	100.00	ST
TOTAL	175	870,945,251	175	600,607,486	68.96	ST
IRC					90.14	ST
KECAMATAN PULAU PANJANG						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	32	996,186,857	25	904,976,865	90.84	ST
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	10,552,992	1 Dok	-	0.00	SR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Org	808,313,104	12 Org	808,313,104	100.00	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	17	163,299,586	11	95,299,586	58.36	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Lap	1,364,175	1 Lap	1,364,175	100.00	ST
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	12,657,000	- Unit	-	0.00	SR



Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6 Lmbg	12,125,000	6 Lmbg	12,125,000	100.00	ST
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6 Lmbg	12,125,000	6 Lmbg	12,125,000	100.00	SR
TOTAL	38	1,008,311,857	31	917,101,865	90.95	ST
IRC					95.42	ST
KECAMATAN SIWALALAT						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	22	1,576,880,895	21	797,998,109	50.61	ST
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	11,657,664	1 Dok	11,657,664	100.00	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19 Org	1,403,205,567	19 Org	701,602,781	50.00	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Lap	156,707,664	1 Lap	84,182,664	53.72	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Lap	5,310,000	-	555,000	10.45	SR
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	200 Org	28,014,210	200 Org	28,014,210	100.00	ST
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	200 Org	28,014,210	200 Org	28,014,210	100.00	ST
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1 Dok	15,262,500	1 Dok	15,262,500	100.00	ST
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dok	15,262,500	1 Dok	15,262,500	100.00	ST
TOTAL		1,620,157,605		841,274,819	51.93	ST
IRC					83.54	ST

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
KECAMATAN WERINAMA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	24	185,422,100	18	72,644,000	39.18	T
Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Lap	179,932,100	6 Lap	68,069,000	37.83	S
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Lap	5,490,000	12 Lap	4,575,000	83.33	ST
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	14,342,000	1	14,342,000	100.00	ST
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dok	14,342,000	1 Dok	14,342,000	100.00	ST
TOTAL	25	199,764,100	19	86,986,000	43.54	T
IRC					69.59	ST
TOTAL KEWILAYAHAN		17,426,039,234		9,512,434,394	54.59	ST
IRC					61.75	ST

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

2.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur Pemerintahan Umum Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Timur, yang pada tahun 2025 melaksanakan 5 program. Sampai dengan triwulan kedua Bulan Juni, rata-rata program terealisasi dengan capaian kategori Sangat Tinggi (ST) ditunjukkan dengan nilai IRC sebesar 62,80. Hasil evaluasi capaian program Unsur Pemerintahan Umum Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan kedua Bulan Juni tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2.42 Hasil Evaluasi Capaian Program Unsur Pemerintahan Umum
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan II Tahun 2025
(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)**

Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20	380,000,000	14	233,076,600	61.34	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	14	142,762,000	10	94,772,600	66.39	ST
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Pkt	100,000,000	2 Pkt	100,000,000	100.0 0	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	93,238,000	2	33,618,000	36.06	S
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	44,000,000	0	4,686,000	10.65	SR
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1	1,100,000,000	0	149,750,000	13.61	SR
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1 Keg	950,000,000	0 Keg	-	0.00	SR
Pembentukan Paskibra	1 Keg	150,000,000	1 Keg	149,750,000	99.83	ST
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3 Keg	4,230,000,000	1 Keg	3,373,441,524	79.75	ST
Perumusan Kebijakan Tehnis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3 Keg	4,230,000,000	1 Keg	3,373,441,524	79.75	ST
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1 Keg	685,000,000	1 Keg	605,000,000	88.32	ST
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	1 Keg	685,000,000	1 Keg	605,000,000	88.32	ST



Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi s/d Triwulan II		ICP	Kategori
	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Pengawasan Organisasi Masyarakat						
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2 Keg	250,000,000	1 Keg	177,500,000	71.00	ST
Perumusan Kebijakan Tehnis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	2 Keg	250,000,000	1 Keg	177,500,000	71.00	ST
TOTAL	27	6,645,000,000	17	4,538,768,124	68.30	ST
IRC					62.80	ST

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa hasil evaluasi dari unsur pemerintahan umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan II telah melaksanakan program dan kegiatan dengan serapan anggaran yang sangat baik, ini dapat dilihat dari IRC yang dicapai dengan kategori Sangat Tinggi (ST) yakni sebesar 62,80%.

Tabel 2.43 Rekapitulasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Triwulan II Tahun 2025

No	Urusan	Realisasi Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Kinerja %	Realisasi Tahun 2025	
I	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	42,89	108.449.694.364,00	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
2	Kesehatan	49,84	44.483.268.997,00	Dinas Kesehatan
		26,05	8.894.180.543,00	RSUD Bula
		28,65	2.135.756.632,05	RSUD Goran Riun
3	Pekerjan Umum dan Penataan Ruang	41,51	19.398.613.574,12	Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang



No	Urusan	Realisasi Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Kinerja %	Realisasi Tahun 2025	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	29,09	1.176.803.466,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	47,18	2.666.690.252,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
		2,31	854.798.788,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		56,22	1.422.293.054,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Sosial	43,03	2.471.053.001,00	Dinas Sosial
III	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan dasar			
1	Tenaga Kerja	39,50	1.662.458.287,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Ketahanan Pangan	46,99	1.354.021.907,00	Dinas Ketahanan Pangan
3	Lingkungan Hidup	57,51	2.540.555.347,00	Dinas Lingkungan Hidup
4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	39,88	1.009.130.282,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32,76	1.336.625.802,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	38,72	2.732.265.772,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Perhubungan	50,26	2.205.456.514,00	Dinas Perhubungan
8	Komunikasi dan Informatika	38,17	531.757.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	55,13	2.657.751.827,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
10	Penanaman Modal	62,74	1.680.453.428,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
11	Pemuda dan Olahraga	0,64	20.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
12	Kebudayaan	66,18	220.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



No	Urusan	Realisasi Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Kinerja %	Realisasi Tahun 2025	
13	Perpustakaan	34,49	596.695.139,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14	Kearsipan	21,21	14.850.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	Urusan Pilihan			
1	Kelautan dan Perikanan	26,13	2235344602,00	Dinas Perikanan
2	Pariwisata	46,79	1284966412,00	Dinas Pariwisata
3	Pertanian	41,34	4860645668,00	Dinas Pertanian
4	Perdagangan	79,64	135071604,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
5	Perindustrian	29,85	590049300,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
6	Transmigrasi	36,87	359626360,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
IV	Unsur Pendukung			
1	Sekretariat Daerah	20,68	13541739498,00	Sekretariat Daerah
	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	70,65	423888500,00	Bagian Tata Pemerintahan dan Otda
	Bagian Hukum	55,09	247900000,00	Bagian Hukum
	Bagian Perekonomian dan SDA	62,83	345585000,00	Bagian Perekonomian dan SDA
	Bagian Administrasi Pembangunan	30,57	107006460,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	65,44	490798480,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Bagian Organisasi	40,03	143467936,00	Bagian Organisasi
	Bagian Umum dan Perlengkapan	15,60	1.547.043.630,00	Bagian Umum dan Perlengkapan
	Bagian Penggadaan Barang dan Jasa	44,87	293.878.000,00	Bagian Penggadaan Barang dan Jasa
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	71,42	8.785.200.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Sekretariat DPRD	39,37	13.840.417.334,00	Sekretariat DPRD
V	Unsur Pengawasan			
1	Pengawasan	45,70	4.022.074.908,00	Inspektorat Daerah



No	Urusan	Realisasi Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Kinerja %	Realisasi Tahun 2025	
VI	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Perencanaan	53,77	3.266.332.656,00	Bappeda Litbang
2	Keuangan	9,16	20.812.014.660,00	Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
3	Pendapatan	39,16	1.615.333.039,00	Badan Pendapatan Daerah
4	Kepegawaian	50,35	2.255.249.432,00	Badan Kepegawaian dan Pelatihan SDM
5	Pelatihan	0,00	-	Badan Kepegawaian dan Pelatihan SDM
6	Penelitian dan Pengembangan	0,00	-	Bappeda Litbang
VII	Unsur Kewilayahan			
1	Administrasi Pemerintahan	74,62	852.381.486,00	Kecamatan Seram Timur
2	Administrasi Pemerintahan	51,93	841.274.819,00	Kecamatan Siwalalat
3	Administrasi Pemerintahan	33,65	388.036.191,00	Kecamatan Gorom Timur
4	Administrasi Pemerintahan	60,73	755.657.066,00	Kecamatan Kilmuri
5	Administrasi Pemerintahan	49,46	695.687.232,00	Kecamatan P. Gorom
6	Administrasi Pemerintahan	90,95	917.101.865,00	Kecamatan P. Panjang
7	Administrasi Pemerintahan	48,15	1.158.917.000,00	Kecamatan Bula
8	Administrasi Pemerintahan	43,40	722.535.172,00	Kecamatan Bula Barat
9	Administrasi Pemerintahan	43,51	384.022.137,00	Kecamatan Tutuk Tolu
10	Administrasi Pemerintahan	23,49	109.219.120,00	Kecamatan Kian Darat
11	Administrasi Pemerintahan	34,04	316.792.137,00	Kecamatan Siritaun Wida Timur
12	Administrasi Pemerintahan	72,46	1.210.216.690,00	Kecamatan Teluk Waru
13	Administrasi Pemerintahan	43,54	86.986.000,00	Kecamatan Werinama
14	Administrasi Pemerintahan	62,20	472.999.993,00	Kecamatan Kesui Watubela



No	Urusan	Realisasi Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Kinerja %	Realisasi Tahun 2025	
15	Administrasi Pemerintahan	68,96	600.607.486,00	Kecamatan Teor
VII	Unsur Pemerintahan Umum			
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	68,30	4.538.768.124,00	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas

Sumber : Realisasi OPD triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi diolah

[illegible]

79 | Bab II

80 | Bab II

81 | Bab II

82 | Bab II

[illegible]



		Keptasan Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah				1,810,000		23,890,000		1,810,000							23,080,000	150.30%	80% SDM
		Sab Ekspansi Penguatan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pencapaian/Penganggaran Daerah	1		1,810,000	2	20,000,000	1	1,810,000					2		20,000,000	200%	100% SDP SDM
		Keptasan Administrasi dan Keuangan Pemerintah Daerah				3,021,252,430		2,892,740,340		3,021,252,430		1,040,852,700		1,040,852,700		1,040,852,700	4,503,945,030	150.21%	80% SDM
		Sab Ekspansi Penguatan Sistem Informasi Daerah	Jumlah Perangkat Komputer dan Jumlah Pengguna	10		3,021,252,430	10	2,892,740,340	10	3,021,252,430	4	1,040,852,700	8	1,040,852,700	4	1,040,852,700	4,503,945,030	150.21%	80% SDM
		Sab Ekspansi Koordinasi dan Pengawasan Laporan Kinerja Tahunan BPD	Jumlah Laporan Kinerja Tahunan BPD dan Laporan Kinerja Koordinasi Laporan Kinerja Tahun BPD	4		3,021,252,430			4	3,021,252,430								100%	80% SDM
		Keptasan Administrasi dan Keuangan Pemerintah Daerah				102,130,400		257,330,857		102,130,400				25,400,400		25,400,400	306,745,257	292.00%	80% SDM
		Sab Ekspansi Penguatan dan Penguatan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pencapaian/Penganggaran Administrasi Kecamatan	0			0	17,700,000							0		17,700,000		80% SDM
		Sab Ekspansi Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5		20,000,000	10	20,000,000	5	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	6	20,000,000	20,000,000	100%	80% SDM
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai/Instansi Tegak Berkeadilan	Jumlah Pegawai Dilatihkan dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0		10,000,000			0	10,000,000								100%	80% SDM
		Keptasan Administrasi dan Keuangan Pemerintah Daerah				74,170,000		85,227,719		74,170,000		16,100,000		16,100,000		16,100,000	90,327,719	100.30%	80% SDM
		Sab Ekspansi Penguatan Sistem Informasi Daerah	Jumlah Penguatan Sistem Informasi Daerah	1		74,170,000	1	85,227,719	1	74,170,000		16,100,000	1	16,100,000	2	16,100,000	90,327,719	200%	100% SDM



		Kegiatan Administrasi Rencana Pembangunan Daerah				74.010.000		95.252.710		74.170.000		44.442.000		44.100.000		44.300.000		110.210.000		110.900		80PSDM
		Sub Kegiatan Pengadaan Jalan Logistik Faktor	Jumlah/Unit Dalam Logistik Kantor yang Dibutuhkan	1		7.000.000	1	9.200.000	1	1.000.000		1.750.000	1	1.250.000	1	1.250.000	2	9.350.000	20%	27.240		80PSDM
		Sub Kegiatan Pengadaan Barang/Cetak dan Pengiriman	Jumlah/Unit Barang Cetak/Barang Pengiriman yang Dibutuhkan	1		7.000.000	1	9.200.000	1	1.000.000		1.750.000		1.250.000	1	1.250.000	1	9.350.000	0%	0.000		80PSDM
		Sub Kegiatan Pengembangan Riset (Layanan dan Fasilitas Riset)	Jumlah/Layanan Pengembangan Riset Konsultasi Konsultasi R&D	2		40.000.000	8	48.200.000	12	40.000.000	2	37.000.000	2	37.000.000	1	37.000.000	8	48.200.000	5%	12.380		80PSDM
		Kegiatan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Binaan Pemerintah Daerah				81.800.000		81.800.740		81.800.000		10.627.220		10.300.000		10.300.000		100.000.000		100.400		80PSDM
		Sub Kegiatan Pengadaan Jasa Pemeliharaan	Jumlah/Layanan Pengembangan Jasa Pemeliharaan	1		1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000							1	1.000.000	0%	0.000		80PSDM
		Sub Kegiatan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Samping Dapur dan Lantai	Jumlah/Layanan Pengembangan Jasa Pemeliharaan Samping Dapur dan Lantai yang Dibutuhkan	12		90.000.000	12	108.000.000	12	90.000.000	4	36.000.000	6	24.000.000	4	24.000.000	8	108.000.000	0%	0.000		80PSDM
		Sub Kegiatan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Samping Dapur	Jumlah/Layanan Pengembangan Jasa Pemeliharaan Samping Dapur yang Dibutuhkan	12		3.200.000	12	38.400.000	12	3.200.000	4	12.800.000	5	16.000.000	5	16.000.000	10	38.400.000	0%	0.000		80PSDM
		Kegiatan Pemeliharaan Dalam Membuat Pembangunan Bina Pemerintah Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		40.000.000	0%	0.000		80PSDM
		Sub Kegiatan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Samping Dapur dan Lantai	Jumlah/Layanan Pengembangan Jasa Pemeliharaan Samping Dapur dan Lantai yang Dibutuhkan	1		21.000.000	1	25.200.000	1	21.000.000		3.000.000		3.000.000	1	3.000.000	1	25.200.000	0%	0.000		80PSDM
		Pembangunan Fasilitas Samping Dapur dan Lantai	Jumlah/Layanan Pengembangan Fasilitas Samping Dapur dan Lantai yang Dibutuhkan	1		2.000.000	1	2.400.000	1	2.000.000							1	2.400.000	0%	0.000		80PSDM
		PROGRAM KEPERAWATAN DAFTAR				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	8	1.220.000.000		10.000		80PSDM
		Kegiatan Pengadaan Pembangunan dan Pemeliharaan Keperawatan RSD				14.000.000		14.000.000		14.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000	8	140.000.000		100.000		80PSDM

[illegible]

[illegible]

89 | Bab II

[illegible]

[illegible]



		Pusat/Pusat Kendaraan Kantor	Jenis Fasilitas/Pusat dan Fasilitas yang dibangun	4	Pulu	20000,00			4	Pulu	80000,00	8	Pulu	-	1	Pulu	160000,00	4	Pulu	160000,00	1		1	BAPPDA	
		Pusat/Pusat Kendaraan Kantor	Jenis Fasilitas/Pusat dan Fasilitas yang dibangun	10	Pulu	20000,00	1	Pulu	80000,00	1	Pulu	80000,00	1	Pulu	120000,00	1	Pulu	160000,00	2	Pulu	160000,00	2		1	BAPPDA
		Pusat/Pusat Kendaraan Kantor	Jenis Fasilitas/Pusat dan Fasilitas yang dibangun	10	Pulu	20000,00	1	Pulu	80000,00	10	Pulu	80000,00	10	Pulu	120000,00	1	Pulu	160000,00	10	Pulu	160000,00	10		1	BAPPDA
		Pusat/Pusat Kendaraan Kantor	Jenis Fasilitas/Pusat dan Fasilitas yang dibangun	1	Lapang	20000,00	10	Lapang	80000,00	1	Lapang	80000,00	1	Lapang	120000,00	1	Lapang	160000,00	10	Pulu	160000,00	10		1	BAPPDA
		Pusat/Pusat Kendaraan Kantor	Jenis Fasilitas/Pusat dan Fasilitas yang dibangun	10	Lapang	20000,00	100	Lapang	80000,00	10	Lapang	80000,00	10	Lapang	120000,00	10	Lapang	160000,00	100	Pulu	160000,00	100		1	BAPPDA
		Pusat/Pusat Kendaraan Kantor	Jenis Fasilitas/Pusat dan Fasilitas yang dibangun	25		100,000,000	15		40,000,000	25		100,000,000	25		40,000,000	25		100,000,000	40		100,000,000	40		0,00	BAPPDA
		Pusat/Pusat Kendaraan Kantor	Jenis Fasilitas/Pusat dan Fasilitas yang dibangun	10	Pulu	20000,00	1	Pulu	80000,00	10	Pulu	80000,00	10	Pulu	120000,00	1	Pulu	160000,00	10	Pulu	160000,00	10		0,00	BAPPDA
		Pusat/Pusat Kendaraan Kantor	Jenis Fasilitas/Pusat dan Fasilitas yang dibangun	10	Pulu	20000,00	1	Pulu	80000,00	10	Pulu	80000,00	10	Pulu	120000,00	1	Pulu	160000,00	10	Pulu	160000,00	10		100	BAPPDA
		Pusat/Pusat Kendaraan Kantor	Jenis Fasilitas/Pusat dan Fasilitas yang dibangun	2		100,000,000	24		100,000,000	2		100,000,000	2		100,000,000	2		100,000,000	24		100,000,000	24		100	BAPPDA
		Pusat/Pusat Kendaraan Kantor	Jenis Fasilitas/Pusat dan Fasilitas yang dibangun	1	Lapang	20000,00	10	Lapang	80000,00	1	Lapang	80000,00	1	Lapang	120000,00	1	Lapang	160000,00	10	Lapang	160000,00	10		100	BAPPDA
		Pusat/Pusat Kendaraan Kantor	Jenis Fasilitas/Pusat dan Fasilitas yang dibangun	1	Lapang	20000,00	10	Lapang	80000,00	1	Lapang	80000,00	1	Lapang	120000,00	1	Lapang	160000,00	10	Lapang	160000,00	10		2,00	BAPPDA
		Pusat/Pusat Kendaraan Kantor	Jenis Fasilitas/Pusat dan Fasilitas yang dibangun	2		100,000,000	2		100,000,000	2		100,000,000	2		100,000,000	2		100,000,000	4		100,000,000	4		100	BAPPDA
		Pusat/Pusat Kendaraan Kantor	Jenis Fasilitas/Pusat dan Fasilitas yang dibangun	1	Pulu	20000,00	1	Pulu	80000,00	1	Pulu	80000,00	1	Pulu	120000,00	1	Pulu	160000,00	2	Pulu	160000,00	2		1,00	BAPPDA
		Pusat/Pusat Kendaraan Kantor	Jenis Fasilitas/Pusat dan Fasilitas yang dibangun	1	Pulu	20000,00	1	Pulu	80000,00	1	Pulu	80000,00	1	Pulu	120000,00	1	Pulu	160000,00	2	Pulu	160000,00	2		0,00	BAPPDA
		Pusat/Pusat Kendaraan Kantor	Jenis Fasilitas/Pusat dan Fasilitas yang dibangun	10		2,000,000,000	10		2,000,000,000	10		2,000,000,000	10		2,000,000,000	10		2,000,000,000	10		2,000,000,000	10		100	BAPPDA

96 | Bab II

[illegible]

[illegible]



Belimpai Masyarakat, dan PMD Seram	Lulus Pembinaan Serd (G)	Lulus 11 yang akan diangkat	100%	1.101.000.000	700	terang	101.499.400	100%	1.101.000.000	80%	881.000.000	80%	707.000.000	1.111.499.400	101.099.410	Sesuai
Belimpai Masyarakat, dan PMD Seram	Penggiatan Kedisiplinan dan Pelayanan RST	Lulus 12 yang akan diangkat														Sesuai
	Pengembangan Peta Sumber Daya Manusia Serd (G)	Pengembangan Peta Sumber Daya Manusia Serd (G)		1.599.000.000			599.499.400		1.599.000.000		411.000.000			1.411.499.400	200.099.100	Sesuai
Pekerja Seram	Penggiatan Kedisiplinan Pekerja Seram Gubernur Seram Gubernur Seram Gubernur Seram	Lulus 12 yang akan diangkat														Sesuai
Pekerja Seram	Penggiatan Kedisiplinan Pekerja Seram Masyarakat Seram Gubernur Seram	Lulus 12 yang akan diangkat														Sesuai
Pekerja Seram	Penggiatan Kedisiplinan Pekerja Seram Masyarakat Seram Gubernur Seram	Lulus 12 yang akan diangkat	100%	1.100.000.000	200	terang	109.499.400	100%	1.100.000.000	10%	411.000.000	10%	1.000.000.000	1.411.499.400	200.099.100	Sesuai
Pekerja Seram	Penggiatan Kedisiplinan Pekerja Seram Gubernur Seram Gubernur Seram Gubernur Seram	Lulus 12 yang akan diangkat														Sesuai
	Penggiatan Kedisiplinan Pekerja Seram Gubernur Seram Gubernur Seram Gubernur Seram	Lulus 12 yang akan diangkat		148.400.000			125.499.400		148.400.000				148.400.000	174.299.400	254.099.100	Sesuai
	Penggiatan Kedisiplinan Pekerja Seram Gubernur Seram Gubernur Seram Gubernur Seram	Lulus 12 yang akan diangkat		108.400.000			82.499.400		108.400.000				108.400.000	174.299.400	254.099.100	Sesuai
Belimpai Masyarakat, dan PMD Seram	Penggiatan Kedisiplinan Pekerja Seram Gubernur Seram Gubernur Seram Gubernur Seram	Lulus 12 yang akan diangkat	100%	67.700.000	4.000	terang	109.499.400	100%	67.700.000	100%		100%	67.700.000	109.499.400	20.700.000	Sesuai
Belimpai Masyarakat, dan PMD Seram	Penggiatan Kedisiplinan Pekerja Seram Gubernur Seram Gubernur Seram Gubernur Seram	Lulus 12 yang akan diangkat	100%	80.700.000				100%	80.700.000	100%		100%	80.700.000	80.700.000	10.700.000	Sesuai

[illegible]

[illegible]

[illegible]

103 | Bab II

104 | Bab II

[illegible]

[illegible]

[illegible]

108 | Bab II

109 | Bab II

[illegible]



		Profil Kegiatan Program dan Sub-Program		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173		2174		2175		2176		2177		2178		2179		2180		2181		2182		2183		2184		2185		2186		2187		2188		2189		2190		2191		2192		2193		2194		2195		2196		2197		2198		2199		2200		2201		2202		2203		2204		2205		2206		2207		2208		2209		2210		2211		2212		2213		2214		2215		2216		2217		2218		2219		2220		2221		2222		2223		2224		2225		2226		2227		2228		2229		2230		2231		2232		2233		2234		2235		2236		2237		2238		2239		2240		2241		2242		2243		2244		2245		2246		2247		2248		2249		2250		2251		2252		2253		2254		2255		2256		2257		2258		2259		2260		2261		2262		2263		2264		2265		2266		2267		2268		2269		2270		2271		2272		2273		2274		2275		2276		2277		2278		2279		2280		2281		2282		2283		2284		2285		2286		2287		2288		2289		2290		2291		2292		2293		2294		2295		2296		2297		2298		2299		2300		2301		2302		2303		2304		2305		2306		2307		2308		2309		2310		2311		2312		2313		2314		2315		2316		2317		2318		2319		2320		2321		2322		2323		2324		2325		2326	
--	--	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

112 | Bab II

113 | Bab II

[illegible]

[illegible]

116 | Bab II

119 | Bab II

120 | Bab II

121 | Bab II



		Pembangunan Pusat Perikanan	Pembangunan Pusat Perikanan			644,000,000		1,343,000,000			644,000,000						1,343,000,000			100	Pertanian
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Air Sungai Tani	Aktivitas Tani yang Dibantu, Rehabilitasi dan Dipelihara	100		434,000,000	00	1,045,000,000	00		434,000,000						1,045,000,000	00		100	Pertanian
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Petair Air	Aktivitas Petair yang Dibantu, Rehabilitasi dan Dipelihara	100		210,000,000	00		00		210,000,000							00	00	100	Pertanian
		PROGRAM PERTANIAN UMUM PERTANIAN	Pembangunan Fasilitas Umum Pertanian			-		104,000,000			-						104,000,000			100	Pertanian
		Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pertanian yang Dibantu, Rehabilitasi dan Pemeliharaan		0		-	0				-									0	Pertanian
		Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pertanian yang Dibantu, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Salah satu Fasilitas Pertanian yang Dibantu, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	100		-	00	20,000,000	00		-						20,000,000	00		100	Pertanian
		PROGRAM PERTANIAN PERTANIAN	Pembangunan Fasilitas Umum dan Salah satu Fasilitas Pertanian			104,000,000		303,400,000			104,000,000						303,400,000			100	Pertanian
		Pembangunan Fasilitas Pertanian	Pembangunan Fasilitas Pertanian	0		104,000,000	0	303,400,000			104,000,000						303,400,000			100	Pertanian
		Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pertanian yang Dibantu, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Aktivitas pertanian yang dibantu dan dipelihara yang dibantu	100		20,000,000	00	20,000,000	40		20,000,000						20,000,000	00		100	Pertanian
REKAPITULASI																					
		Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pertanian yang Dibantu, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pertanian yang Dibantu, Rehabilitasi dan Pemeliharaan																		Pertanian
		Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pertanian yang Dibantu, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pertanian yang Dibantu, Rehabilitasi dan Pemeliharaan																		Pertanian
		Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pertanian yang Dibantu, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pertanian yang Dibantu, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	4		600,000,000	0	1,211,000,000		4	600,000,000	0	1,211,000,000		4	600,000,000	0	1,211,000,000		100	Pertanian
		Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pertanian yang Dibantu, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pertanian yang Dibantu, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	4		600,000,000	0	1,211,000,000		4	600,000,000	0	1,211,000,000		4	600,000,000	0	1,211,000,000		100	Pertanian
		Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pertanian yang Dibantu, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pertanian yang Dibantu, Rehabilitasi dan Pemeliharaan																		Pertanian
		Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pertanian yang Dibantu, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pertanian yang Dibantu, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	12	100	2,044,735,000	0	2,044,735,000	0	100	2,044,735,000	0	2,044,735,000	0	100	2,044,735,000	0	2,044,735,000	0	100	Pertanian

[illegible]

124 | Bab II

[illegible]

126 | Bab II

[illegible]

128 | Bab II

131 | Bab II

[illegible]

		Program Antimeningitis Sektor Das An dan Sekt	Jarkin Laporan Penelitian Antimeningitis, Sektor Das An dan Sekt yg diketahui			41,382,251		2,000,000		2,000,000				3,802,251		3,802,251		3,802,251	00:00	3154	Pendukung	
		Exploitasi Fasilitas Banyu Mili, Dindik Pemerintah, Dinas Pemerintah dan Pemerintah dan				41,382,251		41,382,251		41,382,251							41,382,251		41,382,251	00:00	43	Pendukung
		Indikator Fasilitas Antimeningitis, Dinas Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt	Jarkin Laporan Penelitian Antimeningitis, Dinas Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt			41,382,251		41,382,251		41,382,251							41,382,251		41,382,251	00:00	413	Pendukung
		Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt	Jarkin Laporan Penelitian Antimeningitis, Dinas Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt																	00:00		Pendukung
		PROGRAM PENGEMBANGAN JALAN LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (SIA)	Jarkin Laporan Penelitian Antimeningitis, Dinas Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt			3,000,000		41,382,251		41,382,251				41,382,251		41,382,251		41,382,251	00:00	537	Pendukung	
		Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt												41,382,251		41,382,251		41,382,251	00:00	830000	Pendukung	
		Indikator Fasilitas Antimeningitis, Dinas Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt	Jarkin Laporan Penelitian Antimeningitis, Dinas Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt											41,382,251		41,382,251		41,382,251	00:00	830000	Pendukung	
		Program Fasilitas Antimeningitis, Dinas Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt				1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000				1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000	00:00	400	Pendukung	
		Program Fasilitas Antimeningitis, Dinas Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt	Jarkin Laporan Penelitian Antimeningitis, Dinas Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt Pemerintah dan Sekt			1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000				1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000	00:00	1500	Pendukung	
TOTAL PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN																						
		DAFTAR PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN				3,000,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000				1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000	00:00	322	DAFTAR PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN	
		DAFTAR PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN				3,000,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000				1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000	00:00	322	DAFTAR PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN	

135 | Bab II

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



	Kegiatan Pengabdian Jasa Pengabdian Masyarakat Desa						84.284.340	10	Des	82.888.890	10	Des		10	Des	4.395.450	10	Des	4.395.450		84.284.340		SLTTL248	OPUS KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP
	Pengabdian dan Pengabdian Jasa Pengabdian Desa	Aspek, peran, fungsi dan kegiatan di Desa Desa					142.000.000	12	Des	139.000.000	12	Des		12	Des					142.000.000		SLTTL249	OPUS KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP	
	Pengabdian dan Pengabdian Jasa Pengabdian Desa	Aspek, peran, fungsi dan kegiatan di Desa Desa					138.135.500	12	Des	135.000.000	12	Des		12	Des	4.135.500	12	Des	4.135.500		138.135.500		SLTTL250	OPUS KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP
	PROGRAM PENGABDIAN DESA							10	Des	498.888.890	10	Des		10	Des		10	Des						OPUS KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP
	Kegiatan Pengabdian Jasa Pengabdian Desa							10	Des	498.888.890	10	Des		10	Des		10	Des						OPUS KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP
	Kemampuan, Pengabdian, Pengabdian, dan Pengabdian Desa	Aspek, peran, fungsi dan kegiatan di Desa Desa						10	Des	498.888.890	10	Des		10	Des		10	Des						OPUS KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP
	PROGRAM ADMINISTRASI PENGABDIAN DESA						202.888.890	2	Des	198.888.890	2	Des		2	Des									OPUS KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP
	Kegiatan Pengabdian Jasa Pengabdian Desa						202.888.890	2	Des	198.888.890	2	Des		2	Des					202.888.890		SLTTL251	OPUS KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP	
	Pengabdian dan Pengabdian Jasa Pengabdian Desa	Aspek, peran, fungsi dan kegiatan di Desa Desa						2	Des	198.888.890	2	Des		2	Des					202.888.890		SLTTL252	OPUS KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP	
	PROGRAM ADMINISTRASI PENGABDIAN DESA						163.971.900	1	Des	160.888.890	1	Des		1	Des	3.083.010	1	Des	3.083.010		163.971.900		SLTTL253	OPUS KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP
	Kegiatan Pengabdian Jasa Pengabdian Desa						163.971.900	1	Des	160.888.890	1	Des		1	Des	3.083.010	1	Des	3.083.010		163.971.900		SLTTL254	OPUS KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP
	Pengabdian dan Pengabdian Jasa Pengabdian Desa	Aspek, peran, fungsi dan kegiatan di Desa Desa						1	Des	160.888.890	1	Des		1	Des	3.083.010	1	Des	3.083.010		163.971.900		SLTTL255	OPUS KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP
	PROGRAM ADMINISTRASI PENGABDIAN DESA						163.971.900	1	Des	160.888.890	1	Des		1	Des	3.083.010	1	Des	3.083.010		163.971.900		SLTTL256	OPUS KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP KOMISI DAUAP MAGYALAKAT, PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAUAP

[illegible]

[illegible]

[illegible]

148 | Bab II

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

154 | Bab II

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

161 | Bab II

[illegible]



		Penelitian dan Pengujian Sistem Cetak	Jumlah Paket Penelitian dan Pengujian Sistem Cetak yang dilakukan	Paket		30,000,000	RHS		30,000,000	1 Paket		30,000,000	RHS						30,000,000	RHS		80000	RLO SERAM PTUN	
		Penelitian dan Pengujian Sistem Cetak	Jumlah Paket Penelitian dan Pengujian Sistem Cetak yang dilakukan	Liputan		500,000	RHS		500,000	1 Paket		500,000	RHS		2,500,000	LHS		2,000,000	RHS		500,000	RHS	80000	RLO SERAM PTUN
2		Program Rancang Mata Cetak Peningkatan Kualitas				245,360,000			245,360,000			245,360,000			18,500,000			20,500,000			15,000,000		75	RLO SERAM PTUN
		Program Rancang Mata Cetak Peningkatan Kualitas	Jumlah Paket Penelitian dan Pengujian Sistem Cetak yang dilakukan	Liputan		500,000	RHS		500,000	1 Paket		500,000	RHS										80000	RLO SERAM PTUN
		Program Rancang Mata Cetak Peningkatan Kualitas	Jumlah Paket Penelitian dan Pengujian Sistem Cetak yang dilakukan	Paket		500,000	RHS		500,000	1 Paket		500,000	RHS		4,000,000	RHS		4,000,000	RHS		4,000,000	RHS	80000	RLO SERAM PTUN
		Program Rancang Mata Cetak Peningkatan Kualitas	Jumlah Paket Penelitian dan Pengujian Sistem Cetak yang dilakukan	Liputan		500,000	RHS		500,000	1 Paket		500,000	RHS		4,000,000	RHS		4,000,000	RHS		4,000,000	RHS	80000	RLO SERAM PTUN
		Program Rancang Mata Cetak Peningkatan Kualitas	Jumlah Paket Penelitian dan Pengujian Sistem Cetak yang dilakukan	Liputan		500,000	RHS		500,000	1 Paket		500,000	RHS		4,000,000	RHS		4,000,000	RHS		4,000,000	RHS	80000	RLO SERAM PTUN
4		Program Rancang Mata Cetak Peningkatan Kualitas																						
		Program Rancang Mata Cetak Peningkatan Kualitas	Jumlah Paket Penelitian dan Pengujian Sistem Cetak yang dilakukan	Liputan			RHS		700,000	1 Paket									700,000					RLO SERAM PTUN
Urutan Prioritas Rancang Kualitas (RLO SERAM)																								
		Program Rancang Mata Cetak Peningkatan Kualitas				4,310,000,000			4,310,000,000			4,310,000,000			30,000,000			30,000,000			2,000,000,000		41,000	
1		Program Rancang Mata Cetak Peningkatan Kualitas				20,000,000			20,000,000			20,000,000									20,000,000		14,000	
		Program Rancang Mata Cetak Peningkatan Kualitas	Jumlah Paket Penelitian dan Pengujian Sistem Cetak yang dilakukan	2 Paket		20,000,000	RHS		20,000,000	2 Paket		20,000,000	RHS										80000	
2		Program Rancang Mata Cetak Peningkatan Kualitas				20,000,000			20,000,000			20,000,000									20,000,000		80000	
		Program Rancang Mata Cetak Peningkatan Kualitas	Jumlah Paket Penelitian dan Pengujian Sistem Cetak yang dilakukan	1 Paket		20,000,000	RHS		20,000,000	1 Paket		20,000,000	RHS								20,000,000	RHS	80000	
3		Program Rancang Mata Cetak Peningkatan Kualitas				1,300,000,000			1,300,000,000			1,300,000,000			10,000,000			10,000,000			125,000,000		40,000	



2		Administrasi Umum Pengantar Umum			1,000,000,000		500,000,000		1,000,000,000					50,000,000		50,000,000		100,000,000		50,000,000
		Pengantar Umum Pengantar Umum	Adm. Paksi Gubernu Adm. Paksi Bupati Pengantar Umum Kantor yang ditetapkan	1 hari	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	4	10		500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000
		Pengantar Umum Pengantar Umum	Adm. Paksi Gubernu Adm. Paksi Bupati Pengantar Umum Kantor yang ditetapkan	1 hari	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	4	10		500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000
		Pengantar Umum Pengantar Umum	Adm. Paksi Gubernu Adm. Paksi Bupati Pengantar Umum Kantor yang ditetapkan	1 hari	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	4	10		500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000
		Pengantar Umum Pengantar Umum	Adm. Paksi Gubernu Adm. Paksi Bupati Pengantar Umum Kantor yang ditetapkan	2 hari	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	4	10		1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000
		Pengantar Umum Pengantar Umum	Adm. Paksi Gubernu Adm. Paksi Bupati Pengantar Umum Kantor yang ditetapkan	1 hari	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	4	10		500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000
		Pengantar Umum Pengantar Umum	Adm. Paksi Gubernu Adm. Paksi Bupati Pengantar Umum Kantor yang ditetapkan	1 hari	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	4	10		500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000
		Pengantar Umum Pengantar Umum	Adm. Paksi Gubernu Adm. Paksi Bupati Pengantar Umum Kantor yang ditetapkan	1 hari	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	4	10		500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000
		Pengantar Umum Pengantar Umum	Adm. Paksi Gubernu Adm. Paksi Bupati Pengantar Umum Kantor yang ditetapkan	1 hari	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	4	10		500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000
3		Pengantar Umum Pengantar Umum Pengantar Umum			1,200,000,000		40,000,000		1,200,000,000									40,000,000		
		Pengantar Umum Pengantar Umum Pengantar Umum	Adm. Paksi Gubernu Adm. Paksi Bupati Pengantar Umum Kantor yang ditetapkan	2 hari	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	4	10		1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000
		Pengantar Umum Pengantar Umum Pengantar Umum	Adm. Paksi Gubernu Adm. Paksi Bupati Pengantar Umum Kantor yang ditetapkan	1 hari	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	4	10		200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000
		Pengantar Umum Pengantar Umum Pengantar Umum	Adm. Paksi Gubernu Adm. Paksi Bupati Pengantar Umum Kantor yang ditetapkan	1 hari	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	4	10		200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000
4		Pengantar Umum Pengantar Umum Pengantar Umum			500,000,000		500,000,000		500,000,000					500,000,000		500,000,000		500,000,000		
		Pengantar Umum Pengantar Umum Pengantar Umum	Adm. Paksi Gubernu Adm. Paksi Bupati Pengantar Umum Kantor yang ditetapkan	1 hari	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	4	10		500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000
		Pengantar Umum Pengantar Umum Pengantar Umum	Adm. Paksi Gubernu Adm. Paksi Bupati Pengantar Umum Kantor yang ditetapkan	1 hari	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	4	10		500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000
		Pengantar Umum Pengantar Umum Pengantar Umum	Adm. Paksi Gubernu Adm. Paksi Bupati Pengantar Umum Kantor yang ditetapkan	1 hari	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	4	10		500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000

[illegible]



0		Pengadaan Layanan Kendaraan untuk UCR dan RUP Kabupaten Tegalrejo (Serta Bekaspetak/Bus)				38.040.000,000		38.040.000,000		38.040.000,000				8.333.000,000		8.333.000,000		36.443.400,000		133.140	
		Pengadaan/Operasi Kendaraan Angkutan	Jenis/Obat/Bus Pengadaan/Operasi Kendaraan Angkutan	4 Bekaspetak		30000000	10%	30000000	10%	30000000	10%			30000000	10%	30000000	10%	30000000	10%	30000000	10%
		Pengadaan/Operasi Kendaraan Angkutan	Jenis/Obat/Bus Pengadaan/Operasi Kendaraan Angkutan	5 Bekaspetak		112000000	10%	112000000	10%	112000000	10%			112000000	10%	112000000	10%	112000000	10%	112000000	10%
		Operasi/Operasi Rental Sisa	Jenis/Obat/Bus Operasi/Operasi Rental Sisa	100 Bekaspetak		150000000	10%	150000000	10%	150000000	10%			150000000	10%	150000000	10%	150000000	10%	150000000	10%
		Pengadaan/Operasi Kendaraan Angkutan	Jenis/Obat/Bus Pengadaan/Operasi Kendaraan Angkutan	2 Bekaspetak		50000000	10%	50000000	10%	50000000	10%			50000000	10%	50000000	10%	50000000	10%	50000000	10%
0		Pengadaan/Operasi Kendaraan Angkutan dan RUP Kabupaten Tegalrejo (Serta Bekaspetak/Bus)				200.000.000		200.000.000		200.000.000								200.000.000		111.140	
		Pengadaan/Operasi Kendaraan Angkutan dan RUP Kabupaten Tegalrejo (Serta Bekaspetak/Bus)	Jenis/Obat/Bus Pengadaan/Operasi Kendaraan Angkutan dan RUP Kabupaten Tegalrejo (Serta Bekaspetak/Bus)	1000		200000000	10%	200000000	10%	200000000	10%			200000000	10%	200000000	10%	200000000	10%	200000000	10%
		Pengadaan/Operasi Kendaraan Angkutan dan RUP Kabupaten Tegalrejo (Serta Bekaspetak/Bus)				300.000.000		300.000.000		300.000.000								300.000.000		20.000	
0		Pengadaan/Operasi Kendaraan Angkutan dan RUP Kabupaten Tegalrejo (Serta Bekaspetak/Bus)				100000000		100000000		100000000								100000000			
		Pengadaan/Operasi Kendaraan Angkutan dan RUP Kabupaten Tegalrejo (Serta Bekaspetak/Bus)	Jenis/Obat/Bus Pengadaan/Operasi Kendaraan Angkutan dan RUP Kabupaten Tegalrejo (Serta Bekaspetak/Bus)	1000		100000000	10%	100000000	10%	100000000	10%			100000000	10%	100000000	10%	100000000	10%	100000000	10%
		Pengadaan/Operasi Kendaraan Angkutan dan RUP Kabupaten Tegalrejo (Serta Bekaspetak/Bus)				300000000		300000000		300000000								300000000		15000	
Bekas Petak/Bus Bekaspetak (Serta Bekaspetak)																					
						112.000.000,000		112.000.000,000		112.000.000,000				45.000.000,000		45.000.000,000		112.000.000,000			
		Pengadaan/Operasi Kendaraan Angkutan dan RUP Kabupaten Tegalrejo (Serta Bekaspetak/Bus)	PROGRAM PENGADAAN KENDARAAN PENGADAAN KENDARAAN KENDARAAN			60.700.000,000		60.700.000,000		60.700.000,000				30.000.000,000		30.000.000,000		60.700.000,000		Bekaspetak	



		Pencapaian, Penyelesaian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				201,000,000		18,400,000		205,000,000			0			0		30,000,000			Exekutif
		Penyediaan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1	2024	22,000,000	100%	50,000,000	1	2024	22,000,000	100%	0	01		01		100%	10,000,000	101	101	Exekutif
		Administrasi Perangkat Daerah			18,000,000,000		15,000,000,000			18,000,000,000			30,000,000,000		30,000,000,000		100%	10,000,000,000			Exekutif
		Penyediaan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	02	2024	10,000,000	100%	5,000,000	02	2024	10,000,000	100%	0	02	10,000,000	02	10,000,000	100%	10,000,000	102	102	Exekutif
		Penyediaan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1	2024	10,000,000	100%	5,000,000	1	2024	10,000,000	100%	0	01		01		100%	10,000,000	101	101	Exekutif
		Penyediaan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1	2024	10,000,000	100%	5,000,000	1	2024	10,000,000	100%	0	01		01		100%	10,000,000	101	101	Exekutif
		Penyediaan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1	2024	10,000,000	100%	5,000,000	1	2024	10,000,000	100%	0	01		01		100%	10,000,000	101	101	Exekutif
		Penyediaan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1	2024	10,000,000	100%	5,000,000	1	2024	10,000,000	100%	0	01		01		100%	10,000,000	101	101	Exekutif
		Administrasi Perangkat Daerah			100,000,000		100,000,000			100,000,000			100,000,000		100,000,000		100%	100,000,000			Exekutif
		Penyediaan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1	2024	10,000,000	100%	5,000,000	1	2024	10,000,000	100%	0	01		01		100%	10,000,000	101	101	Exekutif
		Penyediaan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1	2024	10,000,000	100%	5,000,000	1	2024	10,000,000	100%	0	01		01		100%	10,000,000	101	101	Exekutif
		Administrasi Perangkat Daerah			100,000,000		100,000,000			100,000,000			100,000,000		100,000,000		100%	100,000,000			Exekutif
		Penyediaan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1	2024	10,000,000	100%	5,000,000	1	2024	10,000,000	100%	0	01		01		100%	10,000,000	101	101	Exekutif
		Administrasi Perangkat Daerah			100,000,000		100,000,000			100,000,000			100,000,000		100,000,000		100%	100,000,000			Exekutif
		Penyediaan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1	2024	10,000,000	100%	5,000,000	1	2024	10,000,000	100%	0	01		01		100%	10,000,000	101	101	Exekutif
		Administrasi Perangkat Daerah			100,000,000		100,000,000			100,000,000			100,000,000		100,000,000		100%	100,000,000			Exekutif
		Penyediaan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1	2024	10,000,000	100%	5,000,000	1	2024	10,000,000	100%	0	01		01		100%	10,000,000	101	101	Exekutif
		Administrasi Perangkat Daerah			100,000,000		100,000,000			100,000,000			100,000,000		100,000,000		100%	100,000,000			Exekutif
		Penyediaan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1	2024	10,000,000	100%	5,000,000	1	2024	10,000,000	100%	0	01		01		100%	10,000,000	101	101	Exekutif



		Proyeksi/Realisasi Kendaraan Bermotor 2024	Jenis/Lokasi Pengembangan Rasio Gedung dan Gedung 2024	1	Lupa	20000,00	100	20000,00	1	Lupa	20000000	10	0	10	91480,00	10	91480,00	100	91480,00	100	100	Ekstensi
		Proyeksi Rasio MKB Rasio Pengembangan Rasio				81.800,000		81.800,000														Ekstensi
		Proyeksi/Realisasi/Diri Operasi dan Operasi	Jenis/Lokasi Diri Operasi dan Operasi dan Operasi	2	Uji	1500,00	10	-	2	Uji	200000	10	0	0	-	10	-	10	-	10	0	Ekstensi
		Proyeksi Rasio Pengembangan Rasio Pengembangan Rasio						31.940,00							10.480,00	10.480,00		10.480,00				Ekstensi
		Proyeksi Rasio Kendaraan, Rasio Rasio Rasio Rasio	Jenis/Lokasi Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio	1	Lupa	10000,00	100	90.000,00	1	Lupa	10000000	10	0	10	90.000,00	100	90.000,00	100	90.000,00	100	100	Ekstensi
		Proyeksi Rasio Kendaraan Rasio	Jenis/Lokasi Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio	1	Lupa	10000,00	100	10000,00	1	Lupa	10000000	10	0	10	10000,00	100	10000,00	100	10000,00	100	100	Ekstensi
		Proyeksi Rasio Kendaraan Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio				10.480,000		10.480,000			10.480,000				9.000,000		9.000,000		9.000,000			Ekstensi
		Proyeksi Rasio Kendaraan Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio				9.000,000		9.000,000			9.000,000				9		9		9			Ekstensi
		Proyeksi Rasio Kendaraan Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio	Jenis/Lokasi Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio	1	Uji	10000,00	10	-	1	Uji	10000000	10	0	0	-	10	-	10	-	10	0	Ekstensi
		Proyeksi Rasio Kendaraan Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio	Jenis/Lokasi Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio	10	Uji	10000,00	10	-	1	Uji	10000000	10	0	0	-	10	-	10	-	10	0	Ekstensi
		Proyeksi Rasio Kendaraan Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio	Jenis/Lokasi Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio	4	Uji	10000,00	10	-	4	Uji	10000000	10	0	0	-	10	-	10	-	10	0	Ekstensi
		Proyeksi Rasio Kendaraan Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio	Jenis/Lokasi Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio	1000	Uji	10000,00	100	10000,00	10	1000	10000000	10	0	0	-	100	-	100	-	100	0	Ekstensi
		Proyeksi Rasio Kendaraan Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio				11.000,000		11.000,000			11.000,000				9.400,000		9.400,000		9.400,000			Ekstensi

169 | Bab II

[illegible]

[illegible]

172 | Bab II

[illegible]



DAFTAR URAIAN																					
Tersedia, maka pemerintah dapat menjamin, akan menjamin, dan menjamin	PROGRAM PERUMPAHAN PERUMPAHAN PERUMPAHAN			3,352,381,000		3,352,381,000		3,352,381,000						1,480,829,800		1,480,829,800		1,271,223,600		25	BAGIAN TIMUR
Musyawarah, maka pemerintah akan menjamin, akan menjamin, dan menjamin	ADMINISTRASI PERUMPAHAN PERUMPAHAN PERUMPAHAN			3,352,381,000		3,352,381,000		3,352,381,000						1,480,829,800		1,480,829,800		1,271,223,600		100	BAGIAN TIMUR
	Perumahan/Perumahan/Perumahan			224,000,000		224,000,000		224,000,000						120,000,000		120,000,000		100,000,000		100	BAGIAN TIMUR
	Perumahan/Perumahan/Perumahan			142,000,000		142,000,000		142,000,000						70,000,000		70,000,000		70,000,000		50	BAGIAN TIMUR
Musyawarah, maka pemerintah akan menjamin, akan menjamin, dan menjamin	PERUMPAHAN PERUMPAHAN PERUMPAHAN			2,903,081,000		2,903,081,000		2,903,081,000										1,480,829,800		90,41	BAGIAN TIMUR
	Perumahan/Perumahan/Perumahan					170,000,000		170,000,000										170,000,000		100	BAGIAN TIMUR
	Perumahan/Perumahan/Perumahan					100,000,000		100,000,000										100,000,000		100	BAGIAN TIMUR
	Perumahan/Perumahan/Perumahan			2,903,081,000		2,903,081,000		2,903,081,000												0	BAGIAN TIMUR
Musyawarah, maka pemerintah akan menjamin, akan menjamin, dan menjamin	PERUMPAHAN PERUMPAHAN PERUMPAHAN			3,352,381,000		3,352,381,000		3,352,381,000						3,352,381,000		3,352,381,000		3,352,381,000		5	BAGIAN TIMUR
	Perumahan/Perumahan/Perumahan			2,903,081,000		2,903,081,000		2,903,081,000						2,903,081,000		2,903,081,000		2,903,081,000		100	BAGIAN TIMUR
Bagian Utara																					
Gruping, maka pemerintah akan menjamin, akan menjamin, dan menjamin	Adik, maka pemerintah akan menjamin, akan menjamin, dan menjamin			100,000,000		100,000,000		100,000,000						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100	Bagian Utara
Perumahan/Perumahan/Perumahan	Perumahan/Perumahan/Perumahan			100,000,000		100,000,000		100,000,000						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100	Bagian Utara
Gruping, maka pemerintah akan menjamin, akan menjamin, dan menjamin	Adik, maka pemerintah akan menjamin, akan menjamin, dan menjamin			100,000,000		100,000,000		100,000,000						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100	Bagian Utara
Perumahan/Perumahan/Perumahan	Perumahan/Perumahan/Perumahan			100,000,000		100,000,000		100,000,000						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100	Bagian Utara
DAFTAR PEMERINTAH DAERAH CENTRAL																					
				3,352,381,000		3,352,381,000		3,352,381,000						3,352,381,000		3,352,381,000		3,352,381,000		41,000	
1	Gruping, maka pemerintah akan menjamin, akan menjamin, dan menjamin	Adik, maka pemerintah akan menjamin, akan menjamin, dan menjamin		100,000,000		100,000,000		100,000,000						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100	Bagian Utara
2	Adik, maka pemerintah akan menjamin, akan menjamin, dan menjamin	Adik, maka pemerintah akan menjamin, akan menjamin, dan menjamin		100,000,000		100,000,000		100,000,000						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100	Bagian Utara

[illegible]

[illegible]

[illegible]

178 | Bab II

[illegible]

180 | Bab II

[illegible]

[illegible]

183 | Bab II

[illegible]

185 | Bab II

186 | Bab II

187 | Bab II



	Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	Fürbinder Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	1	Ex	41,763,000	1	Ex	41,763,000	1	Ex	12,400,000	0	Ex	0	0	Ex	0	1	Ex	12,400,000	2	Ex	15,563,000	1,00	2,44	Ex, Green Time
	Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	Fürbinder Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	1	Ex	10,011,000	1	Ex	10,011,000	1	Ex	0	0	Ex	0	0	Ex	0	0	Ex	0	1	Ex	10,011,000	1,00	1,00	Ex, Green Time
	Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	Fürbinder Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	1	Ex	10,011,000	1	Ex	10,011,000	1	Ex	12,400,000	0	Ex	0	0	Ex	0	1	Ex	12,400,000	2	Ex	40,000,000	2,30	144	Ex, Green Time
	Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	Fürbinder Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition																								Ex, Green Time
	Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	Fürbinder Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	12	Ex	0	12	Ex	0	12	Ex	0	12	Ex	0	12	Ex	0	12	Ex	0	12	Ex	0	12	Ex	Ex, Green Time
	Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	Fürbinder Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	12	Ex	0	12	Ex	0	12	Ex	0	12	Ex	0	12	Ex	0	12	Ex	0	12	Ex	0	12	Ex	Ex, Green Time
	Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	Fürbinder Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition																								
	Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	Fürbinder Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition																								Ex, Blue Best
	Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	Fürbinder Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition																								Ex, Blue Best
Verfahren (2) der Tabelle A2	Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	Fürbinder Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition									0,000,000						0,000,000	0,000,000							Ex, Blue Best	
	Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	Fürbinder Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition																								Ex, Blue Best
Verfahren (2) der Tabelle A2	Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	Fürbinder Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition									1	Fürb	10,000,000			1	Fürb	10,000,000	400							Ex, Blue Best
Verfahren (2) der Tabelle A2	Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	Fürbinder Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition									1	Fürb	1,000,000			1	Fürb	1,000,000	0							Ex, Blue Best
Verfahren (2) der Tabelle A2	Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition	Fürbinder Projekte von Binnen-Passagieren (Binnen-Expedition) Binnen-Expedition											1,000,000			1	Fürb	1,000,000	0							Ex, Blue Best

[illegible]

[illegible]

[illegible]

192 | Bab II

193 | Bab II

[illegible]



2.4 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi hasil pelaksanaan P-RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, dilakukan untuk mengukur capaian target kegiatan dan sub kegiatan, dengan melihat tingkat kemajuan (progress) pencapaian target indikator keluaran (output) sampai dengan Bulan Juni 2025. Sebab, dengan waktu evaluasi kurang dari satu tahun, maka progress pencapaian kinerja relative hanya bisa diamati pada tingkat keluaran kegiatan.

1. **Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja**, antara lain :

- a. Keterlambatan lelang, sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagian besar Belanja Modal belum memulai proses pelelangan, sehingga realisasi fisik mengalami keterlambatan dan sekaligus mempengaruhi realisasi anggaran;
- b. Adanya keterlambatan OPD dalam memasukkan realisasi dan evaluasi;
- c. Adanya penyesuaian kegiatan beberapa sub kegiatan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan;

2. **Faktor Pendorong dalam pencapaian kinerja**, antara lain:

- a. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
- b. Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- c. Adanya penilaian kinerja OPD sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD.

Bab. III

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk Pembangunan daerah tahun 2025. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2025.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan

keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang

3.1. Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2025

Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan tetap solid, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dan inflasi yang terkendali. Proyeksi ini didukung oleh pertumbuhan spasial yang relatif baik, inflasi yang rendah, dan permintaan domestik yang kuat. Namun, ada juga tantangan seperti fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang perlu diwaspadai.

Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang masih kuat. Ekonomi global pada 2025 diproyeksikan tumbuh sebesar 3,2% dimana proyeksi ini di bawah rata-rata historis pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2000 – 2019 sebesar 3,7%. Perkembangan proyeksi ekonomi tersebut ditopang oleh kinerja ekonomi Amerika Serikat yang tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tetap baik ditopang oleh konsumsi yang kuat didukung akselerasi investasi dan peningkatan upah riil tenaga kerja di tengah kebijakan moneter yang tidak terlalu ketat serta arah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Sementara, pertumbuhan ekonomi Eropa masih lemah dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat serta kinerja eksternal yang menurun dampak dari implementasi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Ketegangan geopolitik yang membebani sentimen konsumen serta ketidakpastian politik dan kebijakan yang meningkat dapat menghambat perekonomian tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan melambat pada 2025 sebesar 4,0% disebabkan oleh perkembangan ekonomi Tiongkok yang masih lemah. Hal ini merupakan dampak dari ketidakpastian kebijakan perdagangan dan pasar property yang masih lemah. Namun demikian, stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah dapat menahan perlambatan yang lebih dalam.



Di tengah kondisi ekonomi global yang relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih banyak mengandalkan permintaan domestik. Pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan program bansos serta subsidi

Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk bernilai tambah yang berorientasi ekspor, serta memberikan insentif fiskal yang kompetitif. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dimaksimalkan untuk mencapai target pertumbuhan.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif, tetapi juga ada tantangan dari faktor-faktor eksternal.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah dan pelaku ekonomi merespon tantangan-tantangan tersebut. Pada Triwulan I 2025, ekonomi Indonesia diproyeksikan masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun dengan beberapa catatan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai maksimal sekitar 5%. Ini didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan inflasi yang terkendali. Namun, ada juga faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, seperti perlambatan ekspor sektor riil.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Maret 2025 sebesar 1,65 persen dan Tingkat inflasi year to date (y-to-d) Maret 2025 sebesar 0,39 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Maret 2025 sebesar 2,48 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,24 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 0,79 persen

Kebijakan Ekonomi tahun 2025 tetap diprioritaskan untuk menjaga stabilitas dan dalam memitigasi gejolak global, (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) Upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM, (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah, (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan, (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia. mendorong

pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Sinergi dilakukan dalam 7 (tujuh) area kebijakan, yakni (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah

Beberapa analisis kondisi perekonomian yang melatabelakangi kebijakan tahun 2025 antara lain adalah :

- 1) Ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikatv (AS) yang makin luas
- 2) Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.
- 3) Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal
- 4) Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia.
- 5) Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian.
- 6) Strategi dan instrumen operasi moneter pro-market terus diperkuat untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi
- 7) Transmisi kebijakan moneter berjalan baik, terutama ke pasar uang.
- 8) Kredit perbankan tetap tinggi untuk mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.2. Kerangka Ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2025

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2025 menunjukkan optimisme dengan rentang 4,18-5,18 persen. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Provinsi Maluku masih memiliki potensi untuk terus berkembang. BI juga memproyeksikan inflasi di Provinsi Maluku pada bulan februari 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,33 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,76 persen Pada tahun 2025, diperkirakan capaian inflasi Maluku tetap berada pada rentang sasaran sebesar 2,54 plus 1 persen, yang menunjukkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Kerangka ekonomi Provinsi Maluku tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan ekonomi triwulan I 2025 mencapai 5,07%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 4,87%. Beberapa sektor kunci yang mendorong pertumbuhan ini antara lain adalah pertanian, administrasi pemerintahan, perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan. Meskipun demikian, ekspor Maluku pada Januari 2025 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, sementara impor juga mengalami penurunan.

Kebijakan Ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2025 diarahkan dengan Tema: Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas. Tema ini dielaborasi ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Provinsi Maluku, yaitu:

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
2. Pengelolaan SDA dan Pengembangan Industri Pengolahan Berkelanjutan
3. Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya
Mendorong Ekonomi Daerah, Investasi dan Pariwisata
4. Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau
5. Penguatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul
6. Pemantapan Pemerataan Infrastruktur & Konektivitas yang Merata & Berkualitas
7. Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance

Kebijakan pengembangan ekonomi daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah:

a. Mewujudkan Tujuan Pembangunan peningkatan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Sasaran strategis yang diupayakan adalah 1) Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah dan 2) Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan. Strategi umum yang dilaksanakan adalah pengembangan ekonomi wilayah berbasis

komoditas unggulan, dengan arah kebijakannya meliputi: 1) Penguatan industri daerah berbasis komoditas unggulan dan 2) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.

b. Mewujudkan Tujuan Pembangunan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sasaran strategis yang diupayakan adalah 1) Meningkatnya pendapatan masyarakat, 2) Meningkatnya ketahanan pangan daerah, dan 3) Terkendalinya harga kebutuhan pokok; 4) Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas dan 5) Meningkatnya keterampilan, kompetensi SDM dan penciptaan lapangan kerja.

Strategi utama yang dilaksanakan adalah Percepatan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan 1) Peningkatan daya beli masyarakat; 2) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial); 3) Ketersediaan pangan daerah; dan 4) Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat.

3.3. Kerangka Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2023 tercatat mencapai 3,19 persen, namun di tahun 2024 Laju pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami perlambatan sebesar 3,58 Persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2024 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha sebesar 3,58 Persen ini dengan kontribusi pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,26 persen, di susul oleh pertambangan dan Penggalian sebesar 19,49 persen dan administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,37 persen.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur, memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Maluku, nasional maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 diprioritaskan pada pengelolaan

sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan penguatan potensi unggulan daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan ekonomi yang inklusif, peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur kewilayahan, peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing, kompeten, adaptif dan inovatif, tata kelola reformasi birokrasi pemerintahan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, Koperasi, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Seram Bagian Timur. Selain itu, upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar juga menjadi salah satu fokus kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun 2023, dan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025, maka perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dan Tahun 2025 masih akan menghadapi sejumlah tantangan dengan memperhatikan pengaruh ekonomi nasional dan ekonomi global.

3.3.1. Tantangan Dan Strategi

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur dapat digambarkan capaian pada tahun 2023, 2024, Target 2025 dan 2026 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1. berikut.

**Tabel 3.1 target Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Seram Bagian**

No	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	SATUAN	CAPAIAN		TARGET	
			2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.91	3.58	3.78	3,98
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	65,82	70.28	71.97	73,69
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.31	3.24	3,17	3.11
4	Presentasi Penduduk Miskin	Persen	20,08	21,03	20,40	19,79
5	Rasio Gini	Indeks	0,24	0,201	0.2002	0.1994

Sumber : Ranwal RPJMD Kab. SBT 2025-2029

Berkaca pada kondisi perekonomian di tahun 2024 dan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025, maka perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari dinamika ekonomi global dan regional.

3.3.1.1 Tantangan:

1. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur yang relatif masih tinggi;
2. Jumlah stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur yang masih relatif tinggi;
3. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur wilayah di kawasan strategis dan infrastruktur dasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
4. Penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan pemerintah pusat yang relatif tetap dibandingkan dengan tahun lalu;
5. Mendorong tumbuhnya pemberdayaan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan;
6. Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada awal tahun sampai Triwulan I tahun 2025 dengan menyesuaikan PMK Nomor 75 Tahun 2024

tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 serta PMK Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, maka perlu penyesuaian program kegiatan serta targetnya dalam upaya pemenuhan ketentuan tersebut.

7. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan Pembangunan daerah melalui perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025, maka perlu perubahan dalam kebijakan ekonomi di tingkat Pemerintah Daerah;
8. Peningkatan belanja daerah untuk percepatan transformasi ekonomi di seluruh sektor urusan pemerintah daerah, menuntut untuk peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sumber;
9. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur wilayah di kawasan strategis dan infrastruktur dasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
10. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa;
11. Mengoptimalkan penyerapan anggaran;
12. Fluktuasi ekonomi global, baik internasional, Nasional terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang akan berpengaruh pada perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur.

3.3.1.2 Strategi :

Strategi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi tantangan yang muncul pada triwulan I tahun 2025, melalui Perubahan RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b) Pencermatan terhadap belanja daerah disesuaikan dengan penyesuaian arah kebijakan pembangunan tahun 2025 dan intensifikasi serta ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
- c) Reviu terhadap belanja yang tidak produktif dan fokus pada belanja yang memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik;
- d) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
- e) Meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- f) Mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mendorong sektor ekonomi masyarakat;
- g) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan memonitor pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya secara periodik.
- h) Komitmen pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam menciptakan penguatan ekonomi masyarakat dalam upaya percepatan transformasi ekonomi yang meliputi penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas sumber daya manusia, Pembangunan infrastruktur dan peningkatan nilai tambah SDA.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,

manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan Pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Pada perubahan RKPD tahun 2025, kebijakan keuangan juga memprioritaskan penyelesaian opini BPK Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, serta memperhatikan penyesuaian arah kebijakan Pembangunan daerah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah. Dalam struktur

APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

3.5. Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan

Dinamika yang terjadi dalam kurun waktu triwulan satu tahun 2025 serta adanya hasil evaluasi terhadap capaian RKPD Triwulan I Tahun 2025 menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan RKPD dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya perkembangan pada kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan APBD Tahun 2025 dengan memperhatikan penyesuaian turunnya Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat;
- b. Terbitnya Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2025;
- c. Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD 2025;
- d. Keadaan Prognosis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar;
- e. Adanya pergeseran pagu kegiatan antar OPD; penambahan alokasi anggaran kegiatan; penambahan, pengurangan dan/atau penyesuaian target dan pagu kegiatan serta penambahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

3.6. Kerangka Pendanaan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025- 2029 dan memperhatikan arah kebijakan kepala daerah terpilih. Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2025 sebagaimana terlihat dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2. Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2025

KODE	URAIAN	APBD 2024	REALISASI APBD 2024	SEBELUM APBD 2025	SESUDAH PERUBAHAN APBD 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH
1	2			3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH					
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	46.166.701.688,00	14.208.070.527,86	17.860.808.547,00	19.517.927.332,00	1.657.118.785,00
4.1.01	Pajak Daerah	6.320.597.522,00	6.105.291.087,08	7.483.753.667,00	7.573.776.096,00	90.022.429,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.266.571.000,00	975.144.000,00	1.500.000.000,00	1.330.000.000,00	- 170.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.786.600.370,00	4.786.600.370,00	4.786.600.370,00	6.517.696.726,00	1.731.096.356,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	33.792.932.796,00	2.341.035.070,78	4.090.454.510,00	4.096.454.510,00	6.000.000,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	949.979.253.930,00	906.071.021.723,00	942.947.124.453,00	898.658.739.453,00	- 44.288.385.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	933.924.997.930,00	892.342.930.268,00	929.535.328.000,00	885.246.943.000,00	- 44.288.385.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.054.256.000,00	13.728.091.455,00	13.411.796.453,00	13.411.796.453,00	-
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.050.795.900,00	5.460.509.150,00	18.759.530.400,00	18.759.530.400,00	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.050.795.900,00	5.460.509.150,00	18.759.530.400,00	18.759.530.400,00	-
	Jumlah Pendapatan	949.979.253.930,00	906.071.021.723,00	979.567.463.400,00	936.936.197.185,00	- 42.631.266.215,00
5	BELANJA DAERAH					
5,1	BELANJA OPERASI	742.184.679.867,00	611.933.312.184,93	671.104.394.868,00	687.832.142.513,50	16.727.747.645,50
5.1.01	Belanja Pegawai	394.431.109.790,00	328.011.925.222,00	426.805.555.420,00	409.805.207.019,50	-17.000.348.400,50
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.847.184.893,00	222.925.942.738,12	214.870.111.748,00	242.782.156.794,00	27.912.045.046,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.115.845.000,00	1.808.641.395,00	1.320.000.000,00	1.627.150.000,00	307.150.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	53.430.266.043,00	47.890.955.043,00	13.832.600.000,00	21.257.182.000,00	7.424.582.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.360.274.141,00	11.295.847.786,81	14.276.127.700,00	12.360.446.700,00	-1.915.681.000,00

KODE	URAIAN	APBD 2024	REALISASI APBD 2024	SEBELUM APBD 2025	SESUDAH PERUBAHAN APBD 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH
1	2			3	4	5
5,2	BELANJA MODAL	135.680.561.212,00	93.251.451.447,28	88.232.580.332,00	93.727.106.758,50	5.494.526.426,50
5.2.01	Belanja Modal Tanah			-	300.000.000,00	300.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.050.028.009,00	9.714.767.569,00	19.783.587.924,00	20.425.139.865,50	641.551.941,50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.850.453.017,00	14.813.318.179,85	17.457.527.638,00	19.962.949.248,00	2.505.421.610,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.780.080.186,00	68.723.365.698,43	50.991.464.770,00	52.510.206.048,00	1.518.741.278,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-	528.811.597,00	528.811.597,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	- 3.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	- 3.000.000.000,00
5,4	BELANJA TRANSFER	223.328.681.752,00	223.061.181.930,00	216.230.488.200,00	218.983.217.197,00	2.752.728.997,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	223.328.681.752,00	223.061.181.930,00	216.230.488.200,00	218.983.217.197,00	2.752.728.997,00
	Jumlah Belanja	1.102.693.922.831,00	928.245.945.562,21	979.567.463.400,00	1.001.542.466.469,00	21.975.003.069,00
	Total Surplus/(Defisit)	(94.497.171.313,00)	(2.506.344.161,35)	-	- 64.606.269.284,00	- 64.606.269.284,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	96.942.671.313,00	0,00	-	64.606.269.284,00	64.606.269.284,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	96.942.671.313,00	0,00	-	64.606.269.284,00	64.606.269.284,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	96.942.671.313,00	0,00	-	-	-
	Pembiayaan Netto	94.497.171.313,00	0,00	-	64.606.269.284,00	64.606.269.284,00
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)			-	-	-
	TOTAL APBD	0,00	(2.506.344.161,35)	979.567.463.400,00	1.001.542.466.469,00	- 21.975.003.069,00

Sumber : BPKAD Kab. SBT (Diolah Tahun 2025)

3.7. Kerangka Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang yang masuk ke kas daerah yang berasal dari sumber-sumber sah, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan ini menjadi bagian penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencerminkan kemampuan fiskal daerah.

Pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu 2019 – 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun di Tahun 2019 pendapatan daerah sebesar Rp. 1.002 Triliun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp .909.58 Miliar mencapai titik terendah sedangkan untuk kenaikan tertinggi adalah pada Tahun 2023 yaitu mencapai Rp. 1.005 Triliun. Dengan laju pertumbuhan pendapatan tertinggi di tahun 2023 yaitu 0,055% (naik) dan terendah di tahun 2020 yaitu -0,102% (turun) dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan sumber pendapatan yang ada, kontribusi tertinggi diberikan dari pendapatan transfer, kemudian posisi kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan kontribusi ketiga dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Gambaran kontribusi PAD Kabupaten Seram Bagian Timur belum mencapai 5% atau < 10%, angka ini menunjukkan rasio kemandirian daerah yang masih rendah atau ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat masih tinggi.

Pada tahun 2025 target pendapatan semula ditetapkan sebesar Rp. 979.567.463.400,00 menjadi Rp. 936.936.197.185,00 . Hal ini disebabkan oleh munculnya perubahan kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat dengan pertimbangan INPRES NO 1 TAHUN 2025. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan pergeseran penjabaran APBD yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan penjabaran APBD tahun 2025 dengan target pendapatan daerah berubah menjadi Rp. 936.936.197.185,00.

Pada perubahan RKPD tahun 2025 kerangka Pendapatan daerah mengalami beberapa perubahan proyeksi, yaitu pada Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.657.118.785,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan akan meningkat sebesar Rp. 1.657.118.785,00.

Pendapatan Transfer diproyeksikan tidak mengalami fluktuasi pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang ada, maka dalam Perubahan RKPD tahun 2025 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 936.936.197.185,00., sebagaimana terlihat dalam tabel 3.3 dibawah ini:

**Tabel 3.3 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan
Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024-2025**

KODE	URAIAN	APBD 2024	REALISASI 2024	TARGET 2025	PROYEKSI PERUBAHAN 2025
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.667.586.288,00	14.696.357.688,00	17.860.808.547,00	19.517.927.332,00
4.1.01	Pajak Daerah	5.733.962.012,00	6.020.597.522,00	7.483.753.667,00	7.573.776.096,00
4.1.02	Retribusi Daerah	860.000.000,00	1.266.571.000,00	1.500.000.000,00	1.330.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.473.186.825,00	4.786.600.370,00	4.786.600.370,00	6.517.696.726,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.600.437.451,00	2.622.588.796,00	4.090.454.510,00	4.096.454.510,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	924.015.947.000,00	945.779.253.930,00	942.947.124.453,00	898.658.739.453,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	912.161.691.000,00	933.924.997.930,00	929.535.328.000,00	885.246.943.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	11.854.256.000,00	11.854.256.000,00	13.411.796.453,00	13.411.796.453,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.050.795.900,00	12.050.795.900,00	18.759.530.400,00	18.759.530.400,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.050.795.900,00	12.050.795.900,00	18.759.530.400,00	18.759.530.400,00
	Jumlah Pendapatan	949.734.329.188,00	972.526.407.518,00	979.567.463.400,00	936.936.197.185,00

Anggaran belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 979.567.463.400,00. Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 belanja diproyeksikan naik sebesar Rp. 936.936.197.185,00.

Proyeksi belanja pada rekening Belanja:

1. kenaikan belanja pada rekening Belanja Operasi sebesar Rp. 16.727.747.645,50 dengan rincian:
 - a) Belanja pegawai penurunan Rp. 17.000.348.400,50 ;
 - b) Belanja Barang dan Jasa naik sebesar Rp. 27.912.045.046,00 sebagai pemenuhan pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan manfaat;
 - c) Belanja Subsidi naik sebesar Rp. 307.150.000,00;
 - d) Belanja Hibah naik sebesar Rp. 7.424.582.000,00;
 - e) Belanja Bantuan Sosial turun sebesar Rp. 1.915.681.000,00;
2. Belanja Modal yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.494.526.426,50 terdiri dari :
 - a) Belanja Modal Tanah mengalami kenaikan sebesar Rp. 300.000.00,00;
 - b) Belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp. 641.551.941,50 untuk pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin perangkat daerah dengan melakukan pergeseran anggaran belanja barang dan jasa;
 - c) Belanja modal gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.505.421.610,00 untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan infrastruktur gedung dan bangunan tahun 2025;
 - d) Belanja Modal Jalan dan Jaringan Irigasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.518.741.278,00 sebagai pemenuhan akan jalan dan irigasi;
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya naik sebesar Rp. 528.811.597,00
3. Belanja Tidak Terduga (BTT) mengalami penurunan, pada Anggaran Penetapan Tahun 2025, yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,00 turun menjadi Rp. 1.000.000.000,00;

4. Belanja Belanja Transfer mengalami Kenaikan, pada Anggaran Penetapan Tahun 2025, yaitu sebesar Rp. 216.230.488.200,00 turun menjadi Rp. 218.983.217.197,00 atau naik sebesar Rp. 2.752.728.997.00;

Penggunaan alokasi belanja di fokuskan pada Prioritas Pembangunan Daerah, kebijakan ekonomi nasional untuk transformasi ekonomi, yang paling sedikit meliputi : penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan peningkatan nilai tambah SDA serta pemenuhan kebutuhan rutin yang dianggarkan pada penetapan 2025.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur merencanakan belanja untuk pelaksanaan program-program yang berdampak pada pemulihan perekonomian. Pengalokasian program transformasi ekonomi ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan output perekonomian dan mengembalikan perekonomian pada jalur potensial pra pandemi. Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia terus dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah, termasuk konektivitas antar wilayah, peningkatan produktivitas SDM, melalui sektor pendidikan, pelatihan dan kesehatan, untuk pelaksanaan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Kabupaten Seram Bagian Timur juga tetap mengacu pada belanja untuk merealisasikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan tetap memperhatikan dinamika, potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di daerah. Selain itu, proporsi belanja wajib, mengikat, mandatory dan prioritas lainnya dalam dokumen Perubahan RKPD khususnya urusan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Belanja Pegawai, dan Peningkatan Kapasitas SDM, serta alokasi mandatory DAU Earmark. Proyeksi Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel 3.4 dan tabel 3.5 di bawah ini.

**Tabel 3.4. Target dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024-2025**

KODE	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	BERKURANG/ BERTAMBAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
5,1	BELANJA OPERASI	671.104.394.868,00	687.832.142.513,50	16.727.747.645,50
5.1.01	Belanja Pegawai	426.805.555.420,00	409.805.207.019,50	-17.000.348.400,50
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.870.111.748,00	242.782.156.794,00	27.912.045.046,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.320.000.000,00	1.627.150.000,00	307.150.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.832.600.000,00	21.257.182.000,00	7.424.582.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.276.127.700,00	12.360.446.700,00	- 1.915.681.000,00
5,2	BELANJA MODAL	88.232.580.332,00	93.727.106.758,50	5.494.526.426,50
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	300.000.000,00	300.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.783.587.924,00	20.425.139.865,50	641.551.941,50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.457.527.638,00	19.962.949.248,00	2.505.421.610,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.991.464.770,00	52.510.206.048,00	1.518.741.278,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	528.811.597,00	528.811.597,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	- 3.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	- 3.000.000.000,00
5,4	BELANJA TRANSFER	216.230.488.200,00	218.983.217.197,00	2.752.728.997,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	216.230.488.200,00	218.983.217.197,00	2.752.728.997,00
	Jumlah Belanja	979.567.463.400,00	1.001.542.466.469,00	21.975.003.069,00
	Total Surplus/(Defisit)	-	- 64.606.269.284,00	- 64.606.269.284,00

**Tabel 3. 5. Proyeksi Belanja Mandatory, Pegawai dan Peningkatan Kapasitas
Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

No	Jenis Belanja	Proporsi	Proporsi 2025	
			APBD	PRKPD
1.	Belanja Mandatory			
	a. Pendidikan	Min 20%	41,92%	41,92%
	b. Infrastruktur	Min 40%	10,00%	0,0%
	c. Kesehatan	Min 10% di luar gaji	27,46%	27,46%
	d. Pengawasan	Min 0,75%	0,0%	0,0%
2.	Belanja Pegawai	Maks 30%	21.42%	21,42%
3.	Belanja Peningkatan Kapasitas Pegawai	PMDN 15/2024 min. 0,16%	0,30%	0,26%
4.	DAU earmark	150.130.930.000,00	150.130.930.000,00	136.312.276.000,00
5.	Belanja Daerah		979.567.463.400,00	1.001.542.466.469,00

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur pada perubahan tahun 2025 berasal dari pemanfaatan SiLPA hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada perubahan tahun 2025 dilakukan penyesuaian pada penyertaan modal.

Pada perubahan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024, terdapat defisit antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebesar **Rp. - 64.606.269.284,00**. untuk mengatasi defisit tersebut maka ditutupi dengan pembiayaan Neto (Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan) sebesar **Rp. 64.606.269.284,00**. Dengan Dimikian maka postur pada Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur T.A 2024 dalam posisi **Balance atau berimbang**.

**Tabel 3.6. Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024-2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	64.606.269.284,00	64.606.269.284,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	64.606.269.284,00	64.606.269.284,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Netto	-	64.606.269.284,00	64.606.269.284,00
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA)	-	41,448,900,074.86	-



Bab. IV

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang didasari oleh hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentan waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan Pemerintah daerah, telah menyesuaikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang di jabarkan pada indikator sasaran Perangkat Daerah.

Untuk mencapai indikator dan target ke dalam program kegiatan Perangkat Daerah, perlu ada penyesuaian sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah menyebabkan adanya Perubahan struktur pendapatan, transfer dan belanja sebagaimana tertuang di dalam BAB III Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Selain itu RKPD Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, untuk mewujudkan keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan di Kabupaten Seram Bagian Timur, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 harus memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam **Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029.**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ini didasarkan pada isu strategis pada tahun 2025, dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas kinerja pembangunan. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur juga

mempertimbangkan Kebijakan Nasional dan Provinsi demi adanya keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional. Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan dimaksud, maka ditetapkan sejumlah strategi dan arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi serta arahan presiden, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi RPJMN 2025-2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”



Gambar : 4.1
Visi Pembangunan Nasional 2025-2029

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita yaitu:



Gambar : 4.2
Misi Pembangunan Nasional 2025-2029

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.



2. Program Prioritas Presiden dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).



Gambar : 4.3
Program Prioritas Presiden Republik Indonesia

8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins)



Gambar : 4.4
Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku

RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi maluku. Sebagai suatu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka antar tingkatan pemerintahan harus ada keselarasan baik dalam hal strategi dan arah kebijakan maupun dalam penetapan target sasaran. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025– 2029, maka strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Strategi dan Arah Kebijakan
Provinsi Maluku Tahun 2025-2029**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Memperkuat Sistem Pemerintahan Yang Transparan, Efisien, Responsif, dan Berbasis Teknologi untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Secara Efektif Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan kapasitas manajemen kinerja pemerintahan berbasis hasil, dan percepatan digitalisasi layanan publik
	Peningkatan kualitas aparatur melalui pelatihan, sistem merit, serta budaya kerja berintegritas dan adaptif
	Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penerapan system informasi yang terbuka dan akuntabel
	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data, partisipatif, dan inovatif.
	Perluasan Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui upaya penciptaan lapangan kerja, investasi, proyek padat karya, penguatan sektor informal, Pengembangan pasar tenaga kerja yang adaptif dan responsif terhadap perubahan, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Percepatan Akses terhadap Perlindungan Sosial



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Adaptif, Pengurangan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin, Penguatan Sinergi Antar Perangkat Daerah dan Lintas Sektor serta Penguatan program perlindungan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemberdayaan
Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, pembinaan olahraga serta pemberdayaan kelompok rentan	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang memadai, kapasitas guru, serta penguatan kurikulum berbasis teknologi
	Penguatan sistem layanan kesehatan yang merata, responsif, dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kualitas tenaga dan sarana prasarana kesehatan
	Pengembangan sistem pembinaan olahraga terpadu yang berbasis komunitas, pendidikan, dan potensi lokal untuk meningkatkan prestasi
	Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan serta mendorong kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi secara terpadu	Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas layanan air bersih, sanitasi, energi, dan perumahan layak secara merata dan berkelanjutan
	percepatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan transportasi berkelanjutan dan terintegrasi
	Perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan digital
Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana yang inklusif dan berbasis komunitas	Penguatan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil
	Pengurangan pencemaran, rehabilitasi lingkungan, dan integrasi mitigasi-adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan
	Penguatan system peringatan dini, pemetaan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas masyarakat



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	dalam mitigasi bencana berbasis wilayah dan kearifan lokal
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Kemudahan Investasi, Hilirisasi Industri, Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Lokal dan UMKM, serta Kedaulatan Pangan, Air dan Energi	Peningkatan iklim investasi, kepastian hukum, dan penyediaan infrastruktur pendukung investasi
	pengembangan kawasan industri pengolahan melalui penyediaan infrastruktur, insentif fiskal, dan kemitraan dengan pelaku usaha local Memperkuat nilai tambah dan daya saing sektor unggulan, penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas SDM, serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor
	Perluasan akses pembiayaan inklusif melalui penguatan kelembagaan keuangan lokal, digitalisasi layanan, dan skema pembiayaan yang terjangkau
	Penguatan diversifikasi usaha dan pengendalian inflasi daerah
	Pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan
Memperkuat integrasi sosial melalui penguatan nilai-nilai toleransi dan inklusi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta peningkatan kapasitas tata Kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel	Penguatan dialog antar komunitas, nilai toleransi, serta partisipasi aktif dalam kegiatan social yang inklusif dan berkelanjutan
	Penguatan sinergitas antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat
	Penguatan integrasi adat istiadat dan kearifan lokal, sistem tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan

Visi Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 adalah: **“Transformasi Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045”**. Dijabarkan dengan 7 (Tujuh) misi, yaitu: 1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel; 2) Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan



Tingkat Pengangguran Melalui Kebijakan Yang Tepat Sasaran, Efisien dan Efektif; 3) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender Serta Penguatan; 4) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Transportasi dan Telekomunikasi Untuk Memperlancar Konektivitas Antar dan Intra Wilayah; 5) Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sumber Daya Alam Yang berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel); 6) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, Pemberian Insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Membuka Aksesibilitas Pasar dan Mengurangi Disparitas Antar Wilayah; dan 7) Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Visi dan Misi tersebut di atas, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Provinsi Maluku Tahun 2025-2029**

PROVINSI MALUKU TAHUN 2020-2027			
VISI/ MISI	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI : Transformasi Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045			
Misi 1 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel			
	Tercapainya reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku	Memperkuat Sistem Pemerintahan Yang Transparan, Efisien, Responsif, dan Berbasis Teknologi untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Secara Efektif	Peningkatan kapasitas manajemen kinerja pemerintahan berbasis hasil, dan percepatan digitalisasi layanan publik
			Peningkatan kualitas aparatur melalui pelatihan, sistem merit, serta budaya kerja berintegritas dan adaptif
			Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penerapan system informasi yang terbuka dan akuntabel
			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data, partisipatif, dan inovatif.
Misi 2 : Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran Melalui Kebijakan			



VISI/ MISI	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Yang Tepat Sasaran, Efisien dan Efektif			
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan pengangguran	Perluasan Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui upaya penciptaan lapangan kerja, investasi, proyek padat karya, penguatan sektor informal, Pengembangan pasar tenaga kerja yang adaptif dan responsif terhadap perubahan, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Percepatan Akses terhadap Perlindungan Sosial Adaptif, Pengurangan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin, Penguatan Sinergi Antar Perangkat Daerah dan Lintas Sektor serta Penguatan program perlindungan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan
	Menurunnya Tingkat Pengangguran		
Misi 3 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender Serta Penguatan			
	Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan	Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, pembinaan olahraga, serta pemberdayaan kelompok rentan	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang memadai, kapasitas guru, serta penguatan kurikulum berbasis teknologi
	Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan		Penguatan sistem layanan kesehatan yang merata, responsif, dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kualitas tenaga dan sarana prasarana kesehatan
	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga		Pengembangan sistem pembinaan olahraga terpadu yang berbasis komunitas, pendidikan, dan potensi lokal untuk meningkatkan prestasi
	Meningkatnya Peran Kelompok Rentan (Perempuan, anak dan Penyandang Disabilitas) Keluarga dan Kesetaraan Gender		Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan serta mendorong kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan
Misi 4 : Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Transportasi dan Telekomunikasi Untuk Memperlancar Konektivitas Antar dan Intra Wilayah			



VISI/ MISI	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya infrastruktur dasar	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar,	Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas layanan air bersih, sanitasi, energi, dan perumahan layak secara merata
		transportasi, dan telekomunikasi secara terpadu	dan berkelanjutan
	Meningkatnya infrastruktur dasar transportasi		Percepatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan transportasi berkelanjutan dan terintegrasi
	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Telekomunikasi		Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas layanan air bersih, sanitasi, energi, dan perumahan layak secara merata dan berkelanjutan
Misi 5 : Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sumber Daya Alam Yang berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel)			
	Terjaganya wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana yang inklusif dan berbasis komunitas	Penguatan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan dampak perubahan iklim		Pengurangan pencemaran, rehabilitasi lingkungan, dan integrasi mitigasi - adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan
	Meningkatnya Mitigasi Bencana		Penguatan system peringatan dini, pemetaan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana berbasis wilayah dan kearifan lokal
Misi 6 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, Pemberian Insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Membuka Aksesibilitas Pasar dan Mengurangi Disparitas Antar Wilayah			
	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Kemudahan Investasi, Hilirisasi Indudtri, Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Lokal dan UMKM, serta Kedaulatan Pangan, Air dan Energi	Peningkatan iklim investasi, kepastian hukum, dan penyediaan infrastruktur pendukung investasi
	Berkembangnya kawasan ekonomi khusus		pengembangan kawasan industri pengolahan melalui penyediaan infrastruktur, insentif fiskal, dan kemitraan dengan pelaku usaha local Memperkuat nilai tambah dan daya saing sektor unggulan, penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas SDM, serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor
	Meningkatnya Kontribusi sektor unggulan terhadap		Perluasan akses pembiayaan inklusif melalui penguatan kelembagaan keuangan lokal, digitalisasi layanan, dan skema



VISI/ MISI	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	perekonomian daerah		pembiayaan yang terjangkau
	Meningkatnya akses pembiayaan		Penguatan disversifikasi usaha dan pengendalian inflasi daerah
	bagi masyarakat		
	Stabilitas ekonomi daerah		Pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa		Peningkatan iklim investasi, kepastian hukum, dan penyediaan infrastruktur pendukung investasi
Misi 7 : Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum			
	Meningkatnya Ketaatan dan kepatuhan Hukum oleh Masyarakat	Memperkuat integrasi sosial melalui penguatan nilai-nilai toleransi dan inklusi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta peningkatan kapasitas tata Kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel	Penguatan dialog antar komunitas, nilai toleransi, serta partisipasi aktif dalam kegiatan social yang inklusif dan berkelanjutan
	Meningkatnya Harmonisasi Sosial berbasis Norma Agama, Budaya dan Kearifan Lokal		Penguatan sinergitas antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa		Penguatan integrasi adat istiadat dan kearifan lokal, sistem tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025.

Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021–2026 merupakan aktualisasi dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan melalui program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis baik global, nasional dan kondisi objektif daerah, serta pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.



Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Maluku yang memiliki berbagai sumber daya alam beranekaragam termasuk kebudayaan masyarakat yang cukup kental dan berkarakter kuat. Oleh karena itu, potensi-potensi tersebut merupakan salah satu modal berharga bagi setiap pelaksana pembangunan daerah untuk memulai rangkaian program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan rakyat akan terbangun secara konsisten dan merata jika segenap insan di Kabupaten Seram Bagian Timur berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kemampuan dirinya untuk mandiri, sekaligus berdaya saing sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menggapai cita-citanya yakni meningkatnya taraf kehidupan keluarga secara sosial ekonomi dalam masyarakat.

Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan memerlukan kebijakan dan peran pemerintah yang kuat dan efektif dalam mengatur jalannya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan perencanaan yang efektif dengan partisipasi para pelaku pembangunan secara terkoordinir. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa polarisasi rumusan konsep perencanaan pembangunan difokuskan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, visi dan misi kepala daerah terpilih dijabarkan secara mendetail ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya.

Penjabaran tersebut dilakukan dengan memerhatikan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Seram Bagian Timur, serta menyelaraskan, mensinergikan dan mengharmonisasikannya dengan sasaran dan arah kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, sebagai penjabaran dari ASTA CITA.

Berdasarkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Seram Bagian Timur Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berbudi Luhur”**. Guna mewujudkan Visi ditetapkan misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan.

**Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029**

VISI/ MISI	MISI/ TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI: “Terwujudnya Masyarakat SBT Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berbudi Luhur”			
Misi 1 : Meningkatkan fasilitas, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, kesehatan mental, serta kesejahteraan sosial masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.			
	Tujuan 1 : Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat Sasaran 1 : Terpenuhiya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan di seluruh wilayah secara merata. Sasaran 2 : Terselenggaranya program kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.	1. Penguatan kapasitas dan kualitas layanan fasilitas kesehatan yang merata. 2. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam sistem kesehatan, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial. 3. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan sosial.	• Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. • Meningkatkan kualitas tenaga medis dan tenaga sosial yang profesional dan berkompeten. • Pengembangan program kesehatan berbasis masyarakat, termasuk kesehatan mental dan rehabilitasi sosial. • Penguatan 13 asyarak pemerintah dengan swasta, akademisi, dan komunitas dalam penyelenggaraan layanan 13 asyarak dan 13 asyarak.



VISI/ MISI	MISI/ TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI: “Terwujudnya Masyarakat SBT Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berbudi Luhur”			
	Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi 14asyarakat dalam program 14asyaraka, 14asyaraka mental, dan kesejahteraan 14asyar.		
Misi 2 : Meningkatkan fasilitas, akses dan mutu pelayanan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan terampil			
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui perluasan akses, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang moderen dan inovatif. Sasaran 1 : Tersedianya akses pendidikan yang mudah dan merata di seluruh wilayah. Sasaran 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan relevansi kurikulum berbasis kebutuhan lokal	1. Pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah. 2. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan relevansi kurikulum berbasis kebutuhan local. 3. Modernisasi sarana dan prasarana pendidikan.	• Peningkatan anggaran dan alokasi sumber daya pendidikan yang berkeadilan dan proporsional. • Pengembangan pelatihan dan sertifikasi profesional untuk guru dan tenaga pendidik. • Revitalisasi kurikulum berbasis keunggulan lokal dan kebutuhan pasar kerja. • Pembangunan, rehabilitasi, dan digitalisasi sarana prasarana pendidikan..
	Sasaran 3 : Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang modern, aman, dan mendukung proses belajar mengajar.		
Misi 3 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kompetitif dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam, dan pengelolaan lingkungan hidup.			
	Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bertanggung jawab dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi dan wilayah. 2. Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan. 3. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup	• Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan telekomunikasi. • Pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal. • Penguatan regulasi dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam yang



VISI/ MISI	MISI/ TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI: “Terwujudnya Masyarakat SBT Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berbudi Luhur”			
	Sasaran 1 : Meningkatnya konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata. Sasaran 2 : Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal. Sasaran 3 : Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi risiko bencana.	berbasis mitigasi bencana dan ekonomi hijau.	berkelanjutan. • Mendorong implementasi program lingkungan hidup berbasis mitigasi perubahan iklim.
Misi 4 : Menjadikan sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya sebagai tulang punggung perekonomian masa depan.			
	Tujuan 1 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata ekonomi kreatif dan seni budaya terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan destinasi pariwisata unggulan, peningkatan daya saing dan inovasi kolaboratif yang berbasis kearifan lokal. Sasaran 1 : Tumbuhnya pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mandiri dan inovatif. Sasaran 2 : Terbangunnya destinasi wisata unggulan yang berstandar nasional dan internasional. Sasaran 3 : Meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif dan seni budaya terhadap perekonomian daerah.	1. Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal. 2. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan seni budaya. 3. Peningkatan promosi destinasi wisata unggulan dan produk kreatif daerah.	• Pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung destinasi wisata yang berkualitas. • Fasilitasi pelatihan, inkubasi usaha, dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif. • Optimalisasi promosi pariwisata berbasis digital marketing dan event pariwisata unggulan. • Pelestarian warisan budaya dan pengembangan seni budaya lokal sebagai daya tarik ekonomi.
Misi 5 : Membangun masyarakat yang berbudi luhur melalui implementasi dan penyelarasan nilai agama dan budaya			
	Tujuan 1 : Membangun masyarakat yang harmonis, berbudi luhur dan toleran melalui penguatan karakter, moral	1. Penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat.	• Penguatan program pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan formal dan non-formal.



VISI/ MISI	MISI/ TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI: “Terwujudnya Masyarakat SBT Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berbudi Luhur”			
	dan etik sosial yang berlandaskan nilai agama dan budaya. Sasaran 1 : Terbentuknya masyarakat yang berkarakter dan beretika berdasarkan nilai agama dan budaya. Sasaran 2 : Meningkatkan peran aktif keluarga dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter peserta didik. Sasaran 3 : Terpeliharanya harmoni sosial antar kelompok masyarakat yang beragam.	2. Peningkatan peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam pembentukan karakter. 3. Pemeliharaan harmonisasi sosial, toleransi dan keberagaman	• Penyediaan ruang dialog lintas agama, budaya, dan generasi. • Pengembangan dan pelestarian kearifan lokal yang mendorong toleransi dan kerukunan hidup bermasyarakat. • Penguatan peran lembaga keagamaan dan adat dalam membina masyarakat.
Misi 6 : Menyelenggarakan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang dilandasi nilai-nilai keluhuran budi dalam mewujudkan good governance dan clean government.			
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal Sasaran 1 : Terwujudnya sistem pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Sasaran 2 : Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang cepat, tepat, dan profesional. Sasaran 3 : Terbentuknya budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah daerah.	1. Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan berbasis teknologi informasi. 3. Penguatan pengawasan internal untuk pencegahan korupsi dan mal-administrasi.	Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk mendukung efisiensi dan transparansi layanan publik. Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan layanan prima. Penguatan sistem audit, pengendalian internal, dan penegakan hukum untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas korupsi. Optimalisasi peran pengaduan masyarakat sebagai bentuk pengawasan partisipatif.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 260 pasal 1 menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, program-program pembangunan daerah hendaknya diselaraskan dengan kebijakan pembangunan Nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 mengacu dan selaras dengan tema dan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan tema RKP Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.



Gambar : 4.5
Program Prioritas Nasional Tahun 2025

Program Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Pemerintah Daerah, Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, RKP 2025 dijabarkan dalam 3 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu :

1. Sumber Daya Manusia Berkualitas;
2. Infrastruktur Berkualitas; dan
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.

Sementara itu, sasaran indikator makro pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi dengan target sebesar 5,3%-5,6%;
2. Perununan emisi gas rumah kaca sebesar 38,6%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5%-5,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,379-0,382 poin;
5. Indeks modal manusia sebesar 0,56 poin;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 113-115 poin; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 104-105 poin.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025

Tema pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah ***Penguatan Fondasi Transformasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan***". Tema ini berdasarkan pada isu strategis dan prioritas pembangunan Provinsi Maluku pada tahun 2025. Isu strategis yang berkembang dan perlu perhatian penanganan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif;
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk;
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata; dan
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 maka, dirumuskan **Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025** sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi; dan
3. Transformasi Sosial dan Ekonomi yang Lebih Baik.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

A. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025

Tahapan dan tata cara analisis isu-isu strategis dalam rencana pembangunan tahun 2025, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah dari berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada timbulnya permasalahan pembangunan. Melalui identifikasi yang cermat, teliti dan komprehensif terhadap permasalahan pembangunan, diharapkan ditemukan berbagai isu strategis yang pemecahannya memerlukan langkah pendekatan yang terintegrasi satu dengan yang lain. Mengidentifikasi dan selanjutnya menentukan suatu permasalahan pembangunan akan dapat

menjadi isu strategis atau tidak. Isu strategis jika tidak segera mendapat respons, dikhawatirkan akan menjadi kendala dan hambatan dalam pembangunan tahun 2025.

Perumusan isu strategis tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta memperhatikan lingkungan strategis internal dan eksternal. **Isu strategis tahun 2025 di Kabupaten Seram Bagian Timur** adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing;
2. Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, Penguatan UKMK dan Pengembangan EkonomiInklusif, Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengembangan Wilayah dan Penguatan Konektifitas Antar Wilayah;
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokasi dan Pelayanan Publik;
5. Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat.

B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Penyesuaian program prioritas antara tahun 2021-2026 dan 2025-2029 akan dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang berbasis pada Asta Cita (17 Program Prioritas) dan Program Hasil Terbaik Cepat. Penyesuaian ini memastikan adanya kesinambungan target dan strategi, dengan mengarahkan program-program yang ada untuk mencapai sasaran utama yang baru, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk respon terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku, maka tema RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 adalah ***“Sinergitas Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan terciptanya lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Maluku tahun 2025. Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria - kriteria antara lain :

- a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
- b. Urgensitas penanganan permasalahan pembangunan; dan
- c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Agar pembangunan dapat berjalan terarah dan dapat menjawab kebutuhan daerah, ditetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 dirumuskan dari isu strategis kabupaten yang diselaraskan dengan sasaran dan arah pembangunan RPJMD tahun 2021-2026, berkorelasi dengan prioritas pembangunan Provinsi Maluku dan prioritas pembangunan nasional (RKP) Tahun 2025. **Prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025** sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Dengan Penguatan Potensi Unggulan Daerah Yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekonomi Yang Inklusif;
2. Peningkatan Pelayanan Dasar berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan;

3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran;
4. Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur Kewilayahan;
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing,Kompeten, Adaptif Dan Inovatif;
6. Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan; dan
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 4.4. Keterkaitan antara Isu Strategis dan prioritas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1.	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing,Kompeten, Adaptif Dan Inovatif
2.	Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, Penguatan UKMK dan Pengembangan Ekonomi Inklusif, Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Dengan Penguatan Potensi Unggulan Daerah Yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekonomi Yang Inklusif
		Peningkatan Pelayanan Dasar berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan
		Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran
3.	Pengembangan Wilayah dan Penguatan Konektifitas Antar Wilayah	Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur Kewilayahan
4.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan
5.	Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 4.5. Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Maluku dan Prioritas Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
1.	Sumber Daya Manusia Berkualitas;	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, Kompeten, Adaptif Dan Inovatif
			Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan
			Peningkatan Pelayanan Dasar berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan
2.	Infrastruktur Berkualitas	Transformasi Sosial dan Ekonomi yang Lebih Baik	Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur Kewilayahan
			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
3.	Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Dengan Penguatan Potensi Unggulan Daerah Yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekonomi Yang Inklusif
			Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran

C.Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan merupakan 2 (dua) komponen penting yang saling terkait satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Informasi penting yang perlu dijelaskan sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai strategi adalah bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan strategi.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.



Melalui parameter tertentu, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir strategi dalam menjamin, bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan langkah-langkah diatas maka, rumusan arah kebijakan dan strategi berdasarkan Sasaran dan Prioritas Tahun 2025 dapat dirumuskan sebagai berikut :



**Tabel 4.6. Prioritas Pembangunan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
1	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dengan penguatan potensi unggulan Daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peningkatan produksi, produktivitas serta mutu produk unggulan daerah	Pengembangan sarana prasarana produksi dan mutu produk unggulan daerah	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian
						Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten/kota
					Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pengembangan prasarana pertanian
						Pembangunan prasarana pertanian
					Pengelolaan perikanan tangkap	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah kabupaten/kota
						Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota
					Pengelolaan perikanan budidaya	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil
						Pengelolaan pembudidaya ikan



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
					Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Peningkatan sarana prasarana destinasi wisata serta penguatan promosi wisata	Meningkatkan sarana prasarana destinasi wisata serta penguatan promosi wisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota
					Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata
2	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya pelayanan dasar yang berkualitas	Meningkatnya mutu pendidikan dasar	Peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru dan siswa	Pengelolaan pendidikan	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar
						Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama
						Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
				Pemerataan guru pada wilayah terpencil dan terbelakang	Pembinaan perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota
					Pengelolaan arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
						Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
			Melestarikan adat, budaya dan sejarah daerah	Pelestarian seni, budaya dan sejarah daerah	Pengembangan kebudayaan	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
					Pengembangan kesenian tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
					Pembinaan sejarah	Pembinaan sejarah lokal dalam satu daerah kabupaten/kota
			Penguatan kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat	Pembinaan kelembagaan organisasi masyarakat	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota
						Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi
		Meningkatnya pemahaman dan implementasi ajaran agama	Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan	Peningkatan sarana prasarana serta pembinaan keagamaan	Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat
		Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas	Perlindungan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas dari tindak kekerasan	Penguatan perlindungan hak perempuan dan anak	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota
					Perlindungan perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
						Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
					Perlindungan khusus anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota
						Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota
				Pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas	Rehabilitasi sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
		Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada layanan dasar dan layanan rujukan	Peningkatan kualitas kesehatan layanan dasar dan rujukan melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan, serta optimalisasi layanan jaminan kesehatan masyarakat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah
						Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
						Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan SDM kesehatan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota
						Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
		Meningkatkan promosi kesehatan bagi masyarakat	Meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat	Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota
						Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota
					Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
						Pengendalian Penduduk dan Budaya Lokal
						Pendayagunaan Tenaga PenyuluhKB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
						Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
3	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan	Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan sosial	Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
						Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota
					Penempatan tenaga kerja	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota
						Pengelolaan informasi pasar kerja



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota
					Hubungan industrial	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota
4	Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatnya pemerataan aksesibilitas wilayah	Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi untuk mendukung peningkatan ekonomi wilayah	Peningkatan prasarana dan sarana antar wilayah, kawasan produksi dan distribusi	Penyelenggaraan jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota
			Mengembangkan dan memfasilitasi angkutan umum regional antar kabupaten, kecamatan	Peningkatan dan fasilitasi layanan umum lintas regional kabupaten, kecamatan dan perdesaan	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan prasarana pertanian
					Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Penyediaan perlengkapan jalan dan jalan kabupaten/kota
						Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
						Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						kota dalam satu daerah kabupaten/kota
		Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Penyiapan regulasi dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang daerah	Penyediaan dokumen rencana umum tata ruang wilayah	Penyelenggaraan penataan ruang	Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RTR) kabupaten/kota
						Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota
		Meningkatnya kualitas pemukiman masyarakat	Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) bagi masyarakat	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota
5	Peningkatan SDM Yang Berdaya Saing, Kompeten, Adaptif Dan Inovatif	Meningkatnya SDM berdaya saing, kompeten, adaptif dan inovatif	Pengembangan SDM yang inovatif kreatif serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Mendorong pengembangan SDM yang inovatif, kreatif serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan dan birokrasi	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah
					Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penataan Organisasi
6	Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pengembangan SDM yang inovatif, kreatif serta peningkatan sarana	Mendorong pengembangan SDM yang inovatif, kreatif	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			dan prasarana pelayanan publik	serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan dan birokrasi	daerah	
					Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penataan Organisasi
					Pendaftaran penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
						Penataan Pendaftaran Penduduk
						Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
					Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan sipil
						Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
					Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
						Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Meningkatnya kinerja pemerintahan	Meningkatkan manajemen pemerintah membangun open	Peningkatan status pemerintahan desa	Administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			government dalam penyelenggaraan pemerintahan	Perkuatan, keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik termasuk partisipasi dalam penyelenggaraan pengawasan		pemerintahan desa
					Penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan pengawasan internal
						Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
					Perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Pendampingan dan asistensi
					Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya kinerja pemerintahan	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib	Pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib sesuai aturan berlaku	Pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
						Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah
						Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan
					Pengelolaan Pengelolaan barang pendapatan daerah milik daerah	Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah
						Pengelolaan barang milik daerah
			Meningkatkan sistem manajemen akuntabilitas berbasis kinerja instansi pemerintah	Membangun sistem akuntabilitas kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penyusunan perencanaan dan pendanaan
						Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan
						Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan
						Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah
						Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA
						Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan
					Penelitian dan pengembangan daerah	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan
						Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan
		Meningkatnya kinerja organisasi dan profesionalitas ASN	Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah	Peningkatan SPIP melalui perencanaan dan penganggaran	Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan pengawasan internal
			Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur	Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur	Pengembangan sumberdaya manusia	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Pengembangan sistem air limbah	Penyediaan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan keluarga	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			Pengembangan sistem drainase	Peningkatan sistem drainase perkotaan dan perdesaan	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota
			Peningkatan penanganan persampahan	Optimalisasi pengelolaan dan penyediaan prasarana dan sarana persampahan	Pengelolaan persampahan	Pengelolaan sampah

4.3. Kebijakan Pembangunan

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kerangka tataruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Konstelasi pusat-pusat kegiatan akan diberikan pada rencana sistem pusat pelayanan, sedangkan rencana jaringan prasarana wilayah akan meliputi sistem prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana utama terdiri atas :

- a. Rencana sistem jaringan transportasi darat;
- b. Rencana sistem jaringan transportasi laut;
- c. Rencana sistem jaringan transportasi udara.

Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi :

- a. Rencana sistem jaringan energi / kelistrikan ;
- b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. Rencana sistem jaringan sumberdaya air;
- d. Rencana sistem jaringan persampahan;
- e. Rencana sistem jaringan drainase;
- f. Rencana pengembangan sarana wilayah.

4.3.1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

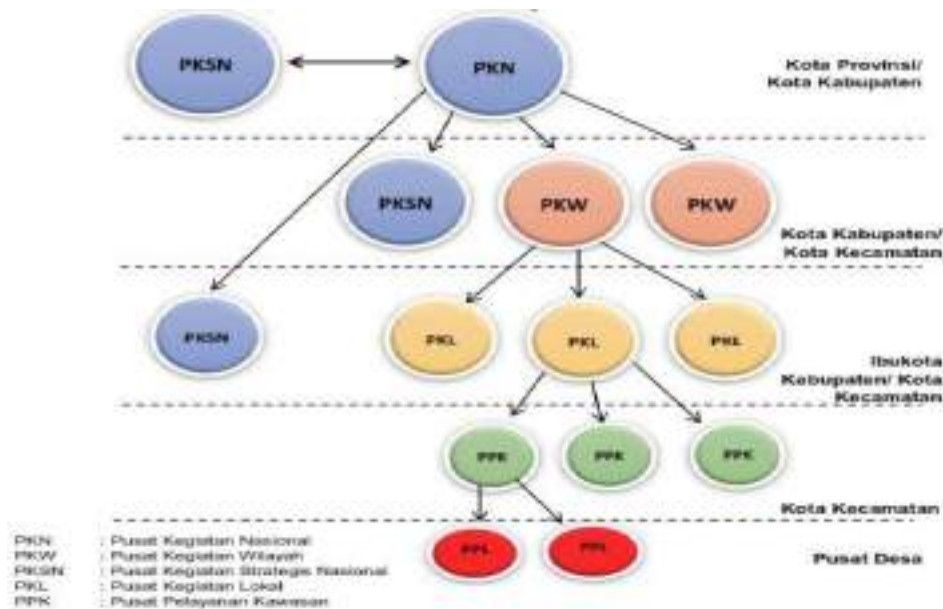
Struktur ruang wilayah di Kabupaten Seram Bagian Timur dibentuk oleh kota-kota sebagai pusat-pusat kegiatan wilayah berdasarkan hirarki, yang merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan / atau administrasi masyarakat. Struktur ruang wilayah ini bertujuan untuk membentuk ruang sebagai satu kesatuan yang dibentuk oleh unsur-unsur fungsional, dimana satu sama lain mempunyai sifat hubungan timbal balik, dan masing-masing mengemban fungsinya sebagai pusat pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disekitarnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Struktur ruang yang akan dikembangkan di Kabupaten Seram Bagian Timur didasarkan pada pertimbangan agar didapatkan keterkaitan internal-eksternal yang lebih seimbang, dengan memperhatikan pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatan kapasitas ekonomi



dibeberapa wilayah prioritas. Konsepstruktur ruang kota untuk Kabupaten Seram Bagian Timur akan terdiriatas PKW, PKL dan PPK dan PPL dijelaskan pada Gambar 4.6.

**Gambar 4.6 Konsep Struktur Ruang Kota
Kabupaten Seram Bagian Timur**



Kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) adalah :

1. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor – impor yang mendukung PKN;
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusatkegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan / atau ;
3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) adalah :

1. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
2. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Pengembangan jaringan transportasi di Kabupaten Seram Bagian Timur mengacu pada tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Seram Bagian Timur dan mendukung struktur perkotaan yang direncanakan. Sistem transportasi yang direncanakan adalah sistem transportasi terintegrasi baik transportasi darat, laut maupun udara dengan pengembangan beberapa pintu gerbang (*multi gate system*).

Pengembangan jaringan prasarana wilayah seperti listrik, air, dan prasarana pengelolaan lingkungan disesuaikan dengan perkembangan penduduk dan struktur kota.

A. Wilayah Pengembangan

Wilayah Pengembangan dimaksudkan sebagai kebijakan pembangunan agar tingkat pelayanan wilayah lebih efektif dan efisien, baik pelayanan pemerintahan, pelayanan fasilitas kehidupan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah. Sejalan dengan program-program pengembangan/ pembangunan yang telah direncanakan, serta untuk memperpendek rentang pelayanan pemerintah, baik dalam pelaksanaan, pengawasan, pengendalian pembangunan dan pelayanan fasilitas kehidupan.

Pusat-pusat wilayah yang ditunjuk akan menjadi tempat konsentrasi fasilitas pelayanan umum sesuai kebutuhan wilayah belakangnya dan kecamatan-kecamatan yang dibawahinya.

Berdasarkan kondisi wilayah kabupaten seram bagian Timur, Wilayah pengembangan (WP) dibagi menjadi 6 (Enam) yaitu :

1. **Wilayah Pengembangan – I**, dengan pusat pengembangan di Kota Bula (Kecamatan Bula). Kegiatan yang akan dikembangkan di WP I meliputi pemerintahan, perkotaan, permukiman, pertanian, peternakan, perdagangan, pariwisata, dan pertambangan.



2. **Wilayah Pengembangan – II**, dengan pusat pengembangan di Kota Werinama (Kecamatan Werinama). Kegiatan yang akan dikembangkan di WP II adalah perkotaan, pemerintahan kecamatan, permukiman, perdagangan, perkebunan, peternakan dan pariwisata.
3. **Wilayah Pengembangan – III**, dengan pusat pengembangan di Kota Geser (Kecamatan Seram Timur). Kegiatan yang akan dikembangkan di wilayah ini meliputi pemerintahan kecamatan, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa dan pariwisata.
4. **Wilayah Pengembangan – IV**, dengan pusat pengembangan di Kota Kata loka (Kecamatan P. Gorom). Kegiatan yang akan dikembangkan di wilayah ini adalah pemerintahan kecamatan, perkebunan, perikanan perdagangan dan jasa dan pariwisata.
5. **Wilayah Pengembangan – V**, dengan pusat pengembangan di Kota Waras-Waras (Kecamatan TutukTolu) Kegiatan yang akan dikembangkan di wilayah ini adalah pemerintahan kecamatan, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, pariwisata.
6. **Wilayah Pengembangan – VI**, dengan pusat pengembangan di Kota Tamher Timur (Kecamatan Kesui Watubela). Kegiatan yang akan dikembangkan di wilayah ini adalah pemerintahan kecamatan, perkebunan, perikanan, perdagangan & jasa dan pariwisata.

Selain pertimbangan dalam menentukan Wilayah Pengembangan diatas, juga keselarasannya dengan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan yang berlaku di wilayah Seram Bagian Timur. Program - program pembangunan demi kemudahan pengelolaan pelaksanaannya melibatkan proses pelimpahan kewenangan kepada perangkat pemerintah kecamatan. Oleh karena itu pembagian WP sesuai batas-batas kecamatan di wilayah ini diharapkan dapat memudahkan pengukuran pencapaian target-target pembangunan yang direncanakan dalam RTRW kabupaten. Petarencana wilayah pengembangan di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat pada Gambar 4.7.

**Gambar 4.7. Peta Rencana Wilayah Pengembangan
Kabupaten Seram Bagian Timur**



Sumber : RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008-2028

B. Sistem Perkotaan

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten dan berdasarkan hasil analisis dan kecenderungan perkembangan pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, sistem hierarki pusat-pusat pertumbuhan atau hirarki perkotaan di Kabupaten Seram Bagian Timur akan dikategorikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan fungsi dan pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten, yaitu :

1. Kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dalam hal ini merupakan kota yang termasuk kedalam hirarki pusat pelayanan di RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (sebagai simpul kedua kegiatan ekspor – impor yang mendukung PKN), berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. Untuk Kabupaten Seram Bagian Timur PKW terdapat di Kota Bula dan Kota Werinama;
2. Kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), merupakan kota yang termasuk ke dalam hirarki pusat pelayanan di RTRW Provinsi. Kota ini merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten / kota atau beberapa kecamatan, merupakan pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa



kecamatan, dan simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Berdasarkan RTRW Provinsi PKL untuk Kabupaten Seram Bagian Timur ditentukan di Dataran Hunimua, Kota Geser dan Kota Kataloka;

Dataran Hunimua adalah ibukota kabupaten definitif yang saat ini berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang akan dipromosikan menjadi *Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)*.

3. Kota atau wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK yang ditetapkan di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah di Kota Tamher Timur (Kecamatan Kesui Watubela) dan Kota Waras-Waras (Kecamatan Tutuk Tolu).
4. Wilayah yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan lingkungan (PPL) yang merupakan Pusat Desa yang skala pelayanannya melayani desa disekitarnya. PPL ditetapkan di Kabupaten Seram bagian Timur adalah Atiahu, Batuasa, Kilmuri, Urung, Kwaos, Selagor, Kian, Danama, Banggoi R, Waru, Amarsekaru, Miran, Pulau Panjang, Utta, Lahema dan Teor.

Sistem pusat-pusat permukiman tidak bisa dilepaskan dari struktur ruang yang ada, karena permukiman merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk struktur ruang. Sementara itu penataan ruang sendiri pada dasarnya mengarahkan pada sistem pusat-pusat permukiman.

Pusat kota-kota dalam lingkup wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur akan diarahkan sesuai kemampuan kota tersebut dalam mendukung fungsi yang diembannya, baik sebagai pusat kegiatan dalam wilayah kota itu sendiri maupun secara regional atau wilayah kota di sekitarnya.

Penetapan fungsi-fungsi kota tersebut berdasarkan pertimbangan keberadaan kota yang sangat mendukung pengembangan kawasan sekitar dan pengembangan wilayah secara umum. Sesuai dengan fungsinya dalam lingkup wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka pengembangan kota diarahkan sebagai pusat-pusat pelayanan, yaitu :

1. Pusat Pemerintahan Kabupaten
2. Pusat Pemerintahan Kecamatan
3. Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran
4. Pusat Perhubungan dan Komunikasi
5. Pusat Produksi Pengolahan
6. Pusat Pelayanan sosial (Kesehatan, Pendidikan dan Lain-lain)

Kelengkapan prasarana dan sarana yang terdapat pada masing-masing kecamatan akan menjadikan kecamatan tersebut sebagai pusat dari wilayah belakangnya. Dipihak lain terdapat pengelompokkan kecamatan yang membentuk fungsi kecamatan berdasarkan lingkup pelayanan administrasi pemerintahan (Ibukota Kabupaten atau Ibukota Kecamatan).

Untuk memantapkan sistem perkotaan di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan masing-masing hierarki pusat pelayanan dan skalapelayanan yang direncanakan dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, maka perlu arahan fungsi untuk masing-masing kota yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2028) dapat dilihat pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7. Rencana Hirarki Pusat Pelayanan
di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Hierarki Perkotaan	Pusat Permukiman	Skala Pelayanan		A	B	C	D	E	F
		Fungsi	Kewenangan						
PKW	Bula	Regional	Kabupaten		X	X	X	X	X
PKW	Werinama	Regional	Kabupaten		X	X	X	X	X
PKL	Dataran Hunimua	Regional	Kabupaten	X	X	X	X	X	X
PKL	Geser	Regional	Kabupaten		X	X	X	X	X
PKL	Kataloka	Regional	Kabupaten		X	X	X	X	X
PPK	Tamher Timur	Kabupaten	Kecamatan		X	X	X	X	X
PPK	Waras - Waras	Kabupaten	Kecamatan		X	X	X	X	X
PPL	Atiahu	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Batuasa	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Kilmuri	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Urung	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Kwaos	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Salagor	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Kian	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Danama	Kecamatan	Desa			X	X	X	X



Hierarki Perkotaan	Pusat Permukiman	Skala Pelayanan		A	B	C	D	E	F
		Fungsi	Kewenangan						
PPL	Banggoi R	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Waru	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Amarsekaru	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Miran	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	P.Panjang	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Utta	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Lahema	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Teor	Kecamatan	Desa			X	X	X	X

Keterangan:

A : Pusat Pemerintahan Kabupaten

B : Pusa Pemerintahan Kecamatan

C : Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran

D : Pusat Perhubungan dan Komunikasi

E : PusatProduksiPengolahan

F : Pusat Pelayanan Sosial (kesehatan, pendidikan dan lain-lain)

Untuk mendukung wilayah tersebut diatas sesuai dengan hierarki kotanya masing-masing seperti:

1. Pusat Perdagangan, jasa dan pemasaranya itu direncanakan pembangunan dan atau penambahan fasilitas seperti pasar, warung, toko dan bank disetiap wilayah hierarki perkotaan.
2. Pusat Pelayanan Sosial, yaitu :
 - (1) Kesehatan, direncanakan pembangunan dan atau penambahan fasilitas seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik setiap wilayah hierarki perkotaan. Khusus untuk rumah sakit umum yang semula hanya ada di Kota Bula (Kecamatan Bula), akan dikembangkan di Kota Kataloka (Kecamatan P. Gorom).
 - (2) Pendidikan, direncanakan pembangunan dan atau penambahan fasilitas seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat), dan Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) disetiap wilayah hierarki perkotaan.

**Gambar 4.8. Peta Rencana Struktur Ruang
Kabupaten Seram Bagian Timur**



Sumber : RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008-2028

C. Rencana Sistem Perkotaan dan Perdesaan

1. Rencana Sitem Kawasan Perkotaan

Sistem kawasan perkotaan (urban) adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai pusat pemukiman, perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan dibedakan atas:

- Kawasan perkotaan yang berstatus administratif daerah kota
- Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kabupaten
- Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan pedesaan menjadi perkotaan
- Kawasan perkotaan yang mempunyai bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan sebagai suatu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan.

Penetapan fungsi-fungsi kota tersebut berdasarkan pertimbangan keberadaan daerah yang sangat mendukung pengembangan kawasan sekitar. Sesuai dengan fungsinya dalam lingkup wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka pengembangan perkotaan diarahkan sebagai pusat-

pusat pelayanan, yaitu:

- (1) Pusat Permukiman
- (2) Pusat Perkotaan
- (3) Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran
- (4) Pusat Perhubungan dan Komunikasi
- (5) Pusat Produksi Pengolahan
- (6) Pusat Pelayanan Sosial (Kesehatan, Pendidikan dan Lain-lain).

Kawasan perkotaan yang ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah wilayah–wilayah yang dimungkinkan untuk berkembang menjadi kota yang dapat menopang seluruh aktivitas yang berhirarki sebagai fungsi pelayanan. Rencana sistem perkotaan berada pada hirarki pusat pelayanan, yaitu :

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang terdapat pada Kecamatan Bula dan Werinama
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terdapat pada Kecamatan Seram Timur (Geser), Kecamatan Gorom (Kataloka) dan Dataran Hunimua yang akan dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten Definitif.
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terdapat pada Kota Tamher Timur (Kecamatan Kesui Watubela) dan Kota Waras-waras (Kecamatan Tutuk Tolu).

D. Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Pengelolaan kawasan perkotaan dalam konteks pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, mengacu kepada Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, yang menetapkan Pusat-pusat Kegiatan Utama dan Pusat-pusat Pengembangan Wilayah. Pusat-pusat yang direncanakan merupakan pusat kegiatan atau pusat pelayanan yang nantinya akan memiliki fungsi sebagai kota yang menjadi orientasi perkembangan bagi kawasan disekitarnya. Pengelolaan kawasan perkotaan di Kabupaten Seram Bagian Timur dalah sebagai berikut :



- a. Mengembangkan kawasan perkotaan yang mampu memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan perdagangan, jasa dan industri serta kegiatan sosial ekonomi-budaya lainnya.
- b. Mendorong pihak swasta untuk menanamkan investasinya dalam pengembangan kawasan perkotaan.
- c. Menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Induk Sistem Prasarana agar pengembangan kawasan perkotaan dalam jangka panjang memiliki arah yang jelas sesuai dengan arahan fungsinya.
- d. Mengembangkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan dan kawasan lainnya untuk menciptakan sinergi bagi perkembangan wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan sekitarnya.
- e. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur bertanggung-jawab dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan perkotaan dengan memperhatikan kondisi, karakteristik dan potensi sosial-ekonomi dan prospek pengembangan kawasan perkotaan dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.
- f. Pengawasan dan penertiban pemanfaatan kawasan perkotaan dilakukan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (dinas terkait) untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberlangsungan pembangunan dan tata nilai setempat.

E. Rencana Sistem Kawasan Perdesaan

Sistem Perdesaan tidak bisa dilepaskan dari struktur ruang perkotaan yang ada. Fungsi perdesaan dalam lingkup wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur akan diarahkan sesuai kemampuan desa tersebut dalam mendukung fungsi yang diembannya yaitu sebagai pusat kegiatan dalam wilayah perdesaan itu sendiri.



Penetapan fungsi-fungsi kota tersebut berdasarkan pertimbangan keberadaan desa yang sangat mendukung pengembangan kawasan sekitar. Sesuai dengan fungsinya dalam lingkup wilayah kabupaten seram Bagian Timur, maka pengembangan perdesaan diarahkan sebagai pusat-pusat pelayanan, yaitu:

- (1) Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran
- (2) Pusat Perhubungan dan Komunikasi
- (3) Pusat Produksi Pengolahan
- (4) Pusat Layanan Sosial (Kesehatan, Pendidikan dan lain-lain)

Adapun wilayah perdesaan yang termasuk di dalam kriteria tersebut adalah Wilayah yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan lingkungan (PPL) yang merupakan Pusat Desa yang skala pelayanannya melayani desa disekitarnya kriteria pusat lingkungan adalah Atiahu, Batuasa, Kilmuri, Urung, Kwaos, Selagor, Kian, Danama, Banggoi R, Waru , Amarsekaru, Miran, Pulau Panjang, Utta, Lahema dan Teor.

Pada Wilayah Pulau Kesui (Kecamatan Kesui Watubela) akan dijadikan sebagai sentral produksi perikanan dengan cluster pengembangan **minapolitan** yang peruntukannya untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya dan penghasil rumput laut dan Tamher Timur dijadikan Pusat Pendaratan Ikan (PPI).

F. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan

Dalam UU No. 32 tahun 2004, dinyatakan bahwa pengertian desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pengelolaan kawasan perdesaan adalah:

- a. Untuk mengembangkan kawasan perdesaan yang dapat mendukung kesatuan sistem dan keterkaitan fungsional antara kawasan perdesaan dengan kawasan perdesaan dan antara kawasan perdesaan dengan

kawasan lainnya.

- b. Untuk menciptakan keserasian perkembangan kegiatan pertanian dalam mendukung pengembangan wilayah sekitarnya.
- c. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati.
- d. Agar sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dapat dimanfaatkan secara optimal.
- e. Untuk mendorong terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, bersih, sehat dan aman.

Pengelolaan kawasan perdesaan diwujudkan dalam bentuk:

1. Pengembangan ekonomi perdesaan
2. Penyempurnaan prasarana dan sarana dasar
3. Mengembangkan keterkaitan desa-kota
4. Peningkatan aksesibilitas ke/dari kawasan perdesaan.
5. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur bertanggung-jawab dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan perdesaan dengan memperhatikan kondisi, karakteristik dan potensisosial-ekonomi dan sosial-budaya setempat.
6. Pengawasan dan penertiban pemanfaatan kawasan perdesaan dilakukan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (dinas atau instansi terkait) secara bersama-sama dengan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberlangsungan pembangunan dan tata nilai setempat.

4.3.2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. alam dan sumber daya buatan. Pola ruang kabupaten merupakan gambaran distribusi peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan

pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

A. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya buatan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
3. Kawasan perlindungan setempat, antara lain sempa dan pantai, sempa dan sungai, kawasan sekitar danau / waduk, dan kawasan sekitar mata air;
4. Kawasan suaka alam dan cagar alam, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
5. Kawasan rawan bencana alam, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
6. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

B. Rencana Hutan Lindung

Secara umum kawasan hutan lindung di Kabupaten Seram Bagian Timur direncanakan seluas 96.878,54, Hadengan rincian untuk wilayah Kecamatan Bula dengan luas 36.791,13Ha, Kecamatan Werinama dengan luas 37.723,43Ha, Kecamatan Seram Timur dengan luas 16.196,22 Ha,

Kecamatan Tutuk Tolu dengan luas 246,86 Ha, Kecamatan Pulau-Pulau Gorom dengan luas 4.208,20Ha, dan Kecamatan Kesui Watubela dengan luas 1.712,70,Ha dari luas hutan secara keselurahn. Kawasan Hutan Lindung ini meliputi seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur.

C. Rencana Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air yang berada pada seluruh wilayah hutan yang tersebar diseluruh kecamatan.

D. Rencana Kawasan Perlindungan Setempat

1. Kawasan Sempa dan Pantai

Kasawan Lindung Sempa dan Pantai Meliputi :

- Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratur) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat;
- Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

2. Kawasan Sempa dan Sungai

Kawasan lindung sempa dan sungai, meliputi:

- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai ; dan
- Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Hal ini penting ditetapkan untuk memperkecil tekanan terhadap kawasan-kawasan sumber air dan sedimen. Perlindungan sempa dan sungai merupakan upaya untuk menekan proses sedimentasi yang akan

terjadi diperairan pesisir.

3. Kawasan Lindung Spiritual

Kawasan Rencana Kawasan Lindung spiritual di Kabupaten Seram Bagian Timur berada di Desa Bati Kecamatan Kian Darat.

4. Kawasan Lindung Kearifan Lokal

Kawasan Lindung kearifan lokal yaitu “Sasi” yang di berlakukan diseluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

**Gambar 4.9 Peta Rencana Pola Ruang
Kabupaten Seram Bagian Timur**



Sumber : RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008-2028

**Gambar 4.10 Peta Kawasan Lindung
Kabupaten Seram Bagian Timur**



Sumber : RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008-2028

E. Rencana Kawasan Cagar Alam dan Suaka Alam

Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi :

1. Kawasan hutan mangrove yang terdistribusi di Kecamatan Goromter dapat di Pulau Desa Kataloka, Pulau Panjang, dan Danau Sole dengan luas kurang lebih 29.347 Ha;
2. Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Seram Timur terdistribusi di Kuamor, Desa Airnanang dan Pulau Keffing dengan luas kurang lebih 7.650 Ha;
3. Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Bula terdistribusi di Desa Bula dan dusun di sekitarnya, Desa Englas dan di Pulau Parang dengan luas kurang lebih 32.492 Ha;
4. Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Werinama terdapat di Desa Bemo dan sekitarnya dengan luas kurang lebih 5.719 Ha.
5. Suaka alam laut di Karang Bais, Pulau Kon dan Pulau Garogos.
6. Habitat lebah madu yang berada di desa werinama – kecamatan Werinama



Sedangkan kawasan cagar alam meliputi :

- a. Kawasan terumbu karang disepanjang perairan pulau-pulau kecil di Kepulauan Watubela, P. Gorom, Pulau Geser, Pulau Panjang, Pulau Parang dan Pulau Karang Bais.
- b. Kawasan konservasi populasi rusa yang berada pada Desa Atiahu Kecamatan Werinama;
- c. Kawasan Taman Buru pengembangbiakan satwa Rusa yang berada pada Dusun Nif–Desa Dawang Kecamatan Bula
- d. Kawasan Pulau akat yang terdapat populasi Burung Kenari.

F. Kawasan Rawan Bencana Alam

Rencana zonasi menurut UU No. 27 Tahun 2007 adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Pada kawasan zona rawan bencana, pola pengelolaan kawasan dilakukan melalui pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Tujuan dari pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana adalah mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana.

Berdasarkan hasil analisis berdasarkan kriteria dan data terkait (Laporan Data dan Analisa), maka diperoleh gambaran wilayah-wilayah di Kabupaten Seram Bagian Timur yang memiliki resiko multi bencana. Resiko multi bencana yang dimaksud adalah resiko bencana gempa, tsunami, banjir dan longsor. Kawasan yang memiliki risiko paling tinggi terdapat di pulau geser.



Hasil identifikasi kawasan-kawasan rawan bencana menunjukkan bahwa ada beberapa potensi rawan bencana yang perlu ditangani secara serius, antara lain : abrasi, kecelakaan laut, banjir, erosi dan sedimentasi. Beberapa lokasi yang teridentifikasi merupakan daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten seram Bagian Timur antara lain :

1. Di muara DAS Masiwang dan Waibobot berpotensi untuk terjadinya banjir yang mengakibatkan sedimentasi di wilayah sekitarnya.
2. Daerah rawan gempa tektonik adalah di Bula, Waru, Masiwang dan kawasan sebelah utara pulau-pulau kecil di Kecamatan Seram Timur yakni Pulau Geser, Gorom, Manawoka dan Madorang.
3. Di bagian selatan yakni di Undur, Kilmuri, Batuasa serta Banda dan sekitarnya yang merupakan daerah batas lempeng tektonik adalah daerah rawan tektonik berskala besar berpeluang terjadi tsunami.
4. Daerah sekitar Pulau Igar, Pulau Kon, Pulau Panjang dan antara Pulau Geser dan Pulau Keffing yang terimbas oleh ruseddies.
5. Daerah muara sungai Masiwang dan Salas berpotensi untuk terjadinya bencana pelayaran karena adanya "saaru".
6. Daerah rawan abrasi pantai berada di daerah Kepulauan Gorom, Watubela dan Werinama .

Arahan-arahan dalam pengelolaan kawasan rawan bencana antara lain :

1. Sosialisasi Kawasan-kawasan rawan bencana kepada publik;
2. Membatasi arah pengembangan pemukiman dan pengembangan fasilitas publik pada kawasan tersebut;
3. Apabila kegiatan pembangunan fisik akan dilakukan pada kawasan ini, sedini mungkin dilakukan peringatan untuk melakukan pembangunan fisik yang memberikan tekanan pada tahap konstruksi;
4. Vitalisasi kelembagaan pemantau dan pengawas dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama.

G. Rencana Kawasan Lindung Geologi

Rencana kawasan lindung geologi di kawasan sekitar mata air yang tersebar diseluruh mata air di Kabupaten Seram Bagian Timur.

H. Rencana Kawasan Lindung Lainnya

Rencana kawasan lindung lainnya di Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi :

1. Kawasan Pulau Karau Karang bais, Sebagai Taman Bawah Laut.
2. Kawasan Pulau Kon dan Pulau Garogos, sebagai tempat pelestarian sumber makanan ikan dan taman bawah laut.
3. Kawasan Pulau Akat, sebagai taman bawah laut.
4. Kawasan Pulau Igar, sebagai taman bawah laut.
5. Kawasan Pulau Kurkof sebagai kawasan potensi ikan dan taman bawah laut.
6. Kawasan Pulau Baam sebagai kawasan potensi ikan dan taman bawah laut.

I. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Rencana pengembangan kegiatan budidaya dilakukan diluar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Pengembangan kawasan budidaya ini dilakukan untuk saling mendukung pengembangan kawasan lindung guna menjaga kelangsungan pengembangan kawasan budidaya. Selain itu rencana pengembangan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan fungsi, sinergi potensi, daya dukung, keselarasan, keseimbangan, dan keterpaduan pengembangan kawasan budidaya di wilayah darat dan wilayah laut, dengan strategi pengembangan diantaranya:

1. Menciptakan peluang dan pemerataan pengembangan ekonomi bagi setiap jenis dan golongan usaha, serta mencadangkan bagian bagian tertentu dari kawasan budidaya di wilayah darat dan wilayah laut untuk kepentingan pelayanan umum;
2. Program pembangunan kawasan budidaya di wilayah darat dan wilayah laut disesuaikan dengan potensi dan daya dukung wilayah.



3. Meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, terutama antara sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan pelayanan kota.

Berikut adalah potensi kehutanan di Kabupaten Seram Bagian Timur :

**Table 4.8 Potensi Kehutanan
di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Jenis Komoditi	Wilayah Pengembangan (WP)		Wilayah Sebaran Komoditi Unggulan Masing-Masing Kecamatan
Madu	WP.I	Kec.Werinama	Werinama,Tum,Gusalaut,Osong,Batuasa, Bemo
	WP.II	Kec. Siwalalat	Atiahu, Tunsai,Polin
	WP.III	Kec. Seram Timur	Urung
	WP.IV	Kec. Kilmuri	Kilmuri
Gaharu	WP.I	Kec.Werinama	Tersebar di seluruh Wilayah Hutan Werinama
	WP.II	Kec. Seram Timur dan Kec. Kian Darat	Kilmuri, Urung, Kwaos, Kian Laut, Kian Darat
	WP.III	Kec. Bula, Kec. Bula Barat, Kec. Teluk Waru	Hote, Banggoi, Bula, Salas, Dawang, Belis, Waru
	WP.IV	Kec. Tutuk Tolu	Danama, Kilbat, Sesar, Gah (Kufar)
	(Dataran Pulau Seram)		
Rotan	WP.I	Kec. Werinama dan Kec. Siwalalat	Werinama, Bemo,Atiahu, Tunsai, Polin, Elnusa, Lilyama, Hatumeten, Batuasa, Tobo, Osong, Gusalaut, Tum
	WP.II	Kec. Seram Timur dan Kec.Kilmuri	Kilmuri,Urung
	WP.III	Kec. Bula, Kec. Bula Barat, Kec. Teluk Waru	Hote,Banggoi,Salas,Dawang,Solan,Belis,w aru
	WP.IV	Kec. Tutuk Tolu	Gah (Kufar), Waras - Waras
	(Dataran Pulau Seram)		
Damar	WP.I	Kec.Werinama	Osong, Tum, Bemo, Werinama (Balakeu)
	WP.II	Kec.BulaBarat	Jakarta Baru
Karet	WP.I	Kec.Werinama	Bemo/Werinama

**Gambar IV.6. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya
Kabupaten Seram Bagian Timur**



Sumber : RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008-2028

J. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi, yang terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi konversi;

1. Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang sesuai dengan kriteria kawasan penyangga. Alokasi pemanfaatannya dipertahankan sesuai fungsinya dan eksploitasinya dapat dilakukan dengan sistem tebang pilih.

2. Hutan Produksi Tetap

Merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan sistem tebang habis tetapi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

3. Hutan Produksi Konversi

Merupakan hutan yang dapat di konversi menjadi kawasan lain seperti kawasan yang diarahkan sebagai kawasan budidaya lainnya yang mempunyai prospek lebih menguntungkan dengan sistem tebang habis tetapi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Luasan kawasan hutan produksi terbatas, tetap dan konversi diuraikan pada Tabel 4.9 berikut.



Tabel 4.9 Luasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Seram Bagian Timur

Kecamatan	LUAS LAHAN (Ha)		
	HP Terbatas	HP Tetap	HP Konversi
Bula	105.391,53	35.599,87	51.517,19
Werinama	96.014,08	1.411,22	29.789,67
Seram Timur	48.447,88	6.543,84	37.616,42
P.Gorom	20.555,32	-	9.061,01
Tutuk Tolu	-	3.225,65	20.401,48
Kesui Watubela	-	-	-
Total	270.408,82	46.780,58	148.385,77

Status lahan yang masuk pada hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT) akan di alih fungsikan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) karena kawasan tersebut sudah dibangun kawasan pemukiman dan infrastruktur lainnya.

Berikut ini usulan alih fungsi hutan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur antara lain :

Tabel 4.10 Usulan Alih Fungsi Hutan Di Kabupaten Seram Bagian Timur

Lokasi	Status Kawasan	Kondisi Eksisting	Usulan Perubahan Status/Fungsi	Tujuan Peruntukan Lahan	Luas Lahan (Ha)
Desa Hote – Desa Jakarta Baru	HP	1. Pada lokasi sekitar DAS Bobi dan sepanjang pesisir pantai Desa Hote-Banggoi telah didiami oleh Pemukiman Penduduk Lokal 2. Pemukiman Transmigrasi UPT.T, UPT.Y, UPT. Z. 3. Terdapat areal sawah di Desa Jakarta Baru dan di Desa Waiketam Baru	APL	1. Pertanian : Rencana Pengembangan Sawah 2. Perkebunan : Telah memperoleh Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit 3. Pemukiman Lokal dan Transmigrasi	13,00
Desa Banggoi – Desa Waimatakabo	HPK	1. Terdapat pemukiman Penduduk Lokal : Desa Banggoi dan Desa Waimatakabo 2. Pemukiman Transmigrasi UPT R, UPT 12, UPT D5, Wimatakabo, UPTD 6. 3. Terdapat areal sawah di Desa Waimatakabo dan Desa Akibobo	APL	Pertanian : Rencana Pengembangan Sawah Perkebunan : Termasuk dalam ijin lokasi Perkebunan kelapa sawit a.n. PT. Banggoi Internasional Argo	7.745



Lokasi	Status Kawasan	Kondisi Eksisting	Usulan Perubahan Status/Fungsi	Tujuan Peruntukan Lahan	Luas Lahan (Ha)
Desa Bula – Dusun Englas	HPK	1. Lokasi Pemukiman Penduduk 2. Merupakan Areal Wisata Pantai 3. Areal untuk Pinjam Pakai Kawasan Pertambangan a.n. PT. Kuppec		Pemukiman Lokal, Pengembangan Wisata Pantai dan Lokasi Pengembangan Industri	1.041
Desa Nif – Desa Dawang	HP/HPK	Lokasi Pemukiman Penduduk		Areal Pelestarian Rusadan tanaman Wisata Baru	800
Desa Solan	HP	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Perkebunan dan Pemukiman	366
Desa Belis		Areal Pemukiman Penduduk	APL	Perkebunan dan Pemukiman	387
Desa Waru		Areal Pemukiman Penduduk	HPK	Perkebunan dan Pemukiman	1.573
Desa Gaa		Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemabangunan Kawasan Bandara SBT	445
Desa Gaa Kec. Tutuk Tolu	HPK	Areal IUPHHK PT. Mangole Timber Producers II	APL	Pembangunan Ibu Kota Kabupaten SBT	6.02
	HPT	Areal IUPHHK PT. Mangole Timber Producers II	APL	Pembangunan Ibu Kota Kabupaten SBT	2.09
Desa Salagor / Kian Laut	HP	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Pertambangan Marmer	1.622
Desa Kian Laut	HP	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Perkebunan	
Dusun Air Nanang	HP	Areal Hutan Mangrove	Kawasan Konservasi	Pelestarian Hutan dan Ekosistem Mangrove	500
Desa Urung	HP	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Perkebunan	1.635
Desa Kilmuri	HP	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Perkebunan	2.846
Dusun Tum / Gusa Laut	HP	Areal Pemukiman Penduduk dan IUPHHK PT. Pribumi Sakti daya	APL	Pemukiman, Perkebunan kelapa sawit dan Pengembangan Transmigrasi	
Desa Werinama	HPK	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Pertambangan	2.500
Desa Werinama	HPK/HPT	Areal Pemukiman Dan Habitat Lebah Madu alam	Kawasan Konservasi	Pelestarian Habitat Lebah Madu	2.000
Desa Bemo	HPK	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Perkebunan	
DAS Bobot	HPK/HPT	Areal Das Bobot dan Wilayah Pekan Rusa	Kawasan Konservasi	Areal Pelestarian Rusadan Areal Taman Wisata Baru	



K. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi:

1. Kecamatan Bula : Dusun Sesar dan Wailola, Dusun Nif,
2. Kecamatan Teluk Waru: Desa Belis, Desa Waru
3. Kecamatan Bula Barat Desa Banggoi.
4. Kecamatan Seram Timur : Desa Guli-guli, Desa Undur
5. Kecamatan Kilmuri: Desa Kilmury.
6. Kecamatan Kian Darat : Desa Selagor, Dusun Aruan, Desa Kian.
7. Kecamatan Gorom Timur : Desa Miran, Desa Amarwatu, Desa Amar dan Desa Nama.
8. Kecamatan Werinama : Desa Batuasa, Desa Bemo.
9. Kecamatan Siwalalat : Desa Atiahu
10. Kecamatan Tutuk Tolu : Dusun Kufar, Desa Gah, Desa Danama dan Desa Kilga
11. Kecamatan Kesui Watubela : Desa Ilii dan Desa Amarlaut

L. Kawasan Peruntukan Pertanian

Keberadaan kegiatan pertanian ini diarahkan pengembangan nya terutama pada wilayah yang mempunyai jenis tanah dengan tingkat kesuburan tinggi serta sebagian besar penduduknya mempunyai budaya bertani. Alokasi pengembangan kegiatan ini diantaranya direncanakan di:

1. Kecamatan Bula dengan komoditas utama tanaman padi;
2. Kecamatan Seram Timur dan Werinama dengan komoditas utama jagung, ketela dan umbi-umbian.

Produk-produk pertanian tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur juga dapat dimanfaatkan untuk mensuplai kebutuhan bahan baku pengolahan agro industri yang bisa dikembangkan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Kegiatan pertanian ini perlu ditingkatkan produksinya bahkan bila memungkinkan produksinya dapat mensuplai kebutuhan ekspor.

Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari kawasan budidaya pertanian, maka pengelolaan pertanian harus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam hal ini tidak hanya ditujukan kepada peningkatan

produksi tanaman semata, tetapi juga kepada usaha-usaha untuk mempertahankan sumberdaya lahan selama mungkin.

Tabel 4.11 Luas Lahan Kawasan Pertanian

Kecamatan	Luasan(Ha)		Presentase	
	Pertanian Lahan Basah	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Basah	Pertanian Lahan Kering
Bula	-	1.797	-	0,76
Werinama	44	1.210	0,01	0,63
SeramTimur	-	273	-	0,28
P.P.Gorom	-	91	-	0,67
TotokTolu	-	696	-	1,64
Wakate	-	1.110	-	18,25
Total	44	5.176	0,01	0,88

Sedangkan untuk potensi pertanian menyebar di Kecamatan Bula dan Kecamatan Werinama :

1. Waimatakabo
2. Waisamet
3. Akebobo D6
4. Waiketam Baru
5. Jakarta Baru
6. Sumber Agung
7. Jembatan Basah
8. Waikudal/Batuasah
9. Kec. Werinama

Sedangkan untuk hortikultura dialokasikan lahan yang tersebar pada 3 (tiga) kecamatan, yang meliputi :

- a. Kecamatan Bula dengan luas kurang lebih 1.525 Ha;
- b. Kecamatan Werinama dengan luas kurang lebih 750 Ha;
- c. Kecamatan Tutuk Tolu dengan luas kurang lebih 250 Ha.

**Gambar 4.12 Peta Rencana Kawasan Pertanian
Kabupaten Seram Bagian Timur**



Sumber : RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008-2028

M. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian tanaman tahunan/ perkebunan dengan jenis komoditi utama berupa aneka buah-buahan dan hasil perkebunan lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan pangsa pasar yang baik. Agar jenis tanaman ini mempunyai nilai ekonomis tinggi perlu dilakukan upaya penguasaan teknologi pertanian dan perkebunan, baik melalui pelatihan, bimbingan atau studi banding. Untuk itu diperlukan peranaktif Pemerintah Kabupaten terutama dalam membangun BLK-BLK di sentra – sentra kegiatan pertanian yang berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi para petani guna meningkatkan kemampuan untuk menguasai teknologi pertanian dan perkebunan.

Pengembangan kawasan pertanian tanaman perkebunan di Kabupaten Seram Bagian Timur di alokasikan di Kecamatan Seram Timur (Cengkeh dan Kopi), Bula (kelapa) dan Pulau Gorom (Cengkeh, Kelapa, Pala) serta di lokasi lain yang potensial untuk dikembangkan kegiatan perkebunan. Produk-produk perkebunan tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan penduduk juga dipasarkan di Ambon dan Surabaya.

Pada saat ini kawasan perkebunan di Kabupaten Seram Bagian Timur baru memproduksi bahan mentah atau bahan baku, dan kedepan diharapkan akan dapat dinaikkan nilai tambahnya menjadi produk olahan yang mampu menyerap tenaga kerja dan pengembangan industri olahan hasil perkebunan. Namun demikian didalam upaya pengembangannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya masukan teknologi (berupa pengetahuan, alat dan metoda) untuk menyediakan lahan perkebunan siap tanam.
2. Adanya masukan teknologi secara kontinyu dalam hal jenis dan kualitas bibit yang akan ditanam.
3. Adanya masukan teknologi secara kontinyu dalam hal perawatan tanaman (berupa pemupukan dan penggunaan obat - obatan tanaman).
4. Adanya masukan teknologi secara kontinyu dalam hal perawatan lahan perkebunan, sehubungan dengan teridentifikasikannya sebagian wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai kawasan yang rawan longsor dan rawan gempa.
5. Penggunaan jenis dan kuantitas pupuk dan obatan-obatan tanaman yang ramah lingkungan, untuk mencegah pencemaran terhadap air tanah dan air permukaan / sungai.
6. Adanya masukan teknologi pasca panen secara kontinyu.

Tabel 4.12
Luas Lahan Perkebunan

KECAMATAN	LUASAN LAHAN (HA)	%
Bula	96.931	30,44
Werinama	119.047	37,39
Seram Timur	1.908	0,59
P.Gorom	70.286	22,07
TotokTolu	29.762	9,35
Wakate	477	0,15
Total	318.411	100



Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki potensi Perkebunan dengan komoditas unggulan adalah Pala, Cengkeh, Coklat dan Kelapa, tetapi yang menjadi komoditas unggulan Primer adalah Pala dengan penyebaran lokasi terbesar berada pada kecamatan P.Gorom dan Kesui Watu bela. Berikut ini tabel wilayah sebaran komoditas unggulan (Tabel 4.13)

Tabel 4.13 Wilayah Komoditas

No	Jenis Komoditi	Wilayah Pengembangan (WP)		Wilayah Sebaran Komodit Unggulan Masing-Masing Kecamatan
1	Pala	WP.I	Kec. Pulau Gorom, Gorom Timur dan Pulau Panjang	Kataloka, Ondor, Day, Mida, Amarwatu, KotaSirih, Kilkoda, Miran, Rarat, Amarsekaru, Pulau Panjang
		WP.II	Kec. Kesui Watubela dan Kec. Teor	Tamher Warat, Kelangan, Teor
		WP.III	Kec. Werinama dan Kec. Siwalalat	Werinama, Polin, Tunsai, Lapela, Hatumeten
		WP.IV	Kec.TutukTolu	Danama, Kilbat, Kilmoy,Sesar, Air Kasar
2	Cengkeh	WP.I	Kec. Werinama dan Kec. Siwalalat	Werinama, Atiahu, Tunsai Polin Batuasa, Tobo
		WP.II	Kec. TutukTolu	Danam, Kilbat, Kilmoy, Sesar, Air Kasar,
		WP.III	Kec. Kesui Watubela dan Kec. Teor	Utta, Amar laut, kelangan, Tamher Timur, Tamher Warat, Teor(Kilwouw)
		WP.IV	Kec. P. Gorom dan Gorom Timur	Ondor, Kataloka, Amar sekaru, Mida, Day, Amarwatu, Miran, Rarat
3	Coklat	WP.I	Kec. TutukTolu	Gah, Waras - waras
		WP.II	Kec.Werinama dan Kec. Siwalalat	Atiahu, Werinama, Bemo, Batuasa, Tum, Osong, Elnusa, Abuleta, Lapela, Lilyama, Dihil.
		WP.III	Kec.Bula,Kec.BulaBarat,Kec.TelukWaru	Waru,Salas,Dawang, Hote,Banggoi
4	Kelapa	WP.I	Kec.Werinama dan Kec. Siwalalat	Werinama, Bemo, Atiahu, Elnusa, Lapela, Dihil, Lilyama
		WP.II	Kec.TutukTolu	Waras-waras,Gah
		WP.III	Kec. Kesui Watubela, Kec.Pulau GoromKec, Pulau Panjang, dan Kec.Teor	Teor (Rumui, Rumlusi, Kilwouw, Kerkar, Wermaf Lapang), Kesui (Tamher Warat, Tamher Timur, Utta)
		WP.IV	Kec. Bula, kec. Bula Barat dan Kec.Teluk Waru.	Hote Banggoi, Salas, dawang, Belis, Waru, Karai

N. Kawasan Peruntukan Perikanan

a. Perikanan Tangkap

Perairan Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kawasan yang baik bagi kegiatan penangkapan ikan. Masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya perikanan laut melalui kegiatan penangkapan ikan di wilayah mereka, baik di wilayah Pulau-Pulau Gorom, Seram Timur, Bula maupun Werinama. Sumber daya perikanan yang dimanfaatkan di seluruh wilayah ini terdiri dari empat golongan besar sumber daya perikanan tangkap, yaitu sumber perikanan pelagis, demersal, udang dan karang.

Bila mengacu pada kondisi ideal suatu perairan yang dijadikan sebagai daerah penangkapan, maka kriteria yang dibutuhkan adalah :

Perairan harus memiliki kondisi, dimana ikan datang dengan mudah secara bersama-sama dalam bentuk kelompok, dan daerah itu merupakan suatu tempat yang baik bagi habitat mereka.

Perairan tersebut akan menjadi tempat dimana nelayan dengan mudah mengoperasikan alat penangkapan ikan. Perairan tersebut akan dialokasikan sebagai suatu tempat yang bernilai ekonomis.

Pemilihan suatu perairan sebagai daerah penangkapan akan dibuat dengan pengertian yang pantas secara efisien, menyenangkan dan penangkapannya bernilai ekonomi. Dengan demikian, lingkungan perairannya harus memadai sesuai dengan tingkah laku ikan berdasarkan data hasil penelitian kondisi oseanografi dan meteorologi, musim penangkapan diperoleh dari akumulasi berbagai pengalaman penangkapan setelah dilakukan operasi penangkapan ikan oleh nelayan, dan berdasarkan pertimbangan yang sejalan dengan prinsip ekonomi.

Perairan yang menjadi wilayah Kabupaten Seram Bagian Timurbila mengacu pada batas wilayah administratif menurut UU No: 32 Tahun 2004 memiliki batas wilayah terjauh adalah 1/3 dari 12 mil laut atau 4 mil laut dari batas surut terendah, bila tidak bersinggungan atau tumpang

tindih dengan wilayah perairan Kabupaten atau Provinsi lainnya yang berdampingan. Wilayah ini merupakan daerah penangkapan yang legal dimiliki untuk dimanfaatkan sumberdayanya oleh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur. Namun, pada kenyataannya masyarakat setempat terutama nelayan penangkap ikan juga melakukan aktifitas penangkapan ikan sampai di luar batas perairan 4 mil laut tersebut. Luas perairan (daerah penangkapan ikan) per wilayah Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur pada batas 0-4 mil laut adalah 5.947,98 Km² dan 4-12 mil laut adalah 11.198,28 Km².

b. Budidaya Perikanan

Rencana pengembangan budidaya perikanan yang dapat digunakan untuk kegiatan seluas 8.274,69 ha, luasan tersebut terbagi pada beberapa wilayah perairan yaitu perairan Kecamatan Bula padalokasi Pulau Parang dengan total luas ±536 Ha, Kecamatan Seram Timur pada lokasi P. Keffing, P. Geser, P. Kilwaru, P. Seram Laut, P. Kifar, P. Neding, Desa Kuffar, Desa Urung dengan total luas ± 5.348 Ha dan Kecamatan Gorom pada lokasi P. Garogos, P. Panjang, P. Manawoka dengan total luas ±2.391 Ha. Areal terluas yang dapat dimanfaatkan sebagai areal kegiatan usaha budidaya laut adalah perairan Desa Kuffar.

Tabel 4.14 Daerah Potensial Untuk Pengembangan Usaha Budidaya di Perairan Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Peruntukannya

Lokasi	Luas (Ha)	Jenis Budidaya
P. Parang	323,43	Ikan Kerapu
P. Parang	119,92	Ikan Kerapu, Rumput laut
P. Parang	92,46	Ikan Kerapu, Rumput laut
P. Keffing	794,66	Rumput laut, Teripang
P. Geser	99,81	Rumput laut
Kilwaru	407,98	Rumput laut
P. Seram Laut	324,87	Rumput laut
P. Kifar	356,80	Rumput laut
P. Neding	356,80	Rumput laut
P. Garagos	315,24	Rumput laut
P. Panjang	1.080,10	Rumput laut, Teripang
Manawoka	254,70	Rumput laut
P. Gorom	733,62	Rumput laut, Ikan



Lokasi	Luas (Ha)	Jenis Budidaya
Kufar	2.123,74	Udang
Urung	924,85	Penyu
Jumlah	8.274,69	

**Gambar 4.13 Peta Rencana Kawasan Perikanan
Kabupaten Seram Bagian Timur**



Sumber : RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008-2028

c. Pengolahan Ikan

Rencana pengolahan ikan berada di Desa Kuffar Kecamatan Tutuk Tolu.

O. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan pertambangan saat ini yang sudah berkembang berupa penambangan Minyak bumi dan menjadi primadona pertambangan dan energi di Kabupaten Seram Bagian Timur. Pertambangan minyak ini berada di Kecamatan Bula telah di eksploitasi sejak jaman Belanda dan kini dikelola oleh swasta. Selain minyak bumi terdapat pula bahan galian Cyang telah di kembangkan dan dipasarkan ke kabupaten lain. Di pesisir pantai Kecamatan Bula, Kecamatan Geser dan Kecamatan Werinama diindikasikan terdapat bahan tambang Zirkon. Potensi pertambangan dan energi selain minyak bumi di Kabupaten Seram Bagian Timur dijelaskan pada Tabel 4.15.

**Tabel 4.15 Potensi Pertambangan dan Energi Selain Minyak Bumi
di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Jenis Hasil Tambang	Lokasi	Jumlah Cadangan (M ³)	Keterangan
Lempung	1. W. Bobi (Bula) 2. W. Balasai (Bula) 3. Pantai Sisai-Pantai Fufa 4. W. Nief (bula) 5. Werinam	7.500.000 23.680.000 4.790.000 52.960.000 17.250.000	Bahan baku genteng, bata dan tembikar
Batu Gamping (Marmer)	1. Desa Gah 2. Desa Selangor 3. Desa Tah 4. Pulau Kasui	3.987.500.000 3.256.333.333 58.660.000 783.291.666	Bahan baku marmer, semen portland, dan keperluan industry lainnya.
Emas	Kecamatan Bula	Belum diketahui	Dalam tahap penelitian
Zirkon	Pesisir pantai Bula, Geser Dan Werinama	Belum diketahui	Dalam tahap penelitian
Batubara	Kecamatan Bula	Belum diketahui	Dalam tahap penelitian
Sirtu	1. W.Bobo 2. W.Matakabo 3. W.Bobi 4. W.LolaBesar 5. W.Fufa 6. W.BulaBesar 7. W.Botifar 8. W.Kola 9. W.Nief 10. W.Dulak 11. W.Koba 12. W.Nolt 13. W.Mud 14. W.Nawil 15. W.Nusalaut 16. W.Laita 17. W.Bobot	1.210.800 7.548.000 3.666.000 2.454.000 2.254.000 1.048.000 2.054.000 2.188.000 2.880.000 44.580 902.400 829.200 525.800 839.000 226.200 54.720 30.330.000	

Kawasan pertambangan di Kabupaten Seram Bagian Timur di kembangkan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan kondisi geologis yang rawan gempa. Agar kawasan pertambangan ini tidak merusak lingkungan, kegiatan ini perlu diawasi secara ketat perkembangannya dan dibuat aturan yang mengharuskan para investor ini untuk menguruk bekas galiannya agar tidak meninggalkan lubang-lubang bekas galian yang dapat menimbulkan dampak negatif/kerusakan terhadap lingkungan. Investor juga memiliki kewajiban menanam kembali kawasan yang telah mereka reklamasi dengan pohon-pohon spesies lokal yang pernah ada di kawasan ini sebelumnya. Kegiatan pertambangan galian C pada pulau-pulau kecil yang sangat rentan terhadap perubahan perlu dibatasi, sehingga dapat dihindari terjadinya kerusakan lingkungan.

Berdasarkan pada aspek-aspek pelestarian lingkungan, kegiatan



penambangan ini harus dibatasi dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Kegiatan penambangan pasir pantai atau sungai yang berada di daerah rawan bencana harus dihentikan. Izin eksploitasi untuk Kuasa Penambangan (KP) diberikan setelah investor melakukan penelitian daya dukung lingkungan terhadap aktivitas pertambangan yang akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah bencana lingkungan yang kerap terjadi di daerah pertambangan dan untuk kepentingan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Adapun pengelolaan kawasan pertambangan adalah:

- (a) Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan Mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- (b) Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus di rehabilitasi / reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/ atau bahan-bahan lainnya sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- (c) Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (*topsoil*) untuk keperluan rehabilitasi / reklamasi lahan bekas penambangan.



**Gambar 4.14 Peta Konsesi Minyak
Kabupaten Seram Bagian Timur**



Sumber : RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008-2028

P. Kawasan Peruntukan Industri

Upaya pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Seram Bagian Timur diarahkan pengembangannya pada kegiatan industri skala kecil dan menengah yang berbasis pada pengembangan sumber daya alam lokal. Kawasan industri merupakan kawasan dengan dominasi utama kegiatan industri yang dikelola secara terpadu oleh suatu pengembang kawasan industri (industrial estate) di bawah pembinaan Pemerintah Kabupaten melalui badan / dinas / instansi terkait, atau yang penanganannya pengembangan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten, yang dilengkapi berbagai prasarana dan sarana transportasi, jaringan utilitas, serta fasilitas penunjang lingkungan.

Pengembangan kawasan industri dipengaruhi oleh jenis industri komoditas unggulan dan keterkaitan industri terhadap perekonomian. Keterkaitan kegiatan industri terhadap perekonomian dapat dibedakan menjadi keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan. Keterkaitan ke belakang adalah hubungan industri tersebut dengan sektor / industri yang menyediakan bahan baku. Keterkaitan ke depan adalah hubungan antara industri tersebut dengan sektor/industri yang menggunakan output industri tersebut. Penentuan daerah industri berdasarkan potensi daerah masing -

masing, mengingat Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan wilayah kepulauan maka penentuan lokasi industri menyebar berdasarkan potensi unggulan daerah setempat :

Tabel 4.16 Jenis Industri berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Kecamatan	Industri	Potensi	Pengelola
Bula	Meubel	Kayu	Dinas Koperindag
Werinama	Meubel dan Anyaman	Kayu dan Rotan	Dinas Koperindag
Seram Timur	Pengolahan Ikan, Udang dan Rumput Laut	Perikanan	Dinas Perikanan dan Dinas Koperindag
P. Gorom	Pengolahan Ikan, Udang, Rumput Laut, Cengkeh dan Pala	Perikanan dan Perkebunan	Dinas Perikanan, Dinas Koperindag dan Dinas Pertanian
Tutuk Tolu	Pengolahan Ikan, Udang, Rumput Laut, Pala	Perikanan dan Perkebunan	Dinas Perikanan, Dinas Koperindag dan Dinas Pertanian
Kesui Watubela	Pengolahan Ikan, Udang, Rumput Laut, Pala	Perikanan dan Perkebunan	Dinas Perikanan, Dinas Koperindag dan Dinas Pertanian

Untuk menghindari dampak lingkungan, kegiatan industri yang akan dikembangkan perlu di lakukan dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan serta memperhatikan pengolahan limbah industri mengikuti baku mutu lingkungan yang berlaku. Sedangkan untuk melayani kegiatan masyarakat yang bekerja / berkunjung di lingkungan industri, padatiap zona /sentra kawasan industri akan dikembangkan pusat pelayanan yang dilengkapi fasilitas dan prasarana yang memadai dengan jenis pelayanan sesuai arahan rencana struktur tata ruang.

Q. Kawasan Pariwisata

Berdasarkan analisis kondisi biofisik, oseanografi dan kehadiran habitat utama dengan disertai keanekaragaman sumberdaya hayati didalamnya maka terdapat sejumlah lokasi di perairan pesisir dan laut Kabupaten Seram Bagian Timur yang layak dikembangkan rnenjadi daerah wisata yaitu wisata budaya dan wisata alam. Pariwisata budaya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Sedangkan lokasi-lokasi yang menjadi pengembangan wisata alam dimaksud adalah :

1. Kecamatan Seram Timur:
 - Kiffura;
 - Keffing;
 - Urung;
 - Kon;
2. Kecamatan Pulau Gorom
 - Garogos
 - Amarsekaru;
 - Gorom;
 - Wawatu.
3. Kecamatan Werinama
 - Tobo;
 - Hatumeten;
 - Osong;
 - Batuasa.
4. Kecamatan Bula
 - Englas;
 - Sesar;
 - Waihul.
5. Kecamatan Teluk Waru
 - Pulau Parang,
6. Kecamatan Bula Barat
 - Hote;
 - Silihan.
7. Kecamatan Tutuk Tolu
 - Pulau Akat.
8. Kecamatan Kesui Watubela
 - Pulau Igar;
 - Pulau Baam.
9. Kecamatan Teor
 - Pulau Kurkaf.

Seluruh lokasi yang disebut di atas memiliki keindahan pesisir pantai, terumbu karang danke ragam biota yang cukup tinggi, sehingga memberikan nuansa panorama pesisir dan bawah laut yang unik dan menarik. Lokasi-lokasi tersebut merupakan spot untuk berenang (*Skin Diving*) dan

menyelam (*Scuba Diving*) baru, serta ekowisata yang menarik dan perlu dikembangkan. Berikut ini merupakan potensi kawasan pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Timur yang tersaji dalam Tabel 4.17.

**Tabel 4.17 Potensi Pariwisata
di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Uraian	Potensi	Desa	Kecamatan
Danau Sole	Wisata Bahari (Karang, Magrove, Ikan, Pasir Putih)	Amar sekaru	Pulau Gorom
Pantai Gumummae	Wisata Bahari (Surfing dan Diving) dan Wisata Alam	Bula	Bula
Karang Bais	Wisata Bahari / Wisata Bawah Laut (Ikan, Terumbu Karang, Surfing, Diving)	Hote	Bula Barat
Pulau Akat	Penyangga Kota Kabupaten Hunimua, Wisata Bahari, Pulau Terapung (Ikan, Burung Kenari, Surfing, Diving)	Air Kasar	Tutu kTolu
Pulau Madoran, Kidan, Neden	Wisata Bahari	Kian Darat	Kian Darat
Gugus Pulau Nukus, Khon dan Garogos	Wisata Bahari, dan Wisata Alam	Kataloka	Pulau Gorom
Gugus Batu	Wisata Sejarah dan Budaya	Kian Darat	Kian Darat
Penangkaran Rusa	Wisata cagar Alam (dijadikan Taman Perburuan Rusa)	Nif dan Werinama	Bula dan werinama
Air Terjun	Wisata Alam	Gusa Laut	Werinama

**Gambar 4.15 Peta Rencana Kawasan Pariwisata
Kabupaten Seram Bagian Timur**



Sumber : RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008-2028



R. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pengembangan kawasan permukiman bertujuan untuk :

- 1) Memberikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia
 - 2) Memberikan arah bagi distribusi penduduk dan pertumbuhan wilayah
 - 3) Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lain.
- Rencana pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah terbentuknya satuan-satuan lingkungan berupa kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. Pengembangan kawasan perumahan di upayakan menggunakan konsep *neigh borhood unit* yang dilengkapi dengan fasilitas dan prasarana pelayanan umum yang memadai, sehingga penduduk yang tinggal di lingkungan perumahan tersebut sudah dapat terlayani kebutuhan pokoknya oleh pusat pelayanannya

**Gambar 4.16 Peta Rencana Transmigrasi
Kabupaten Seram Bagian Timur**



Sumber : RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008-2028

Pengembangan kawasan perumahan di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilakukan oleh masyarakat dalam skala kecil yang umumnya tumbuh secara alami dan dibangun secara horisontal sesuai kebutuhan, sedangkan penyediaan fasilitas pelayanan umum dapat dibangun melalui swadaya masyarakat yang dibantu oleh pemerintah kabupaten. Sedangkan pengembangan lingkungan perumahan oleh pemerintah kabupaten dititik beratkan pada penataan lingkungan perkampungan, yang dilakukan melalui perbaikan dan peremajaan rumah dan lingkungannya, seperti program perbaikan kampung dengan mengikutsertakan sumberdaya masyarakat setempat.

Pada saat ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam pengembangan pemukiman transmigrasi memakai Rencana Tata Ruang Satuan Pemukiman (RTSP) yang tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Werinama dan Kecamatan Bula.

Tabel 4.18 Penyebaran Lokasi Transmigrasi

Kecamatan	UPT	Lokasi
Kec. Bula Barat	UPT.U	Aki Ternate
	UPT.R	Banggoi
	UPT.T	Jakarta Baru
	UPT.X	Banggoi
	UPT.Y	Hote
	UPT.Z	Hote
Kec.Werinama	UPT Batuasa	Batuasa

Bab. V

Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Dalam hal guna pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 seperti yang telah dibahas dalam Bab III yakni tercapainya target pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2025, ada rasionalisasi dan pengoptimalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD 2025.

Program yang ditetapkan memiliki pagu indikatif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 ini meliputi perubahan target indikator sasaran, program, kegiatan maupun subkegiatan. Perubahan ini terjadi karena adanya penyesuaian kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester pertama bulan juni 2025, maka Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada perubahan di OPD, baik pengalihan, penambahan pagu maupun kegiatan baru yang sangat urgen atau tidak bisa ditunda sehingga harus dianggarkan melalui mekanisme APBD Perubahan. Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1 Pagu Indikatif Perubahan RKPD
Berdasarkan Urusan Tahun 2025**

Berdasarkan Urusan Tahun 2025					
NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF		
			RKPD 2025	APBD 2025	P. RKPD 2025
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		926.325.500.000	605.249.345.513	714.965.108.776
1		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	160.200.000.000	242.110.869.028	249.390.546.886
2		DINAS KESEHATAN	279.000.000.000	135.463.654.386	178.510.183.358
3		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GORAN RIUN	41.455.000.000	8.350.000.000	7.454.000.000
4		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BULA	279.000.000.000	135.463.654.386	178.510.183.358
5		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	106.875.000.000	60.680.766.753	47.677.131.643
6		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18.665.000.000	3.994.245.912	3.944.394.562
7		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.730.000.000	4.967.959.395	35.470.503.395
8		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.098.000.000	5.721.801.044	5.651.801.044
9		DINAS PEMADAM KEBAKARAN	3.317.500.000	2.600.002.271	2.530.002.217
10		DINAS SOSIAL	20.985.000.000	5.896.392.338	5.826.362.313
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		66.300.052.451	46.076.633.558	44.995.163.434
2		DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	9.665.450.060	3.273.874.980	2.157.250.867
3		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.300.000.000	3.999.637.012	4.079.637.012
3		DINAS KETAHANAN PANGAN	14.510.000.000	2.601.303.779	3.351.303.754
4		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.515.000.000	4.735.697.882	4.417.727.482
5		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	4.570.000.000	2.852.684.796	2.530.656.528



NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF		
			RKPD 2025	APBD 2025	P. RKPD 2025
		SIPIL			
6		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.406.000.000	7.513.056.785	7.658.056.785
7		DINAS PERHUBUNGAN	4.696.455.000	4.150.552.887	4.387.702.889
8		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5.505.000.000	3.049.814.870	2.972.814.870
9		DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	667.147.391	7.037.291.227	6.967.291.227
10		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.290.000.000	2.748.535.214	3.028.535.394
11		DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	2.175.000.000	4.114.184.126	3.444.186.626
C	Urusan Pemerintahan Pilihan				
1		DINAS PERIKANAN	18.572.000.000	8.929.297.203	8.553.512.663
2		DINAS PARIWISATA	8.284.000.000	3.104.107.487	2.784.106.787
3		DINAS PERTANIAN	11.615.000.000	11.259.533.357	11.759.139.357
D	UNSUR PENDUKUNG		124.139.189.000	123.864.454.246	133.708.994.629
1		SEKRETARIAT DAERAH	55.949.189.000	88.526.919.315	98.551.459.698
2		SEKRETARIAT DPRD	68.190.000.000	35.337.534.931	35.157.534.931
E	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan		52.823.132.429	242.059.541.858	244.083.139.007
1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	18.095.000.000	5.940.319.022	7.781.664.667
2		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	18.668.000.000	227.425.988.017	227.295.828.014
3		BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.346.632.429	4.392.245.493	4.125.280.035
4		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	9.713.500.000	4.300.989.326	4.880.366.291



NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF		
			RKPD 2025	APBD 2025	P. RKPD 2025
		MANUSIA			
F	Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan		14.832.900.000	9.470.980.931	8.800.629.931
1		INSPEKTORAT DAERAH	14.832.900.000	9.470.980.931	8.800.629.931
G	Urusan Kewilayahaan		13.285.213.300	16.951.548.644	18.105.327.644
1		KECAMATAN BULA	2.196.106.650	2.406.952.517	2.762.752.517
2		KECAMATAN TELUK WARU	600.000.000	1.820.175.722	1.670.175.722
3		KECAMATAN TUTUK TOLU	900.000.000	857.915.677	857.915.677
4		KECAMATAN KIANDARAT	620.000.000	414.089.571	697.089.571
5		KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR	675.000.000	930.679.619	930.679.619
6		KECAMATAN KILMURY	735.000.000	1.255.875.181	1.355.854.181
7		KECAMATAN WERINAMA	1.235.000.000	1.876.876.785	1.876.876.785
8		KECAMATAN SIWALALAT	710.000.000	1.603.189.941	1.898.189.941
9		KECAMATAN SERAM TIMUR	640.000.000	1.142.279.566	1.142.279.566
10		KECAMATAN PULAU GOROM	2.199.106.650	1.394.195.466	1.394.195.466
11		KECAMATAN GOROM TIMUR	700.000.000	825.394.658	825.394.658
12		KECAMATAN PULAU PANJANG	650.000.000	1.008.311.855	1.008.311.855
13		KECAMATAN KESUI WATUBELA	805.000.000	760.416.375	760.416.375
14		KECAMATAN TEOR	620.000.000	655.195.711	655.195.711
15		KECAMATAN UKAR SENGAN	-	-	270.000.000
H	Urusan Pemerintahan Umum		4.453.110.900	6.543.051.091	8.478.051.091
1		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.453.110.900	6.543.051.091	8.478.051.091
TOTAL			1.240.630.098.080	1.073.508.493.888	1.196.233.173.319

Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 selain untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan penganggaran serta mewujudkan efisiensi berbagai sumber daya pembangunan daerah, juga sebagai pedoman dalam tahapan penganggaran, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum

Perubahan APBD (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS), serta Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tabel 5.2
Konsistensi Dokumen Perencanaan Perubahan Tahun 2025

Uraian	RKPD 2025		APBD 2025		Perubahan RKPD 2025	
	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu
PROGRAM	113	1.010.263.098.080	91	1.073.508.493.888	96	1.196.233.173.319
KEGIATAN	223	1.010.263.098.080	154	1.073.508.493.888	169	1.196.233.173.319
SUB KEGIATAN	785	1.010.263.098.080	356	1.073.508.493.888	418	1.196.233.173.319

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diinput oleh perangkat daerah ke dalam sistem SIPD-RI pada Perubahan RKPD Tahun 2025 tercatat sebanyak 96 program, 169 kegiatan, dan 418 sub kegiatan, dengan total anggaran perubahan sebesar Rp. 1.196.233.173.319,00. Anggaran ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 122.724.679.431,00 atau 10,26% dibandingkan dengan anggaran pada APBD Tahun 2025 yang sebesar Rp. 1.073.508.493.888,00.

Penambahan jumlah sub kegiatan dari RKPD 2025 ke Perubahan RKPD 2025 disebabkan oleh masuknya sejumlah sub kegiatan baru untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan prioritas daerah. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang bertambah dapat dilihat pada Tabel 5.3 (Sumber : SIPD Tahun 2025).

Bab. VI Penutup

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang didasari atas evaluasi kinerja pembangunan semester pertama Tahun Anggaran 2025. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah akan dijadikan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025 serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025. Dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan, Organisasi Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergitas.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 ditindaklanjuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, dan dijadikan pedoman penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 oleh masing-masing Perangkat Daerah.



FACHRI HUSNI ALKATIRI, Lc., M.Si.

